



SKRIPSI

**KEBHINEKAAN BERDASARKAN TEORI *TASYKIK*
*AL-WUJŪD***

Disusun oleh:

Hasrullah

Nimko: 6912030213027

Pembimbing:

Dr. Muhsin Labib, MA

**PROGRAM STUDI AKIDAH DAN FILSAFAT ISLAM
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM SADRA
JAKARTA
TAHUN 2023**

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

KEBHINEKAAN BERDASARKAN TEORI *TASYKIK AL-WUJŪD*

Disusun oleh:
Hasrullah

NIMKO:
6912030213027

Program Studi: Akidah dan Filsafat Islam

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Skripsi ini merupakan asli hasil penelitian penulis sendiri dan bukan hasil karya atau penelitian orang lain, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila di kemudian hari terbukti plagiat atau pernah dipublikasikan sebagai skripsi di tempat lain, maka penulis siap menerima sanksi akademik berupa pembatalan gelar yang diperoleh. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Jakarta, 25 Januari 2023

Hasrullah

LEMBAR PERSETUJUAN LAPORAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Hasrullah

NIM : 6912030213027

Prodi : Akidah dan Filsafat Islam

Judul Penelitian: **KEBHINEKAAN BERDASARKAN TEORI TASYKIK AL-WUJŪD**

Telah disetujui dan disahkan oleh Dosen Penguji:

Dr. Khalid Al-Walid, M.Ag

(*Ketua Sidang*) Date _____(.....)

Dr. Muhsin Labib, MA

(*Pembimbing*) Date _____(.....)

Dr. Humaidi, M.Ud

(*Penguji I*) Date _____(.....)

Dr. Abdelaziz Abbaci

(*Penguji II*) Date _____(.....)

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB – LATIN

Pedoman transliterasi Arab-Latin yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Turābiyan* dengan beberapa pengecualian:

A. Konsonan

b = ب	z = ز	f = ف
t = ت	s = س	q = ق
th = ث	sh = ش	k = ك
j = ج	ṣ = ص	l = ل
ḥ = ح	ḍ = ض	m = م
kh = خ	ṭ = ط	n = ن
d = د	ẓ = ظ	h = هـ
dh = ذ	‘ = ع	w = و
r = ر	gh = غ	y = ي

B. Vokal

Pendek	: a = َ ;	i = ِ ;	u = ُ
Panjang	: ā = َ ;	ī = ِ ;	ū = ُ
Diftong	: ay = ِ ;	aw = ِ	

C. Ta’Marbutah (ة)

Ta’ marbutah yang diidafahkan (disambung dengan kata lain) ditulis “t”, seperti contoh lafal معرفة الله ditulis *fi ma’rifat Allāh*. Ta’

marbutah yang disambung dengan kata lain tapi tidak dalam posisi mudaf, maka ditulis “h”, seperti contoh lafal المدينة الفاضلة ditulis *al-madīnah al-fāḍilah*.

D. Syaddah

Syaddah atau tasydid ditransliterasi dengan huruf, yaitu menggunakan dua huruf, seperti lafal عقلية ditulis ‘*aqliyyah*, فعلية ditulis *fi’liyyah*, dan قوة ditulis *quwwah*, sedangkan tasydid yang berada di akhir kata, seperti عدوّ maka tidak ditulis dengan menggunakan dua huruf, tetapi hanya satu huruf, yaitu ditulis ‘*aduw*.

E. Kata Sandang

Kata sandang “al” dilambangkan berdasarkan padahuruf yang mengikutinya. Jika huruf setelahnya adalah huruf shamsiyyah maka ditulis dengan huruf yang bersangkutan, demikian juga denganhuruf al-qamariyyah.

F. Pengecualian Transliterasi

Pengecualian transliterasi adalah kata bahasa Arab yang telah lazim digunakan di dalam bahasa Indonesia dengan menjadi bagian dalam bahasa Indonesia, seperti lafal سنة الله maka ditulis *sunnatullāh*, dan juga lafal asma al-husna, seperti عبد الرحمن maka ditulis ‘*Abdurrahmān* dan جلال الدين maka ditulis *Jalāluddīn*.

ABSTRAK

Keberagaman dalam bingkai *Bhineka Tunggal Ika* yang tercantum dalam simbol negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan sebuah keniscayaan dalam realitas konkrit, sehingga bagi siapapun tidak dapat menyangkal darinya. Namun, hal tersebut justru tidak dipahami secara serius oleh sebagian orang, sehingga seringkali memicu terjadi konflik di tengah kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebut saja misalnya masih terdapat beberapa konflik horizontal, baik yang terjadi di kalangan umat beragama hingga kecenderungan politik praktis yang hanya menguntungkan sebagian individu/kelompok tertentu saja. Padahal, *Bhineka Tunggal Ika* telah lama dan dituangkan dalam konstitusi negara Indonesia. Hal ini tentu saja perlu untuk diintegrasikan dan diimplementasikan dalam berbagai unsur kehidupan dalam berbangsa dan bernegara. Sementara itu, penelitian ini merupakan penelitian deskriptif-kualitatif yang didasarkan pada pembuktian secara argumentatif (*burhān*) yang tinjau berdasarkan *Teori Tasykīk Al-Wujūd*. Maka dari itu, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kebhinekaan merupakan sebuah keniscayaan dalam realitas kehidupan, dan memiliki berbagai tingkatan keberagaman yang tidak saling berbenturan satu sama lainnya. Apalagi dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia dengan semboyan *Bhineka Tunggal Ika*, setidaknya hal ini dapat menciptakan sebuah kehidupan yang harmonis di tengah berbagai keragaman etnis, suku, budaya, politik, hingga agama.

Kata Kunci: *Bhineka Tunggal Ika*, Kesatuan, Keberagaman, Ideologi, *Tasykīk Al-Wujūd*.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis mengucapkan atas kehadiran Allah Yang Maha Esa, yang telah memberikan anugerah yang melimpahkan dan kasih sayang-Nya. Dan tak lupa penulis mengucapkan shalawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi besar kita Muhammad SAW, beserta keluarganya , para sahabat-sahabatnya, serta pengikut setia beliau. Alhamdulillah penulis ucapkan rasa syukur atas rahmat-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan Skripsi dengan judul “ Kebhinnekaan dalam Perspektif Mulla Shadra”.

Skripsi ini merupakan salah satu persyaratan untuk memenuhi persyaratan S1 di Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Sadra Jakarta.

Tentunya bahwa dengan berjalannya penelitian ini, itu tidak terlepas dari berbagai pihak yang memberikan dukungan semaksimal mungkin. Maka dari itu dengan kesempatan ini peneliti mengucapkan terima kasih banyak kepada yang terhormat :

1. Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Sadra, Jakarta.
2. Dr. Kholid Al-Walid selaku ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Sadra Jakarta.
3. Bernianti Lingga Sari, S.Psi selaku Kepala Biro Akademik Sekolah Tinggi Agama Islam Sadra Jakarta.
4. Dr. Muhsin Labib, M.Ag selaku dosen pembimbing Skripsi yang senantiasa meluangkan waktunya untuk memberikan masukan dalam penelitian ini sampai selesai.
5. Endang Sri Rahayu, M.Ud selaku dosen pembimbing akademik.
6. Seluruh Staf Sekolah Tinggi Agama Islam (STFI) Sadra Jakarta yang telah banyak membantu peneliti dalam kegiatan ini sampai selesai.
7. Kepada keluarga khususnya kepada kedua orang tua atas dukungannya selama ini baik berupa moral, maupun materi sehingga peneliti mampu menyelesaikan Skripsi ini sampai selesai.

8. Kepada pihak lain yang tidak dapat peneliti sebutkan satu per satu namanya, terima kasih banyak atas bantuannya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan kegiatan ini sampai selesai.

Demi kesempurnaan hasil penelitian ini, sangat diharapkan kritik dan saran yang membangun, sehingga hasil penelitian ini menjadi lebih sempurna. Semoga hasil penelitian ini, bermanfaat bagi semua yang membutuhkannya.

Jakarta, 25 Januari 2023

Hasrullah

DAFTAR ISI

LEMBAR BEBAS PLAGIASI	ii
LEMBAR PERSETUJUAN LAPORAN SKRIPSI.....	iii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	iv
ABSTRAK.....	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah	16
C. Batasan dan Rumusan Masalah.....	18
D. Tujuan Penelitian.....	18
E. Manfaat Penelitian.....	19
F. Kajian Pustaka.....	19
G. Metode Penelitian.....	22
H. Sistematika Penelitian	22
BAB II DISKURSUS TENTANG KEBHINEKAAN.....	24
A. Pengertian Kebhinekaan.....	24
1. Secara Etimologi	24
2. Pengertian Menurut Para Ahli.....	26
B. Sejarah Bhineka Tunggal Ika	27
C. Kebhinekaan dari Berbagai Aspek (Agama, Ekonomi, dan Politik).....	30
BAB III DISKURSUS TENTANG <i>TASYKĪK AL-WUJŪD</i>	50
A. Kuiditas (<i>Mahiyah</i>).....	50
B. Wujud.....	52
C. Fundamentalitas Wujud.....	53
D. Unitas dan Pluralitas Wujud.....	58
E. <i>Tasykīk Al-Wujūd</i>	70

BAB IV KETERKAITAN ANTARA <i>TASYKĪK AL-WUJŪD</i> DAN BHINEKA TUNGGAL IKA	77
A. Keniscayaan Kebhinekaan dan <i>Tasykĭk Al-Wujūd</i>	77
1. Implikasi Keberagaman Wujud terhadap Eksistensi Kebhinekaan	81
2. Implikasi Wujud terhadap Eksistensi Kebhinekaan	83
B. Eksistensi Kebhinekaan Berdasarkan Kesepakatan Konstitusi dan Keniscayaan Kebhinekaan Berdasarkan Wujud.....	91
1. Kebhinekaan secara Konstitusi	98
2. Kebhinekaan secara Eksistensial.....	100
 BAB VI PENUTUP.....	102
A. Kesimpulan.....	102
B. Saran.....	103
 DAFTAR PUSTAKA	105

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Melihat realitas kebhinekaan di Indonesia sejauh ini, masih saja terdapat konflik yang terjadi dalam tatanan kehidupan sosial, baik dari aspek agama, ekonomi maupun politik. Dari berbagai aspek itulah yang seringkali memicu terjadinya konflik yang berakibat pada kesenjangan masyarakat. Padahal, harapan untuk dapat hidup berdampingan merupakan cita-cita bersama, akan tetapi hal tersebut justru seringkali tidak dihiraukan oleh sebagian individu/kelompok tertentu, sehingga menciptakan ketidakharmonisan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Di sisi lain, dikatakan bahwa keberagaman merupakan sebuah keniscayaan. Hanya saja, pada kenyataannya bahwa dengan adanya kebhinnekaan atau keberagaman justru menjadi ladang permasalahan dan konflik, baik berupa permusuhan bahkan pertikaian dalam tatanan sosial. Konflik tersebut terjadi berlandaskan atas perbedaan seperti salah-satunya dalam konteks agama. Kita dapat mengamati bagaimana para penganut di dalamnya saling menafikkan satu sama lain dengan menganggap golongannya yang paling benar. Konflik lainnya juga dapat kita amati dalam konteks ekonomi yang menjadi salah-satu ladang masalah, sehingga menimbulkan tindakan kriminalisasi. Dalam konteks politik, seseorang juga saling menjatuhkan demi merebut kekuasaan. Masing-masing dari saling memperjelas eksistensinya, sehingga sikap intoleransi pun menjadi warna dalam interaksi sosial tersebut. Juga tidak terlepas dari kaum mayoritas yang menganggap dirinya melebihi penguasa atas kaum minoritas, sedang kaum minoritas senantiasa selalu tertindas atas perilaku kaum mayoritas.

Ada sebuah teori yang menjelaskan bahwa konflik itu bisa terjadi karena ada beberapa faktor. Misalkan dalam teori konflik (*conflict theory*). Berdasarkan teori ini, konflik itu berasal dari pertentangan kelas antara kelompok penindas dan yang tertindas, sehingga memicu terjadinya perubahan sosial. Teori ini merujuk pada

pandangan Karl Max yang mengemukakan bahwa konflik kelas sosial paling penting juga sangat berpengaruh dalam semua perubahan sosial¹. Serupa dengan pandangan Karl Marx, dalam bidang ilmu-ilmu sosial seperti antropologi dan sosiologi konflik, juga dipahami sebagai hubungan antara kedua belah pihak atau lebih (individu dan kelompok) yang memiliki cara pandang, pemahaman yang tidak sejalan², sehingga seringkali berujung pada pertikaian.

Dengan adanya konflik tersebut, sudah jelas ini menjadi masalah besar dalam hubungan interaksi sosial, juga berdampak dalam keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Dan masalah tersebut perlu kiranya diangkat serta membutuhkan respon yang cukup serius guna menimalisir kemungkinan-kemungkinan yang bisa saja terjadi yaitu konflik yang berkelanjutan. Dari sini, tentu saja dapat kita amati bahwa ada beberapa konflik yang pernah terjadi di Indonesia. Dalam catatan Komnas HAM menjelaskan bahwa:

Kasus intoleransi meningkat setiap tahun. Koordinator Desk Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan (KBB) Komnas HAM Jayadi Damanik mengatakan bahwa “jumlah kasus intoleransi pada tahun 2016 terus mengalami peningkatan jika dibandingkan dua tahun sebelumnya”. Menurutnya dengan adanya peningkatan angka intoleransi ini, mengkhawatirkan eksistensi kebhinnekaan di Indonesia. Pada tahun 2014, Komnas HAM mencatat kasus intoleransi sebanyak 74 telah dilaporkan ke pengaduan Deks KBB. Pengaduan kasus Intoleransi ke Deks KBB pada tahun 2015 meningkat menjadi 87 kasus. Pada tahun 2016 meningkat menjadi 100 kasus. Pelanggaran ini diantaranya, melanggar aktivitas keagamaan, diskriminasi atas dasar keyakinan atau agama, dan pemaksaan keyakinan. Sementara Kombes Pol Awi Setiyono selaku Kepala Bagian Mitra Divisi Humas Polri mencatat kasus intoleransi terjadi sepanjang tahun 2016 sebanyak 25 kasus. Kasus

¹ Bagja Waluya, *Sosiologi: Menyalami Fenomena Sosial di Masyarakat Untuk Kelas X Sekolah Menengah Atas*, (Bandung: PT. Setia Purna Inves, 2007), hal. 57

² I Wayan Ardhi Wirawan, *dkk, Konflik dan Kekerasan Komunal pada Komunitas Hindu di Nusa Tenggara Barat Pasca Otonomi Daerah*, (Yogyakarta: Deepublish, 2016), hal. 37

tersebut dalam bentuk pelanggaran pelanggaran hingga perusakan rumah ibadah³.

Di sisi lain, dalam harian *Tempo* juga pernah mencatat bahwasanya:

Beberapa tragedi di Indonesia terjadi konflik karena berlatar belakang budaya. Seperti peristiwa di Sampit, Kalimantan Tengah yang bermula dari dua etnis saling menyerang satu sama lain yaitu Madura dan Dayak pada tanggal 18 Februari 2001. Konflik ini menewaskan sebanyak 469 jiwa berlangsung selama 10 hari. Konflik Maluku yang mempunyai latar belakang berbeda agama yaitu Islam dan Kristen menelan korban sebanyak 9 ribu jiwa. Dan banyak fasilitas rumah ibadah dihancurkan, seperti masjid sebanyak 45 dan gereja 47, dan gedung pemerintahan 38 yang dihancurkan. Konflik ini berjalan selama 4 tahun. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mencatat konflik sosial di dunia sebanyak 75 % berakar dari dimensi kultural⁴.

Berdasarkan data tersebut bahwa konflik senantiasa menjadi sebuah keresahan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Padahal, Indonesia telah menjadikan kebhinekaan sebagai simbol pemersatu bangsa, entah dalam kaitannya dengan suku, ras, budaya, politik, hingga agama, namun hal tersebut sepertinya belum dipahami dan diimplementasikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, sehingga bisa dipastikan bahwa konflik agama, sosial budaya, politik akan menjadi tantangan dalam kebhinnekaan kita di Indonesia.

Muhammad Nurkholis mengemukakan bahwa jika kita ingin memaparkan secara rinci, paling tidak ada beberapa tantangan bagi kebhinekaan kita di Indonesia, yaitu:

Pertama, ujar kebencian (*hate speech*). Dalam hal ini, melalui media misalnya begitu marak disebarkan bahkan kita tidak bisa bendung. Kebencian ini bukan hanya dilakukan oleh orang biasa. Tetapi juga terdapat pada tokoh agama juga pemimpin umat.

³ Dikutip dari laman Kompas. Com, *Catatan Kommas HAM, Kasus Intoleransi Meningkat Setiap Tahun*, Kamis 5 Januari 2017, Pukul 18:28 WIB

⁴ Dikutip dari laman Tempo.Co, *Konflik yang Dipicu Keberagaman Budaya Indonesia*, Pukul 17:00 WIB, Tgl 12 April 2017

Maraknya kebencian ini tentu memiliki implikasi yang sangat besar bagi relasi, interaksi masyarakat luas seperti antarumat beragama. Hubungan yang tadinya baik berubah menjadi warna kebencian sehingga mengganggu, juga merusak kerukunan dalam interaksi sosial.

Kedua, Intoleransi. Tindakan ini sangat tidak sejalan dengan semboyan ideologi negara Indonesia yaitu *Bhinneka Tunggal Ika*, karena tindakan ini cenderung tidak ingin melihat perbedaan, keberagaman. Sepanjang 2016 misalnya, Jayadi Damanik selaku Koordinator Desk Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan (KBB), Mengatakan bahwa jumlah kasus intoleransi meningkat, dibandingkan dua tahun sebelumnya yakni 2014 dan 2015.

Ketiga, diskriminasi. Tindakan ini dimaknai sebagai pembatasan, pelecehan, pengucilan baik langsung maupun tak langsung didasarkan dalam perbedaan agama, suku, etnik, ras, budaya, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, dan keyakinan politik. Saat ini masih marak terjadi tindakan diskriminasi. Maka dari itu LBH Jakarta pada awal 2016 lalu memberikan penilaian buruk terhadap pemerintah dalam hal pencegahan tindakan diskriminasi diberbagai sektor kehidupan berbangsa dan bernegara. Negara dinilai abai terhadap implementasi penegakan konstitusi sehingga pelaku diskriminasi tetap bebas melakukan aksinya tanpa sanksi hukum apa pun. LBH Jakarta berpendapat bahwa sikap intoleransi yang diwujudkan dalam tindakan diskriminasi, menghambat potensi individu maupun kelompok tertentu untuk berkembang. Justru dengan keadaan seperti ini akan menghentikan mereka berkontribusi kepada perkembangan nasional di tengah-tengah masyarakat. jika negara tidak serius menanggapi sikap diskriminasi yang dilakukan baik melalui ujaran, sikap, media, juga kebijakan negara sendiri, maka dapat menimbulkan ketidakpastian hukum, kerusuhan sosial, konflik, ketidakstabilan, juga dapat berdampak pada pertumbuhan ekonomi.

Keempat, koersi. Paksaan atau koersi adalah praktik melakukan paksaan terhadap pihak lain baik secara langsung maupun tak langsung, dengan menggunakan ancaman, intimidasi atau bentuk lain dari tekanan atau kekuatan. Tindakan ini kerap dilakukan oleh mereka yang merasa paling benar, dan memaksa orang lain yang dinilainya sesat agar kembali ke jalan yang benar, sebagaimana kebenaran subjektif atas pelaku tindakan koersi. Beberapa di antaranya yang sering korban atas tindakan koersi ini seperti

penganut Ahmadiyah, penganut Syi'ah, Komunis Gaffar, dan masih banyak lagi⁵.

Berdasarkan uraian Muhammad Nurkholis mengenai beberapa tantangan terhadap kebhinekaan kita di Indonesia, dapat dipastikan bahwa penyebab konflik karena adanya masalah persepsi sebagaimana yang telah dijelaskan dalam salah-satu teori konflik sebelumnya yaitu konflik yang dipahami sebagai hubungan antara kedua bela pihak atau lebih (individu dan kelompok) yang memiliki cara pandang atau pemahaman yang tidak sejalan.

Konflik itu terjadi karena adanya kesalahpahaman (persepsi), karena setiap orang mengaku dirinya benar, sehingga mereka menganggap perlu untuk menafikkan selain dari apa dipahami oleh individu/kelompok lain dan ini yang dimaksud dengan istilah intoleransi. Maka dari itu, pertanyaan selanjutnya adalah apa akar dari permasalahan intoleransi tersebut? Berikut ini akan diuraikan lebih jauh, antara lain:

Pertama, Konflik agama. Keyakinan yang sama dapat menimbulkan konsekuensi-konsekuensi yang beragam dalam situasi sosial. Keyakinan yang sama dapat diinterpretasikan berbeda dalam lingkungan masyarakat yang berbeda pula. Sikap para agamawan juga sangat kompleks. Ada yang suka mengadopsi sikap-sikap intoleransi, ada juga meskipun minoritas, tapi senantiasa menyuarakan perdamaian, rekonsiliasi pada akhirnya dimusnahkan. Agama bisa menjadi konflik, itu bisa terjadi, juga bisa mengatasi, serta memberi solusi terhadap konflik⁶. sebagaimana dikatakan Garang bahwa sentiment yang mendominasi dalam konflik sepanjang sejarah di Indonesia, itu adalah sentiment agama. hal ini membuktikan bahwa kepanatikan ajaran agama dengan cepat meningkatkan suasana konflik dan kekerasan⁷. Penyebab intoleransi bisa jadi karena seseorang kurang belajar agama, atau kurangnya pemahaman tentang agama. Juga bisa saja ajaran informasi-informasi agama yang disampaikan, dan diperoleh oleh seseorang, itu adalah penafsiran-

⁵ Lihat dalam pengantar penulis, Ahmad Nurkholis, *Merajut Damai dalam Kebhinekaan*, (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2017)

⁶ Keith Ward, *Benarkah Agama Berbahaya?*, (Yogyakarta: Kanisius, 2009), hal. 106

⁷ Mega Hidayati, *Jurang di Antara Kita Tentang Keterbatasan Manusia dan Problem Dialog dalam Masyarakat Multikultur*, (Yogyakarta: Kanisius, 2008), hal. 152

penafsiran yang memuat sebagian pesan-pesan intoleransi. Tetapi, ada juga orang yang menyandang gelar tinggi dalam pendidikan agama, juga ditokohkan, namun mereka malah mencerminkan tindakan-tindakan intoleransi. Jadi, bisa dipastikan bahwa minimnya pengetahuan tentang agama bukanlah menjadi hal niscaya sehingga terjadi konflik. Kenapa dikatakan bahwa minimnya seseorang pengetahuan tentang agama bukanlah menjadi dasar terjadinya konflik? karena seseorang yang mempunyai gelar tinggi tentang pendidikan agama bahkan ditokohkan pun, kadangkala menjadi aktor konflik.

Kedua, Konflik bisa saja terjadi karena kesenjangan ekonomi. Misalkan tindakan kriminal berupa motif perampokan, dan pencurian karena dampak dari ketidakmerataan ekonomi atau disebut dengan istilah kesenjangan ekonomi. Ralf Dahrendorf berpendapat bahwa semua perubahan sosial merupakan konflik kelas di masyarakat⁸. Misalkan merampok, itu terjadi karena pemenuhan kebutuhan yang mendesak yaitu untuk memenuhi kebutuhan primer si subjek. Tapi, kenapa justru banyak orang yang sudah mapan secara ekonomi, juga melakukan tindakan korupsi (kriminal)? bukankah mereka sudah dapat memenuhi kebutuhan primernya? Jadi, dapat dipastikan bahwa kesenjangan ekonomi bukan hal niscaya menjadi faktor terjadinya konflik, meskipun sebagian orang menganggap bahwa itu disebabkan oleh kesenjangan ekonomi.

Ketiga konflik bisa terjadi karena kepentingan politik. Memang sebagian konflik itu terjadi karena perebutan kekuasaan. Semua orang mempunyai keinginan untuk berkuasa. Tapi tidak semua konflik karena perebutan kekuasaan. Tetapi, ada fakta yang tidak bisa dipungkiri bahwa orang-orang menganggap intoleransi sebagai keshalehan atau sebagai bentuk religiusitas bahkan mereka malah orang-orang sudah tidak memiliki interfensi kekuasaan di bidang politik. Tapi, sebagian orang menganggap bahwa konflik itu berasal dari kepentingan kekuasaan karena mempunyai fakta yang tidak bisa dipungkiri. Berarti jelas bahwa bukan cuma hanya faktor perebutan kekuasaan adalah penyebab konflik. Melainkan orang yang tidak mempunyai kuasa di bidang politik pun bisa menimbulkan konflik yaitu orang yang

⁸ Bagja Waluya, *Sosiologi : Menyalami Fenomena Sosial di Masyarakat Untuk Kelas X Sekolah Menengah Atas*, (Bandung : PT. Setia Purna Inves, 2007), hlm. 57.

menganggap bahwa intoleransi adalah sebuah keshalehan. Bahkan ada juga orang yang berpolitik memiliki tetapi memiliki niat yang baik untuk merebut kekuasaan dari pola kepemimpinan yang zalim.

Berdasarkan pemetaan masalah yang telah dijelaskan tersebut tentunya kita belum mendapatkan apa yang menjadi permasalahan substansial sehingga memicu terjadinya konflik. Sedangkan, terjadinya konflik sudah bisa dipastikan bahwa bukan karena pemahaman tentang agama, bukan karena kehendak politik, juga bukan karena kesenjangan ekonomi. Ketiganya sudah diuraikan berdasarkan asumsi-asumsi yang ada, dan tertolak dengan realitas sebagaimana adanya bahwa terjadinya konflik itu motifnya sangat beragam. Berarti bisa dipastikan bahwa tiga uraian faktor konflik tersebut bukanlah permasalahan substansial yang mempengaruhi konflik itu sendiri. Artinya bahwa semuanya ini adalah akibat atau permasalahan sekunder dari satu masalah yang bermuara pada satu permasalahan. Lalu apa itu? Hal ini tak lain yaitu persepsi terhadap kebenaran atau klaim kebenaran (*truth claim*). Sebagaimana dikatakan bahwa penafsiran tertentu terhadap klaim-klaim kebenaran itu dipandang dan dipahami secara literal, dan dianggap sebagai satu-satunya kebenaran, sehingga menuntut adanya keseragaman. Maka inilah awal dari malapetaka yang merusak citra agama juga membuat orang jahat, dan pada akhirnya berimplikasi merusak tatanan sosial beragama itu sendiri⁹. Jadi, pertanyaannya kebenaran itu apa, dan hal-hal apa saja yang berkaitan dengan permasalahan kebenaran?

Di sini, ada beberapa definisi terkait kebenaran di antaranya: kebenaran dalam konteks pengetahuan adalah kesesuaian bentuk mental dengan objek yang dicerapnya. Kebenaran dalam konteks pragmatis yaitu pemikiran yang berguna bagi kehidupan praktis manusia. Kalau kebenaran dalam kaum relativis, mengatakan bahwa kebenaran adalah pengetahuan yang cocok dengan perangkat

⁹ Jan S. Aritonang, *Sejarah Perjumpaan Kristen dan Islam di Indonesia*, (Jakarta : PT BPK Agung Mulia, 2004), hlm. XV

persepsi yang sehat. Kebenaran juga diartikan apa yang semua disepakati orang, dan definisi terakhir kebenaran adalah pengetahuan yang bisa dialami secara inderawi¹⁰. Sementara itu, ada juga yang mendefinisikan kebenaran yaitu proses perjumpaan sisi-sisi positif keragaman itu sendiri¹¹ yang diperoleh berdasarkan pada sebuah kesadaran eksistensial.

Terkait hal itu, mereka kaum agamawan yang menganggap bahwa mereka lebih benar dari selain individu/kelompok yang berada di luar dari kelompoknya. Mereka melakukan tindakan kriminal untuk merugikan orang lain, karena merasa dirinya pantas untuk “merampok” guna memenuhi kebutuhannya. Mereka sebagai petarung dalam merebut kekuasaan, karena mereka menganggap bahwa merekalah yang patut berkuasa. Semua masalah ini bermuara pada satu substansi. Masalah apa itu? Hal ini tak lain adalah permasalahan kesadaran eksistensi.

Seperti dikatakan sebelumnya bahwa adanya konflik karena berangkat dari kesalahpahaman (persepsi). Dengan menilai suatu objek persepsi subjek niscaya akan berbeda-beda. Sehingga klaim kebenaran pun terjadi sesuai dengan kapasitas subjek menilai realitas. Jadi, sudah jelas bahwa masalah utama dalam penelitian ini adalah berangkat dari kesalahpahaman (masalah persepsi) sehingga melahirkan klaim kebenaran.

Tentunya persoalan kebenaran tersebut ialah permasalahan ontologis yang berakar dari eksistensi. Akar semua masalah ini yaitu seperti yang dipahami terkait eksistensi (*wujūd*) dalam pandangan filsafat Islam sebagai basis filsafatnya yang bermuara pada wujud. Jadi, masalah penelitian skripsi ini jelas adalah penelitian berkenaan dengan masalah ontologi. Akan tetapi, pembahasan ini akan dijelaskan lebih jauh ke depannya.

Sementara itu, dalam pengakuan konstitusi bahwa Indonesia memiliki konsep masyarakat yang sangat majemuk (bhinneka).

¹⁰ M.T. Mishbah Yazdi, *Buku Daras Filsafat Islam*, Penerj. Musa Kazhim dan Saleh Baqir, (Jakarta : Shadra Press, 2010), hal. 180

¹¹ Zakiyuddin Baidhawiy, *Pendidikan Agama Berwawasan Multikultural*, (Jakarta : Erlangga, 2005), hal. 50

Pancasila sebagai ideologi negaranya, juga memiliki semboyan yaitu *Bhinneka Tunggal Ika* mempunyai makna “meskipun berbeda-beda namun tetap satu”. Tetapi faktanya, kenapa begitu banyak konflik horizontal dalam konteks Agama, budaya, suku, ras, ekonomi dan politik. Bukankah ideologi negara Indonesia (Pancasila) sudah memobilisasi itu? Meskipun telah diatur dalam konstitusi mengenai kebhinnekaan itu sendiri, tapi secara fakta, ketetapan konstitusi kelihatannya belum maksimal untuk memobilisasi keamanan dan kenyamanan bagi bangsa dan negara Indonesia pada umumnya. Ada asumsi yang mengatakan bahwa masih banyak orang yang belum memahami makna kebhinnekaan itu, sehingga perlu didudukkan guna untuk mengetahui hakikat makna kebhinnekaan itu seperti apa.

Fakta ini didukung oleh pimpinan tim kerja sosialisasi MPR RI yang dijabarkan di dalam Buku Panduan Pemasarakatan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia memaparkan bahwa:

Pancasila sebagai ideologi negara harus dipahami bersama secara terbuka, mengembangkan wacana juga dialog di tengah-tengah masyarakat. Sehingga, bangsa Indonesia mampu menjawab tantangannya sebagai warga negara saat ini, dan saat yang akan datang. Tapi pada kenyataannya bahwa pemahaman akan warisan leluhur belum dipahami oleh semua generasi bangsa. Generasi muda khususnya selaku penerus bangsa, harusnya sadar serta memahami Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sangat butuh pemahaman lebih dalam.¹² *Bhinneka Tunggal Ika* adalah kalimat terdapat di lambang negara Indonesia yaitu Pancasila yang bermakna berbagai keragaman budaya, etnis, suku, ras, adat istiadat, agama dan bahasa daerah mewujudkan menjadi satu tanah air, satu bangsa, dan satu bahasa Indonesia¹³.

¹² Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, *Panduan Pemasarakatan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia*, (Jakarta : Sekertaris Jenderal MPR RI, 2014), Sambutan Tim Kerja Sosialisasi MPR RI.

¹³ Ginari Lestari, *Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, Program Ketahanan, Nasional Universitas Gajah Mada Th.28, Nomor.1, Pebruari 2015, hlm.35.

Terkait penjabaran tersebut, Sumarsono juga menegaskan bahwasanya:

Pancasila telah diakui sebagai ideologi, dan dasar negara yang telah dirumuskan di dalam pembukaan UUD 1945. Pada hakikatnya nilai Pancasila mencerminkan keseimbangan, keserasian, kekeluargaan, persatuan dan kesatuan serta kearifan dalam membina kehidupan nasional. Dalam perpaduan nilai-nilai tersebut mampu mewartakan kebhinekaan seluruh aspirasi bangsa Indonesia. Pancasila merupakan bentuk spirit, motivasi bagi perjuangan bangsa Indonesia dalam tekadnya membangun serta menata kehidupan di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia secara berdaulat, dan mandiri. Pancasila sebagai dasar negara mempunyai hukum mengikat para pelaku negara, para pemerintahan negara juga seluruh rakyat Indonesia. UUD 1945 merupakan konstitusi yang dijadikan pedoman pokok dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Bangsa Indonesia sepakat bahwa Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik dan bekedaulatan rakyat yang dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Maka dari itu negara mengatasi segala kelompok, paham, golongan, serta menghendaki persatuan dan kesatuan dalam segenap aspek kehidupan nasional. Artinya bahwa dalam kehidupan ini berdasarkan aturan hukum, dan perundang-undangan yang berlaku dan memperhatikan Hak Asasi Manusia (HAM)¹⁴.

Penjelasan Sumarsono tersebut, ternyata juga ditegaskan dalam Buku Panduan Pemasaryakatan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia terkait awal berdirinya NKRI bahwa:

Sejak awal berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia, kebhinnekaan merupakan kekayaan Negara Indonesia yang harus diakui, diterima, dan dihormati. Kemajemukan, sebagai anugerah juga harus dipertahankan, dipelihara, dan dikembangkan yang kemudian diwujudkan dalam semboyan *Bhinneka Tunggal Ika*.

¹⁴ S. Sumarsono, *Pendidikan Kewarganegaraan*, (Jakarta: Gramedia, 2006), hal. 83-85

Keberagaman tersebut telah diakomodasi dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945¹⁵.

Oleh sebab itu, sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa kemajemukan sebagai anugerah juga harus dipertahankan, dipelihara, dan dikembangkan seperti yang diwujudkan dalam semboyan *Bhinneka Tunggal Ika*. Dalam sebagian literatur disebutkan bahwa bunyi kalimat lengkap *Bhinneka Tunggal Ika* itu ditemukan dalam buku atau kitab Sutasoma yang ditulis oleh Mpu Tantular pada abad XIV tepat pada masa kerajaan Majapahit. Sebelum ditetapkan kalimat yang kokoh, sebenarnya kalimatnya lebih panjang yaitu:

“Rwaneka dhatu winuwus Buddha Wisma, *Bhinneki rakwa ring apun kena parwanosen Mangka ng Jinatwa Kalawan Siwatatwa tunggal, Bhinneka Tunggal Ika tan hana dharma mangrwa*. Artinya bahwa agama Buddha dan Siwa (Hindu) merupakan zat yang berbeda tetapi nilai-nilai kebenaran Jina (Buddha) dan Siwa adalah tunggal. Terpecah belah, tetapi satu jua, artinya tak ada dharma yang mendua. Secara harfiah ungkapan tersebut mengandung arti Bhinneka (beragam) Tunggal (satu), Ika (itu) yang mempunyai arti beragam satu itu¹⁶.

Pastinya, sebagai simbol negara, *Bhinneka Tunggal Ika* memiliki kekuatan yang sangat besar untuk menyatukan keberagaman, dan itulah wujud yang seharusnya dipahami oleh bangsa Indonesia. Namun hal ini juga harus mendapat dukungan penuh dari kesadaran bangsa Indonesia. Maka, dibagian pertama modul Wasantara Lemhannas RI 2007 (Sujanto 2009:1) disebutkan bahwa:

Bhinneka Tunggal Ika adalah semboyan Indonesia yang ditetapkan berdasarkan PP No.66 Tahun 1951 yang mendudukan arti meskipun berbeda, beragam tetap satu. Sujanto memandang

¹⁵Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, *Panduan Pemasyarakatan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia*, (Jakarta : Sekretaris Jenderal MPR RI, 2014), Sambutan Tim Kerja Sosialisasi MPR RI.

¹⁶ Tim Visi Adiwidya, *Panduan Lulus Seleksi CPNS Tenaga Pendidikan Sistem Cat (Computer Assisted Test)*, (Jakarta: Visi Media, 2015), hal. 60

bahwa Indonesia adalah perwujudan keinginan bersama untuk mewujudkan keragaman menjadi satu kesatuan yang disepakati yaitu Indonesia. Sumber dari kata *Bhinneka Tunggal Ika* sebagai kalimat yang penuh kearifan yang diambil dari kitab Sutasoma, ditulis oleh Empu Tantular bertepatan pada abad ke empat belas¹⁷.

Berdasarkan uraian makna semboyan ideologi negara yang terdapat pada lambang Pancasila, seharusnya mampu menjadi solusi untuk memobilisasi kebhinnekaan yang ada di Indonesia, misalkan mengimplementasikan kecenderungan konvergensi (keadaan menuju satu titik pertemuan)¹⁸ nasional yang harusnya diarahkan pada sebuah pandangan hidup yang kosmopolit. Artinya bahwa suatu wawasan meliputi seluruh anggota bangsa. Sebab, kebangsaan Indonesia disusun atas berbagai kelompok etnik, budaya, dan agama. Jika budaya Indonesia disebut sebagai rangkuman budaya yang terdapat di daerah, maka konsekuensinya nilai keindonesiaan harus bersemangat kosmopolitisme¹⁹, dan bukan navitisme yang berakhir pada lingkup daerahisme, dan sukuisme. Ketika nativisme yang dikedepankan, maka konsekuensinya, itu bisa menjadi penghalang besar pada pertumbuhan keindonesiaan. Untuk Indonesia pada tingkat sekarang, yang seharusnya bangsa Indonesia mampu menerima suatu keberagaman, secara implementasi saat ini masih belum terwujud serta diterima secara kukuh²⁰, dan itulah problem yang dapat diberikan solusi dalam penelitian ini.

Juga dikatakan bahwa Pancasila sebagai ideologi terbuka. Artinya, Pancasila tidak mungkin dibuat penjabarannya hanya sekali untuk selamanya. Artinya bahwa pelaksanaan nilai-nilainya sentiasa

¹⁷ Lestari dkk, *Bhinneka Tunggal Ika : Khazanah Multikultural Indonesia di Tengah Kehidupan Sara*, Th.28, Nomor.1, Pebruari 2015, hal.35

¹⁸ Konvergensi dalam pengertian KBBI adalah keadaan menuju satu titik pertemuan; memusat. Artinya, beragam perbedaan yang ada diarahkan pada satu kesamaan cita-cita hidup bersama dalam membentuk dan membangun sebuah tatanan kehidupan ke arah yang lebih baik.

¹⁹ Kosmopolitisme dalam pengertian KBBI adalah suatu paham atau gerakan yang berpandangan bahwa seseorang tidak perlu mempunyai kewarganegaraan, tetapi menjadi warganegara dunia; paham internasional.

²⁰ Nurcholish Madjid, *Islam Kemoderenan dan Keindonesiaan*, (Bandung: Mizan, 1998), hal. 40-41

berproses, terus menerus membuat kemajuan (dinamis). Dan proses itu niscaya akan membuahkan hasil, ketika Pancasila dijiwai sebagai semangat keterbukaan. Jelas bahwa Pancasila mempunyai dimensi universal. Ketika universal, maka Pancasila tidak bisa diwujudkan serta diimplementasikan dengan semangat nativisme. Pancasila sebagai konvergensi nasional telah mencerminkan eksistensinya sebagai penopang republik. Maka dari itu eksistensi Pancasila dalam pemahaman bangsa yang masih belum memiliki pemahaman yang cukup (dangkal) dan mantap, secara implikasi masih sangat rawan terhadap berbagai manipulasi. Misalnya Pancasila sebagai objek manipulasi yaitu sebagai alat politik, untuk kepentingan sesaat. Sedangkan, harapan bangsa Indonesia adalah Pancasila mampu berfungsi penuh sebagai sumber pemicu masa depan bangsa²¹ ke arah yang lebih baik dari hanya membuat dikotomi yang cenderung berimplikasi pada tindakan kekerasan semata.

Telah dijelaskan sebelumnya bahwa bangsa Indonesia mampu menerima kenyataan akan keberagaman (kebhinnekaan). Tetapi faktanya masih jauh dari anggapan demikian, meskipun hal itu telah diatur dalam kesepakatan konstitusi yakni “berbeda-beda namun tetap satu”, tetapi kesatuan itu masih sangat sulit untuk dipahami dan diterima oleh bangsa Indonesia. Masalahnya kebhinnekaan yang diatur dalam konstitusi tidak dapat menyelesaikan masalah yang sudah dibangun. Bahkan negara-negara yang dibangun dalam asas kebhinnekaan cenderung terjadi konflik di dalamnya. Maka dari itu perlu kiranya mengkaji lebih dalam lagi mengenai apa itu kebhinnekaan. Penelitian mberusaha untuk menjawab dan mencari solusi berdasarkan perspektif baru tentang makna kebhinnekaan agar bisa diterapkan dan,tidak hanya terbatas dalam lingkup kesepakatan, tetapi harus mencari basis eksistensinya.

Oleh sebab itu, penelitian ini hendak berbicara mengenai kebhinnekaan dalam perspektif filsafat Islam, tak terkecuali dalam

²¹ Nurcholish Madjid, *Islam Kemoderenan dan Keindonesiaan*, (Bandung: Mizan, 1998), hal. 44-45

kerangka teori wujud. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa Pancasila telah diakui sebagai ideologi dan dasar negara yang telah dirumuskan di dalam pembukaan UUD 1945. Pada hakikatnya nilai Pancasila mencerminkan keseimbangan, keserasian, kekeluargaan, persatuan dan kesatuan serta kearifan dalam membina kehidupan nasional. Tapi, melihat keberadaan Pancasila yang memiliki semboyan *Bhinneka Tunggal Ika* selama ini dipahami sebagai etika politik dalam konteks negara, agama, sosial politik. Sementara konflik terjadi di Indonesia setiap tahunnya meningkat berdasarkan data yang telah dijelaskan sebelumnya. Artinya bahwa *Bhinneka Tunggal Ika* selama ini belum cukup memberikan solusi, bahkan tidak menyelesaikan masalah konflik yang ada di Indonesia. Mengapa dikatakan bahwa kurang memberi solusi dan tidak menyelesaikan masalah konflik, kalau hanya bersifat politik semata, dan lebih mengarah pada kepentingan individu/kelompok tertentu semata. Artinya ketika politik itu tidak merasa diuntungkan maka seketika itu juga akan terjadi konflik.

Adapun solusi yang dapat ditawarkan dalam penelitian ini yaitu sebagai upaya untuk memaknai kebhinnekaan yang bukan karena kesepakatan seperti yang dijelaskan dalam konsensus nasional yaitu Pancasila, NKRI, UUD 1945 dan *Bhinneka Tunggal Ika*²², melainkan mengkonfirmasi bahwa keberagaman merupakan sebuah keniscayaan yang semestinya dapat dipahami oleh siapapun, sehingga dapat terwujud sebuah kehidupan yang harmonis.

Pembahasan skripsi ini terfokus pada topik kebhinnekaan (keberagaman) yang mana masih menjadi pembahasan serius yang diperbincangkan dalam eksistensi negara yaitu Indonesia. Maka, peneliti melihat serta mencermati fenomena masyarakat Indonesia saat ini bahwa terdapat ketidaksesuaian antara prinsip berbangsa dan bernegara secara konsep dan fakta realitas kehidupan. Oleh karena itu sangat penting untuk dikaji secara serius mengenai eksistensi kebhinnekaan ini, apalagi dalam konteks keindonesiaan. Sebab,

²² A. Ubaedillah, *Pendidikan Kewarganegaraan (Civic Education) Pancasila, Demokrasi, dan Pencegahan Korupsi* (Jakarta: PT. Fajar Interpratama Mandiri, 2017), hal. 54

secara prinsip sudah dituangkan dalam konsep semboyan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Secara implementasi semboyan itu, masih sangat terlihat kaku dalam pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara, sehingga kita seharusnya mencari basis eksistensinya.

Sebelumnya sudah dijelaskan bahwa makna dari *Bhinneka Tunggal Ika* mempunyai arti kata *Bhinneka* (beragam), *Tunggal* (satu), *Ika* (itu) yang berarti beragam satu itu. Sebagaimana yang dikatakan oleh Mulla Shadra bahwa wujud itu satu sekaligus beragam. Sebagaimana diketahui bahwa Mulla Sadra membangun filsafatnya dengan prinsip fundamental wujud (*ashālah al-wujūd*). Dasar pandangan ini berpendapat bahwa wujud merupakan dasar di alam eksternal, sebab selain wujud berarti ada dua kemungkinan yaitu ketiadaan dan kuiditas. Keduanya tidak mungkin menjadi dasar keberadaan di alam eksternal sebab ketiadaan sudah niscaya tiada. Sedangkan kuiditas hanya mengaksiden atau menempel pada wujud.²³ artinya bahwa wujudlah yang mendasar. Dalam pandangan Mulla Sadra bahwa meskipun pemahaman wujud diabstraksikan dalam pemahaman mental, tapi secara langsung juga berkaitan dengan realitas objektif (inderawi) tanpa melalui perantara.²⁴ Dalam prinsip fundamental wujud, maka hanya wujudlah yang mendasar. Konsekuensinya ketika adanya kesamaan dan perbedaan, berarti akan kembali pada hakikat wujud. Sebab, tidak ada sesuatu yang lain, selain wujud²⁵ itu sendiri.

Sebagaimana yang telah dijelaskan juga bahwa *Bhinneka Tunggal Ika* mempunyai arti “beragam tunggal itu”. Ketika dicermati, ada kesamaan semboyan Pancasila ini dengan pandangan pandangan filsuf Muslim terkait wujud yang memiliki kesatuan, tetapi juga memiliki keberagaman yang mana bahwa adanya kesamaan dan perbedaan akan bermuara pada satu hakikat yaitu

²³ Muhammad Nur, *Wahdah Al-Wujud Ibn Arabi dan Filsafat Wujud Mulla Shadra*, (Makassar : Chamran Press, 2012), hal. 25-26

²⁴ Muhammad Nur, *Wahdah Al-Wujud Ibn Arabi dan Filsafat Wujud Mulla Shadra*, hal. 26

²⁵ Muhammad Nur, *Wahdah Al-Wujud Ibn Arabi dan Filsafat Wujud Mulla Shadra*, hal. 27

wujud. Maka dari itu *Bhinneka Tunggal Ika* dijadikan objek kajian berdasarkan teori wujud Mulla Shadra, guna meletakkan makna *Bhinneka Tunggal Ika* yang biarpun berbeda-beda namun tetap satu dalam pendekatan baru.

Sementara itu, alasan penulis memilih mengaitkan antara kebhinekaan dan wujud dalam pandangan filsafat Islam, karena salah satu prinsip filsafatnya yaitu "*Tasykik Al-Wujūd*" (Gradasi Wujud) yang sangat relevan dengan penjabaran semboyan Pancasila sebagai ideologi negara Indonesia yaitu meskipun berbeda, beragam tetap satu. Sesuai dengan prinsip filsafat Islam di atas bahwa gradasi wujud merupakan gambaran wujud yang tunggal namun bergradasi. Para penganut *ashālah al-wujūd* berpendangan bahwa wujud itu merupakan hakikat tunggal yang bergradasi.²⁶ Mulla Shadra adalah salah satu filsuf Islam berdasarkan teori wujudnya yang telah memberikan perhatian khusus mengenai masalah keberagaman tersebut yang erat kaitannya dengan kebhinnekaan Indonesia, meskipun kebhinnekaan dalam konteks "*Tasykik Al-Wujūd*" tidak dibahas secara langsung. Akan tetapi, walaupun demikian, peneliti berusaha untuk menelaah lebih jauh dan ingin mengkonfirmasi bahwa kebhinnekaan melalui teori "*Tasykik Al-Wujūd*" merupakan sebuah keniscayaan. Berdasarkan pada penjabran tersebut, maka peneliti memfokuskan penelitian dengan tema "***Kebhinekaan Berdasarkan Teori Tayskīk Al-Wujud***".

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan pada gambaran latar belakang masalah sebelumnya, jelas bahwa, substansi permasalahan yang dikemukakan dalam penelitian ini adalah persoalan persepsi terkait adanya keniscayaan adanya keberagaman, tak terkecual yang erat kaitannya dengan semboyan negara Kesatuan Republik Indonesia yaitu *Bhinneka Tunggal Ika*, yang seringkali menimbulkan kesalahpahaman sehingga kemudian menimbulkan konflik atas berbagai klaim

²⁶Sayyid Muhammad Husein Thabathabai, *Bidayah al-Hikmah*, (Qum: Muasasah al-Ma'arif al-Islamiyah, 1418 H), hal. 17.

kebenaran. Maka dari itu, berikut ini terdapat beberapa identifikasi permasalahan yang dapat dipahami, antara lain:

1. Kurangnya pemahaman yang mendalam perihal keniscayaan adanya keberagaman.
2. Kecenderungan untuk menyalahkan pemahaman orang lain, yang dapat memicu terjadinya konflik horizontal dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dalam konteks keindonesiaan.
3. Adanya keinginan untuk hanya sekedar mementingkan keinginan individu/kelompok tertentu semata.
4. Sikap kaum keagamaan yang cukup leluasa dalam menyalahkan sekaligus terlibat dalam konflik-konflik agama, sedangkan nilai-nilai dalam ajaran agama tidaklah berlandaskan pada kekerasan.
5. Kepentingan politis yang seringkali digunakan oleh kalangan mayoritas untuk menekan bahkan mengkriminalisasi kaum minoritas yang secara amanat konstitusi, hal tersebut dijaga dan diharga dalam tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia.

Dengan lingkungan yang beragam seperti di Indonesia sudah sering terjadi konflik dari aspek agama, ekonomi dan politik. Seorang agamawan merasa dirinya paling benar atas agamawan yang lainnya. Seseorang yang mengalami ketimpangan ekonomi bertindak kriminal, juga seseorang yang mapan di dibidang ekonomi pun melakukan tindakan yang sama, dan seseorang merasa bahwa, dirinyalah yang paling layak untuk memimpin dan berkuasa. Ketiga masalah ini jelas bahwa, pada intinya semuanya menganggap apa yang mereka pahami itu benar (klaim kebenaran). Dan klaim kebenaran itu pada dasarnya merupakan bagian dari persoalan epistemologis. Namun, klaim kebenaran semuanya itu akan bermuara atau berimplikasi pada satu masalah yang sangat fundamental yaitu persoalan kesadaran eksistensi yang mana disebut bagian dari ontologis. Karena semakin orang menemukan kebenaran, maka pada saat yang sama dia akan semakin menyadari

eksistensinya, sehingga keduanya akan saling berkelit berkelindan. Ini merupakan konsekuensi logis yang mesti kita terima.

C. Batasan dan Rumusan Masalah

Melihat adanya berbagai permasalahan yang telah disebutkan dalam identifikasi masalah, maka penelitian kali ini akan berfokus pada beberapa hal, sehingga hal ini dapat dipahami lebih jauh lagi, sebagai berikut:

1. Batasan Masalah

Untuk mempermudah pembahasan dalam penelitian ini, perlu adanya batasan masalah. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka peneliti berusaha untuk membatasi pada ranah pokok yang berikaitan dengan *Bhineka Tunggal Ika* yang ditinjau berdasarkan pada “teori *tasykīk al-wujūd*” (Gradasi Wujud).

Tentu saja, hal ini tak lain karena ada banyak teori yang berusaha untuk memperjelas adanya eksistensi negara dalam mengakomodir berbagai keberagaman, akan tetapi dalam penelitian kali berusaha untuk berpusat pada teori *tasykīk al-wujūd*.

2. Rumusan Masalah

Sesuai dengan ulasan batasan masalah tersebut, maka dari maka dapat dirumuskan dalam sebuah rumusan masalah yaitu **“Apakah permasalahan kebhinekaan dalam semboyan *Bhineka Tunggal Ika* dapat direspon berdasarkan teori *tasykīk al-wujūd*?”** Dan untuk mengetahuinya lebih jauh, selanjutnya akan dijelaskan dalam pembahasan berikutnya.

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian adalah dapat dipahami sebagai berikut, antara lain:

1. Penelitian ini secara umum bertujuan untuk menjelaskan konsep kebhinnekaan berdasarkan teori *tasykīk al-wujūd*.

2. Penelitian ini juga bertujuan untuk melihat apakah teori *tasykīk al-wujūd* dapat merespon berbagai permasalahan yang berkaitan dengan *Bhinneka Tunggal Ika*

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian selengkapnyanya terdapat beberapa hal-hal pokok yang mendasar, antara lain:

1. Bagi penulis, semoga dapat mengetahui serta memenuhi persyaratan sebagai Sarjana S1 Filsafat Islam Sekolah Tinggi Filsafat Islam (STFI) Shadra Jakarta.
2. Penulis berharap penelitian ini bisa memberi pemahaman tentang arti semboyan Pancasila yaitu Bhinneka Tunggal Ika, serta letak persoalan mendasarnya.
3. Semoga hasil penelitian ini menjadi tulisan yang hadir dalam berbagai corak pemikiran dan bisa memberikan solusi atas masalah yang belum terselesaikan dalam fokus penelitian ini.
4. Semoga hasil penelitian ini memberikan semangat bagi para peneliti untuk senantiasa membuka kemungkinan-kemungkinan baru untuk diteliti.
5. Semoga hasil penelitian ini bisa membantu serta memberikan manfaat bagi masyarakat ilmiah, dan umum.
6. Semoga hasil penelitian ini bisa menjadi solusi bagi masyarakat dalam menilai kebhinnekaan.
7. Semoga hasil penelitian ini, bisa bermanfaat bagi tatanan bangsa dan negara guna memahami serta menyadari perbedaan, sehingga terciptalah suatu keharmonisan.

F. Kajian Pustaka

Berdasarkan penelusuran peneliti, terdapat beberapa karya ilmiah yang mengangkat tema pembahasan Bhinneka Tunggal Ika. Karya-karya tersebut diantaranya:

1. Gina Lestari dengan Jurnal berjudul *Bhinneka Tunggal Ika: Khazanah Multikultural Indonesia di Tengah Kehidupan Sara*. Jurnal ini merupakan program studi ketahanan nasional Universitas Gadjah Mada (UGM) yang terbit pada 2015 ini

berusaha menelaah kembali secara komprehensif yang berkaitan dengan ciri kebhinnekaan Indonesia.

Dari judul Jurnal karya ilmiah pertama ini, sedikit sama dengan persoalan yang penulis angkat, sebab menjadikan kebhinnekaan sebagai sentral pembahasan. Kalau Jurnal sebelumnya berusaha menelaah kembali secara komprehensif. Sedangkan titik tekan penulis hanya fokus kepada persoalan kebhinnekaan dalam perspektif Mulla Shadra. Sehingga tema yang penulis angkat sangat spesifik dari pembahasan Jurnal sebelumnya.

2. Evi Yunita Sari dengan judul Skripsi *Pengaruh Pemahaman Konsep Bhinneka Tunggal Ika Terhadap Hubungan Sosial Siswa Berbeda Suku di SMP Negeri 21 Bandar Lampung Tahun 2015/2016*. Skripsi yang diajukan di Universitas Lampung, Bandar Lampung pada tahun 2016 ini membahas bagaimanakah pengaruh pemahaman konsep Bhinneka Tunggal Ika terhadap hubungan sosial siswa berbeda suku di SMP Negeri 21 Bandar Lampung. Dan berdasarkan hasil penelitian ini bahwa, terdapat pengaruh kuat yang signifikan antara pemahaman konsep Bhinneka Tunggal Ika terhadap hubungan sosial yang berbeda suku. Artinya bahwa semakin siswa memahami konsep kebhinnekaan itu maka semakin baik pula hubungan sosialnya, sehingga terjalin hubungan sosial rukun dan harmonis.

Pada karya kedua ini yaitu Skripsi yang membahas masalah kebhinnekaan, yaitu lebih kepada untuk menjelaskan bagaimana pengaruh pemahaman konsep Bhinneka Tunggal Ika terhadap hubungan sosial berbeda suku. Meski sama-sama menjelaskan tentang kebhinnekaan, tapi penulis tidak meneliti secara langsung di lapangan seperti di sekolah. Melainkan fokus peneliti ingin mendudukkan serta memberikan pemahaman secara substantif hakikat dari

kebhinnekaan itu dalam perspektif salah satu tokoh filsuf muslim yaitu Mulla Shadra jenis penelitian pustaka.

3. Skripsi yang diajukan pada tahun 2017 oleh Oktaria Andani dengan judul *Implementasi Nilai-nilai Bhinneka Tunggal Ika Pada Pemuda di Masyarakat (Studi Kasus di Kelurahan Sudiroprajan Kecamatan Jebres Kota Surakarta)*. Subjek penelitian yang diteliti dalam karya ini yaitu mendeskripsikan implementasi nilai-nilai Bhinneka Tunggal Ika pada Masyarakat. Sedangkan fokus penelitian yang akan diteliti oleh peneliti adalah perlu mendudukkan serta memberikan pemahaman secara substansi tentang kebhinnekaan itu. Sehingga memiliki perbedaan yang sangat jelas antara karya Skripsi Oktaria Andani dan penelitian yang sedang digarap ini.
4. Karya buku dengan judul *Wahdah Al-Wujud Ibn Arabi dan Filsafat Wujud Mulla Shadra* oleh Muhammad Nur. Karya ini mencoba menjelaskan beberapa konsep wahdah al-wujud dalam pandangan Mulla Shadra; menjelaskan beberapa instrument yang digunakan oleh Mulla Shadra dalam mengargumentasikan konsep *wahdah al-wujud*; menjelaskan letak perbedaan penafsiran dalam memahami argumentasi Mulla Shadra mengenai wahdah al-wujud oleh para pengikut Shadra.
5. Benny Susilo dengan Jurnal yang berjudul *Teori Gradasi: Komparasi antara Ibn Sina, Suhrawardi, dan Mulla Shadra*. Metode yang dipakai dalam penelitian ini yaitu metode deskriptif- analitis dan pendekatan komparatif. Ulasan artikel ini menjelaskan pertemuan dan perbedaan antara ketiga pemikir tersebut seputar gradasi.

Sementara itu, adapun persamaan penelitian sebelumnya dengan penelitian ini adalah, sama-sama berbicara tentang gradasi wujud.

Tapi, penelitian ini lebih fokus memakai teori gradasi wujud Mulla Shadra untuk mendudukkan serta memberikan pemahaman secara substansi tentang kebhinnekaan itu.

G. Metodologi Penelitian

Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif-analitis yang didasarkan pada pembuktian argumentatif (*burhān*). Maka dari itu penelitian ini merujuk pada tulisan-tulisan dan karya-karya yang berkenaan dengan Bhinneka Tunggal Ika, juga tulisan yang berkenaan dengan teori *tasykīk al-wujūd* dalam diskursus filsafat Islam.

Sementara itu, langkah pertama peneliti ini mengumpulkan data berupa buku, jurnal, dan muatan berita kasus. Dan data tersebut dipisahkan dalam dua jenis yaitu primer dan sekunder. Data primer adalah karya-karyanya Mulla Shadra dan buku Panduan Pemasarakatan karya Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR-RI) yang mempunyai hubungan dalam penelitian ini. Gunanya apa ? gunanya untuk memahami prinsip-prinsip pemikiran Mulla Shadra dan memahami kedudukan Bhinneka Tunggal Ika sebagai seboyan dari Pancasila. Sedangkan data sekunder yaitu berupa buku jurnal, dan muatan berita yang sesuai dengan objek penelitian.

H. Sistematika Penelitian

Adapun sistematika dalam penelitian adalah sebagai berikut, antara lain:

BAB I, dalam bagian bab ini, peneliti menguraikan terlebih dahulu yang apa melatar belakangi penelitian ini, selanjutnya menguraikan identifikasi masalah, serta masalah yang sudah ditetapkan dalam penelitian ini atau batasan masalah. setelah itu, peneliti membuat pertanyaan-pertanyaan berangkat dari masalah penelitian ini, dan juga diberikan jawaban dalam penelitian ini, atau disebut dengan rumusan masalah. Setelah itu, peneliti uraikan tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penelitian.

BAB II, dalam bagian bab ini, peneliti akan menjelaskan diskursus tentang kebhinnekaan yang meliputi pengertian kebhinnekaan, sejarah Bhinneka Tunggal Ika dan pandangan para tokoh terkait dengan kebhinnekaan berdasarkan gambaran umum tentang kebhinnekaan yakni kebhinnekaan dari aspek agama, kebhinnekaan dari aspek sosial dan kebhinnekaan dari aspek politik.

BAB III peneliti akan menguraikan diskursus tentang eksistensi yang meliputi pembahasan kaiditas (*mahiyah*), wujud, fundamentalitas wujud, serta *tasykīk al-wujūd*.

BAB IV dalam bagian keempat ini, peneliti menelaah lebih jauh tentang keterkaitan antara *tasykīk al-wujūd* dan bhineka tunggal ika yang meliputi eksistensi kebhinnekaan dalam *tasykīk al-wujūd*, keniscayaan keberagaman, serta kesatuan dan keberagaman dalam bhineka tunggal ika.

BAB V merupakan pembahasan penutup yang meliputi kesimpulan hasil dari beberapa rangkuman-rangkuman singkat serta temuan-temuan, beberapa pertanyaan-pertanyaan dalam penelitian ini. Sementara itu juga, dalam pembahasan ini akan diuraikan beberapa saran agar dapat memperkaya bagi para peneliti selanjutnya.

BAB II

DISKURSUS TENTANG KEBHINEKAAN

Berbicara mengenai kebhinekaan, tampaknya cukup banyak diketahui oleh kebanyakan orang. Bahkan, pengetahuan tentang kebhinekaan ini banyak sekali dibicarakan dalam beberapa tempat seperti sekolah, kampus, lembaga pemerintah, dan lain sebagainya. Namun, lebih dari itu, apakah seyogyanya makna dari kebhinekaan ini dapat dipahami secara baik dan bijak oleh semuanya? Setidaknya tidaklah demikian. Hal ini tak lain masih cukup banyak orang-orang yang cenderung menghakimi dan melakukan tindakan konflik dengan orang lain. Padahal, menerima adanya keragaman bukanlah sebuah kebetulan, melainkan adalah sebuah keniscayaan sejak manusia diciptakan.

Oleh sebab itu, perlu bagi kita untuk menelaah kebhinekaan secara mendalam, yang tentu saja hal ini akan dikuatkan dengan berbagai pandangan yang ada. Dan berikut ini adalah penjelasan selengkapnya, antara lain:

A. Pengertian Kebhinekaan

Istilah “kebhinekaan” sangat akrab di lingkungan masyarakat Indonesia. Kata kebhinekaan atau keberagaman menjadi karakter secara nyata dalam kehidupan masyarakat Indonesia sepanjang sejarah. Ideologi negara Indonesia memiliki semboyan “*Bhinneka Tunggal Ika*”, yakni berbeda-beda, namun tetap satu. Dan untuk mengetahui maknanya secara lebih jauh, perhatikan penjelasannya berikut ini, antara lain:

1. Secara Etimologi

Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (KBBI) kebhineakaan berasal dari kata bhineka yang berarti beragam atau beraneka ragam, sedangkan jika ditambahkan imbuhan ‘ke’ dan ‘an’ menjadi ‘kebhinekaan’ bermakna keberagaman¹.

¹ Tim Pusat Bahasa, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), hal. 193

Pengertian ini tentu saja merujuk pada penggunaan istilah bhineka yang secara harfiah mempunyai makna demikian yang sesuai dengan penggunaan istilah pada zaman dahulu.

Sementara itu, dalam kamus Oxford (*oxford dictionary*) kata Bhineka diartikan sebagai *diversity* dengan kata dasar *diverse*. Adapun *diverse* termasuk kata sifat yang berarti “*different kinds*”, macam-macam atau jenis-jenis perbedaan (berbagai macam perbedaan). Sedangkan *diversity* adalah kata benda (*noun*) yang berarti ‘*range atau variety*’ dan diterjemahkan menjadi barisan, jajaran, atau variasi². Dalam pengertian ini, bhineka tergolong dalam pemahaman yang bersifat menyeragamkan berbagai unsur-unsur perbedaan yang ada.

Maka dari itu, berdasarkan pengertian tersebut dapat kita pahami bahwa:

Kebhinekaan secara nyata terdapat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara masyarakat Indonesia dari masa ke masa. Dalam sejarah kebangsaan karakter utama ini diteguhkan melalui semboyan Ideologi negara Indonesia “*Bhineka Tunggal Ika*” berbeda-beda namun tetap satu. Beragam atau bhineka berarti tidak tunggal, seragam, monoton. Ketika kita menghubungkan dalam kehidupan masyarakat, berarti ada banyak etnis, suku, ras, dan budaya. Selain itu juga banyak agama, kepercayaan yang berdampingan melakukan interaksi satu dengan yang lainnya sehingga menjadi tatanan khas bagi masyarakat seperti di Indonesia³.

Demikianlah pengertian tentang kebhinekaan, dan tentu saja pengertian lainnya dapat dilihat dalam penjelasan berikutnya berdasarkan uraian para ahli yang mengkaji terkait kebhinekaan sebagai semboyan dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

² Victoria Bull (editor), *The Oxford Dictionary*, (London: Oxford University press, 2011), hal. 130

³ Zaim Uchrowi, *Karakter Pancasila Membangun Pribadi dan Bangsa Bermartabat*, (Jakarta Timur: PT. Balai Pustaka, 2012), hal. 91

2. Pengertian Menurut Para Ahli

Dalam penjelasan Mahfud MD ketika mengemukakan kebhinekaan menurut Gus Dur adalah rumah yang terdiri dari kamar-kamar. Penghuni itu bebas berekspresi, mau berpakaian merah, kuning, hijau, bahkan tidak berpakaian sama sekalipun tidak masalah⁴, selama mampu hidup berdampingan satu sama lainnya dan menciptakan sebuah kehidupan yang harmonis di tengah kehidupan masyarakat yang plural.

Sementara itu, menurut Eck yang memimpin *Pluralism Project* ini pluralisme berbeda dengan *plurality* atau *diversity* (keberagaman). Dalam penjelasannya, Eck mengemukakan bahwa:

Diversity, kata Eck adalah pluralitas yang alami, *basic, simple, colorful, splendid, given* sifatnya. Sementara pluralisme sebuah proses pergumulan yang punya tujuan untuk menciptakan masyarakat bersama (*common society*) yang dibangun atas dasar pluralitas atau ke-bhineka-an itu. Contoh *diversity* (keberagaman) di desa Mopuya, Sulawesi Utara terdapat beberapa rumah ibadah seperti masjid, gereja, kuil yang dibangun disuatu kompleks. Jadi, kata kunci untuk memahami *diversity* yaitu merupakan pemberian atau anugerah yang alami adanya. Sedangkan pluralisme yaitu sebuah prestasi bersama dari berbagai latar belakang agama budaya, ekonomi, politik dan lain sebagainya, dapat berkumpul, berinteraksi menciptakan apa yang disebut masyarakat bersama (*common society*) kata Eck.⁵

Nurcholish Madjid juga mengemukakan bahwa pluralisme adalah keterlibatan aktif dalam keragaman dan perbedaan untuk membangun peradaban bersama.⁶ Jadi, *diversity* (keragaman) adalah suatu keniscayaan yang diberikan secara alamiah yang menjadi dasar pijakan atas orang-orang

⁴ Abdullah, *Gus Dur Ajarkan kebhinekaan Indonesia dengan Cara Sederhana*, NU Online, diakses pada Kamis, 23, Januari 2014 pukul 16:00 WIB

⁵ Djohan Effendi, *Merayakan Kebebasan Beragama Bunga Rampai Menyambut 70 Djohan Effendi*, (Jakarta: Indonesian Confrence On Religion and Peace, 2009), hal. 182

⁶ Ahmad Gaus AF, *Api Islam Nurcholish Madjid*, (Jakarta: PT. Kompas Media Nusantara, 2010), hal. 352

yang aktif merangkai keragaman (pluralisme) itu untuk membangun peradaban. Karena itu, Nurcholis Madjid juga menegaskan bahwa kini bangsa Indonesia sangat *comfortable* dengan gagasan mereka berkenaan dengan hubungan antara agama dan negara, yang didasarkan Pancasila sebagai titik-temu antara seluruh golongan. Demikianlah fakta ini memperlihatkan dan kita yakin bahwa segala sesuatu berada dalam proses menjadi⁷, sehingga perlu adanya kesadaran akan keberagaman di tengah kehidupan berbangsa dan bernegara.

B. Sejarah Bhineka Tunggal Ika

Ketika kita mendengar kalimat *Bhineka Tunggal Ika*, maka yang terbayang dalam benak kita yaitu seboyan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tentunya bahwa kalimat ini tidak muncul begitu saja. Pasti ada fakta historisnya. Sebelum terlalu jauh membahas sejarah *Bhineka Tunggal Ika*, perlu kiranya mengenal terlebih dahulu mengenal istilah bahasa *Bhineka Tunggal Ika* itu sendiri.

Bunyi lengkap *Bhineka Tunggal Ika* itu ditemukan dalam buku atau kitab Sutasoma yang ditulis oleh Mpu Tantular pada abad XIV tepat pada masa kerajaan Majapahit. Sebelum ditetapkan kalimat yang kokoh, sebenarnya kalimatnya lebih panjang dari apa yang telah ditetapkan yaitu:

“Rwaneka dhatu winuwus Buddha Wisma, Bhinneki rakwa ring apen kena parwanosen Mangka ng Jinatwa Kalawan Siwatatwa tunggal, Bhineka Tunggal Ika tan hana dharma mangrwa. Artinya bahwa agama Buddha dan Siwa (Hindu) merupakan zat yang berbeda tetapi nilai-nilai kebenaran Jina (Buddha) dan Siwa adalah tunggal. Terpecah belah, tetapi satu jua, artinya tak ada dharma yang mendua. Secara harfiah ungkapan tersebut mengandung arti Bhineka (beragam) Tunggal (satu), Ika (itu) yang mempunyai arti beragam satu itu⁸.

⁷ Nurcholish Majdid, *Islam Agama Kemanusiaan: Membangun Tradisi dan Visi Baru Islam Indonesia*, (Jakarta: Yayasan Wakaf Paramadina, 1995), hal. 23

⁸ Tim Visi Adiwidya, *Panduan Lulus Seleksi CPNS Tenaga Pendidikan Sistem Cat (Computer Assisted Test)*, (Jakarta: Visi Media, 2015), hal. 60

Tentu saja keberagaman “bhineka” yang diterima oleh Sang Mpu bukanlah keberagaman tanpa sekat, kotak, dan derajat⁹, meskipun bhineka itu, hendaknya tetap satu, walau sesungguhnya tetap satu, namun sulit untuk bersatu¹⁰, akan tetapi seharusnya pula engkau ingat kalimat ini “*Bhineka Tunggal Ika, Tan Hana Dharma Mangrwa* (meskipun rupa luar penyembahan kita berbeda-beda, kebenaran dalam dharma selalulah sama¹¹, sehingga melalui penerimaan semacam ini setidaknya tidak ada dikotomi antara Budha dan Siwa, melainkan menyatu dalam hakikatnya.

Sementara itu, dalam penggunaan istilah *Bhineka Tunggal Ika* sebagai semboyan negara, para *founding father* berusaha untuk menggali kembali nilai-nilai nusantara, sehingga mereka menemukan bhineka sebagai semboyan negara yang tepat. Maka, dalam sejarahnya, dikemukakan bahwa:

Sang pemimpin bangsa menggali kembali Bumi Pertiwi untuk mencari “permata” yang pernah hilang dan ia menemukannya: *Bhineka Tunggal Ika*, lengkap dengan cara untuk menerapkannya dalam keseharian hidup¹². Sehingga, tepat pada sidang BPUPKI bertepatan dua setengah bulan pra proklamasi, *Bhineka Tunggal Ika* ini, mulai diperbincangkan oleh Soekarno, Muh. Yamin dan I Bagus Sugriwa. Bertepatan pada tanggal 11 Februari 1950 lambang Garuda Pancasila dipakai dalam sidang Kabinet Reublik Indonesia Serikat secara resmi, dipimpin oleh Sultan Hamid II. Ditetapkannya *Bhineka Tunggal Ika* sebagai semboyan Negara Kesatuan Republik Indonesia, tidak terlepas dari sumbangsi Muh. Yamin sebagai orang pertama yang mengusung semboyan itu¹³.

⁹ Anand Krishna, *Sandi Sutasoma: Menemukan Kepingan Jiwa Mpu Tantular*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2007), hal. 43

¹⁰ Cok Sawitri, *Sutasoma*, (Jakarta: Kakilangit Kencana, 2009), hal. 397

¹¹ Moch. Indra Purnama, *Sutra Soma: Bahtera Nusantara*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2019), hal. 14

¹² Anand Krishna, *Sandi Sutasoma: Menemukan Kepingan Jiwa Mpu Tantular*, hal. 44

¹³ Tim Visi Adiwidya, *Panduan Lulus Seleksi CPNS Tenaga Pendidikan Sistem Cat (Computer Assisted Test)*, hal. 60

Pada masa kerajaan Maja Pahit, adanya suasana kerukunan hidup beragama di antaranya agama Hindu Siwa, Buddha, dan Brahmana. Agar ketika agama ini tidak menimbulkan pertikaian dan persaingan, maka Rajasanegara membentuk tiga wilayah penyebaran agama, yaitu:

1. Agama Hindu dianjurkan diseluruh wilayah kerajaan, karena ajaran ini merupakan ajaran resmi dianut kerajaan.
2. Agama Budha diberi dibagian wilayah timur kerajaan, yaitu Bali dan Nusa Tenggara.
3. Aliran Brahmana atau agama resi untuk kelompok terbatas.

Dari ketiga pembagian wilayah agama tersebut, dapat kita pahami bahwasanya:

Inilah pola kerukunan hidup beragama di Majapahit yang ditulis oleh Mpu Tantular dalam kitab sutasoma dengan kalimat *Bhineka Tunggal Ika Tan Hana Dharma Mangrwa*. Dalam hal ini bukan hanya agama yang dipersatukan. Tapi, juga dalam kehidupan bernegara sebagaimana cita-cita kertanegara ingin mempersatukan Nusantara dan Asia Tenggara untuk menghadapi agresi Cina 1290. Pada akhirnya Mahapati dan Gajah Mada mengucapkan sumpa Palapa pada tahun 1331, sehingga melahirkan kesatuan politik yang meliputi seluruh Nusantara di bawah otoritas Majapahit. Inilah makna *Bhineka Tunggal Ika* pada zaman Majapahit sebagai landasan kemanunggalan konsep keagamaan dan konsep politik terpadu¹⁴. Ditetapkannya *Bhineka Tunggal Ika* sebagai semboyan Pancasila sebagai ideologi negara diatur berdasarkan PP No.66 Tahun 1951 yang mendudukan arti meskipun berbeda, beragam tetap satu.

Demikianlah yang dapat dipahami dari sejarah munculnya istilah *Bhineka Tunggal Ika* pada masa kerajaan Majapahit yang dikarang oleh Mpu Tantular, hingga dijadikan sebagai semboyan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) oleh *founding father* bangsa ini di awal era kemerdekaan.

¹⁴ Tugiyono, *Sejarah*, (Jakarta: PT.Grasindo, 2004), hal. 57-58

C. Kebhinekaan dari Berbagai Aspek (Agama, Sosial, dan Politik)

Dalam aspek kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia, agama, sosial, dan politik, seringkali dihadapkan dengan berbagai konflik horizontal di tengah kehidupan masyarakat yang majemuk. Hal ini tentu saja berakibat pada ketidakharmonisan dalam menciptakan kerukunan hidup yang baik.

Maka dari itu, untuk menelaahnya lebih jauh, berikut ini akan dijelaskan keterkaitan antara kebhinekaan dengan agama, sosial, dan politik. Dan selengkapannya antara lain:

1. Kebhinekaan dari Aspek Agama

Dalam konteks keberagaman, agama pada dasarnya ingin membawa misi yang bermanfaat oleh umat manusia, menjalankan jalan yang benar dan meninggalkan jalan sebaliknya. Di Indonesia sangat nyata berbeda dari segi keberadaannya. Tapi bukan berarti mereka berbeda lantas tidak ada keterkaitan satu dengan yang lainnya. meskipun secara fakta juga ada yang beranggapan bahwa agama 'saya' berbeda dengan agama kalian dan agama 'saya' lebih benar dari agama kalian. Juga masih banyak memahami eksistensi agama seperti itu. Maka dari itu, begitu banyak kasus intoleransi berlatarbelakang sentimen agama. Tidak jarang aspek kebhinekaan agama yang dianut bangsa Indonesia merupakan aspek yang paling rawan. Di Indonesia perkembangan agama sangat besar juga memiliki misi yaitu mengajak orang untuk bergabung sebagai bentuk penyelamatan. Berangkat dari semangat inilah, kemudian banyaknya kompetisi dikalangan umat. Agama bukan hanya sebagai landang mendapati keharmonisan. Akan tetapi, juga sekaligus sebagai ladang konflik yang menyebabkan adanya kesenjangan sosial.

Ahmad Asroni mengatakan konflik dan kekerasan berbasis agama bukan hal yang asing lagi, juga turut mewarnai dinamika sosial di Indonesia. Realitas ini bisa dilihat dari beberapa fakta konflik di Indonesia akhir-akhir ini misalnya, penyerangan terhadap jemaat Ahmadiyah di Cikeusik,

Pandeglang, Banten; kerusakan dan perusakan rumah ibadah seperti Gereja di Temanggung Jawa Tengah; pembakaran pondok pesantren Syi'ah di Sampang Madura¹⁵.

Kekerasan dan rendahnya kesadaran toleransi mewarnai sejarah hubungan agama-agama. Sejarah yang mempunyai corak seperti ini akan selalu menjadi kondisi yang menyeramkan bagi pemeluk agama lain. Masalah pokoknya adalah bagaimana seorang penganut suatu agama menerima, dan menghormati agama lain dan sekaligus memegang teguh keotentikan kebenaran agama yang dia pahami. Ketika ini bisa diberikan solusi, maka sudah pasti menilai keberadaan agama secara bijak sehingga bisa hidup bersama dalam suasana damai¹⁶, seperti suasana damai yang dibawa dalam misi agama.

Kalau agama dipandang sebagai ajaran yang menganjurkan para pemeluknya untuk menghormati sesama manusia, lalu bagaimana dengan sebagian pemeluk agama ikut andil dalam menebarkan kebencian, menaruh kecurigaan, menebarkan kesalahpahaman sehingga terjadi konflik horizontal. Fakta yang lain juga mengemukakan bahwa adanya kesenjangan ekonomi, pertarungan politik atau kecemburuan sosial menjadi salah satu faktor konflik. Agama bukannya sering menggalakkan konflik, hanya saja memberikan landasan ideologi dan pembenaran simbolik.¹⁷ Pembenaran ini bukan hanya semacam alibi tanggung jawab pribadi, tetapi semakin meneguhkan tekad, serta mempertajam sekat, pada akhirnya melahirkan kesalahpahaman dan berjuang membela iman dan kebenaran menurut dia, demi kebenaran itu sendiri, sehingga motifnya menjadi irasional. Irasional ini dapat terlihat dari

¹⁵ Moh. Mahfud MD, dkk, *Prosiding Kongres Pancasila IV Strategi Pelembagaan Nilai-nilai Pancasila dalam Menegakkan Konstitusionalitas Indonesia*, Yogyakarta 31 Mei-01 Juni 2012, hal. 144

¹⁶ Haryatmoko, *Dominasi Penuh Muslihat Akar Kekerasan dan Diskriminasi*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010), hal. 115

¹⁷ Haryatmoko, *Dominasi Penuh Muslihat Akar Kekerasan dan Diskriminasi*, hal. 82

kepentingan individu maupun kelompok, dicampuradukkan dengan kehendak Tuhan.

Pengakuan bahwa agama mengajarkan hal-hal yang positif itu memang benar. Hanya saja apakah pemuka agama menyadari bahwa antara ajaran (pengetahuan) dan tindakan masih ada jarak. Keyakinan seperti ini akan membawa sikap eksklusifisme, sehingga lahirlah klaim kebenaran seperti pengikut Tuhan dan kafir, yang terpilih dan pendosa, kawan dan lawan. Di luar dari kelompok mereka harus ditobatkan atau kalau tidak dimusnakan. Pada akhirnya semua bentuk kekerasan dibenarkan, diskriminasi terhadap pemeluk agama lain, perlakuan kasar, perampasan hak, penganiayaan, diakhiri dengan pembunuhan.¹⁸ Pada dasarnya suatu kelompok tidak memberikan ruang bagi kelompok yang berbeda dengan mereka.

Dengan segala kesemrautan yang terjadi, sangat bertentangan dengan prinsip awal tadi bahwa agama sebagai ajaran yang menganjurkan para pemeluknya untuk menghormati sesama manusia. Telah dijelaskan tadi para pemuka agama apakah mereka menyadari bahwa antara ajaran (pengetahuan) dan tindakan masih ada jarak.

Bahkan di dalam agama yang satu, anggaplah itu Islam misalkan, pasti ada berbagai interpretasi atau persepsi yang berbeda-beda terhadap agama Islam itu sendiri. Sehingga perbedaan dalam tataran persepsi itu tidak lain dari wujud keniscayaan. Sebab terbentuknya persepsi seseorang tidak lain dari faktor kapasitas pengetahuan untuk menilai dan memahami realitas. Oleh karena itu, melalui pendidikan perdamaian, seorang dapat diantarkan untuk memandang puluralitas (keberagaman) dalam berabagai aspek seperti sosial, ekonomi, politik dan agama sebagai khazanah spiritual bangsa yang harus dijaga eksistensinya.

¹⁸ Haryatmoko, *Dominasi Penuh Muslihat Akar Kekerasan dan Diskriminasi*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010), hlm. 86

Setidaknya ada beberapa orientasi untuk menopang terwujudnya pendidikan perdamaian¹⁹, antara lain:

1. Orientasi Kemanusiaan

Kemanusiaan atau sering disebut humanisme merupakan sebuah nilai kodrati yang menjadi landasan sekaligus tujuan pendidikan. Kemanusiaan bersifat umum dari semua golongan, ras, agama dan aliran.

2. Orientasi Kebersamaan

Kebersamaan yang dimaksudkan disini adalah kebersamaan yang bebas dari kolusi maupun korupsi. Artinya kebersamaan yang dibangun adalah kebersamaan yang tidak merugikan diri sendiri, orang lain, lingkungan dan negaranya. Dengan begitu manusia menjadi aktif toleran, dan tenggang rasa.

3. Orientasi Kesejahteraan

Kesejahteraan yang dimaksud disini adalah diaman kondisi sosial menjadi harapan setiap orang. Konsistensi terhadap kesejahteraan harus dibuktikan dengan perilaku menuju kesejahteraan. Dengan begitu yang kemudian terjadi adalah kedamaian dimana semua orang merasa nyaman, aman, dihargai serta diakui diperlakukan sebagai manusia oleh semua pihak yang berinteraksi langsung maupun tidak langsung.

4. Orientasi Proporsional

Proporsional merupakan sebuah nilai yang tepat dipandang dari aspek apa pun. Semuanya harus tepat seperti tepat proses, tepat ruang, tepat waktu, tepat landasan, tepat secara kualitatif dan kuantitatif juga tepat tujuan. Orientasi pendidikan seperti inilah yang bisa menjadi pilar pendidikan multikultural, pluralisme dan perdamaian.

5. Orientasi Pengakuan Pluralitas

Pluralitas merupakan sebuah kenyataan yang tidak bisa diafikkan eksistensinya. Dan merupakan kenyataan yang tidak mungkin ditandas secara fasih dengan memunculkan sikap fanatik terhadap sebuah kebenaran

¹⁹ Ahmad Nurcholish, *Peace Education dan pendidikan perdamaian Gus Dur*, (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2015), hal. 190-192.

yang diyakini oleh individu dan kelompok saja. Kebenaran harus diletakkan sebagai hal yang dimiliki oleh individu dan kelompok sesuai dengan kadar dan ajaran yang diyakininya.

6. Orientasi Anti-Hegemoni

Hegemoni sangat populer dikenal di kalangan kaum tertindas. Istilah ini dihindari jauh-jauh oleh kaum liberalis. Hegemoni yang dimaksud disini adalah hegemoni dalam segala hal seperti di bidang politik, ekonomi, dan lain sebagainya.

Keenam orientasi inilah yang menjadi kerangka berpikir dan bertindak Gus Dur dalam mengimplementasikan pemikiran sosial-keagamaanya dalam konteks pendidikan perdamaian. Pada intinya bahwa adanya keberagaman agama dengan latar belakang sejarah yang berbeda juga pegangan teks-teks suci yang berbeda, persepsi terhadap kebenaran pun berbeda-beda. Mereka memang beragam tapi, pada dasarnya semuanya ingin menjelaskan kebenaran itu sendiri berdasarkan kapasitas mereka.

2. Kebhinekaan dari Aspek Sosial

Terjadinya tindakan kriminal sebagian bermotif karena persoalan ekonomi. Keragaman dalam aspek ekonomi, dapat dilihat dari indikator si miskin dan si kaya.

Menurut kriminolog James Lynch, terkait persoalan ekonomi, ia mengemukakan bahwa:

Dari sisi kejahatan serius atas hak milik di Australia tingkat pencurian di rumah-rumah lebih tinggi 40 persen dari pada di Amerika Serikat, di Kanada 12 persen lebih tinggi, dan Inggris serta Wales 30 persen lebih tinggi pada 1988 dan 1992. Dengan menurunnya berbagai indikator sosial Amerika Serikat pada tahun 1990-an, jumlah negara Eropa dengan tingkat kejahatan atas hak milik yang lebih tinggi dari pada tingkat

kejahatan atas hak milik di Amerika Serikat, bertambah besar²⁰.

Isu klasik ini memang dapat menjadi salah satu faktor terjadinya konflik²¹, karena seseorang ingin memenuhi kebutuhan primernya sehingga rela melakukan tindakan kriminal atas keterdesakannya demi kelangsungan hidup. Kekacauan ekonomi kerap terjadi, baik berupa krisis ekonomi maupun berbentuk kekacauan sosial. Salah satu contoh kasus di kota Sukabumi, Jawa Barat sejumlah tersangka pencurian mengaku tidak mampu memilih jalan lain untuk menafkahi kehidupan keluarganya kecuali mencuri. Hal ini seperti yang dilaporkan oleh Ka Lapas Sukabumi, Jawa Barat, Arpan bahwa sejumlah penghuni Lembaga Pemasyarakatan (LP) kelas II nyompang, para tersangka kebanyakan karena kasus pencurian. Mereka mengaku mencuri karena dengan seperti itu mereka bisa menafkahi keluarganya²². Berdasarkan fakta yang beredar memang ada yang melakukan tindakan kriminal karena hanya ingin memenuhi kebutuhan primernya. Akan tetapi perlu diketahui bahwa juga ada sebagian orang yang sudah sukses dalam perekonomiannya, tapi juga melakukan hal yang sama yaitu melakukan tindakan kriminal. Artinya bahwa kesuksesan secara ekonomi tidak otomatis membuat individu-individu ekonomi semakin bersifat sosial²³, melainkan sebagian orang yang sudah sukses, malah semakin tidak memiliki jiwa sosial.

Perlu dipahami bahwa konflik bukan hanya dilatarbelakangi oleh ketimpangan ekonomi. bahkan sebagian orang terbilang berkecukupan dalam hal ekonomi, tapi juga

²⁰ Francis Fukuyama, *Guncangan Besar Kodrat Manusia dan Tata Sosial Baru*, Terj. Masri Maris, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1999), hal. 77

²¹ Hasrullah, *Dendam Konflik Poso (Periode 1998-2001), Konflik Poso dari Perspektif Komunikasi Politik*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2009), hal. 104

²² Diambil dari Kompas.Com

<http://nasional.kompas.com/read/2008/05/05/00290485/impitan.ekonomi.picu.tindak.kriminalitas>, 24/02/2018. Pukul 11:29 WIB

²³ M. Jusuf Kalla, *Korupsi Mengorupsi Indonesia Sebab, Akibat, dan Prospek Pemberantasan*, (Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Utama, 2009), hal. 331

terkadang melakukan hal yang bersifat kriminal contohnya, birokrasi yang korupsi. Mereka sudah pasti berkecukupan untuk menafkahi keluarganya walau hanya memenuhi kebutuhan primernya. Oleh karena itu sebagian orang ketika berasumsi bahwa terjadinya konflik karena motif ketimpangan ekonomi, maka seharusnya tidak ada alasan bagi para birokrasi untuk melakukan tindakan korupsi (tindakan kriminal) karena negara sudah memberikan tunjangan bagi mereka. Justru persebaran korupsi itu jugalah yang menyebabkan adanya kesenjangan sosial dalam rana keadilan ekonomi²⁴, sehingga angka kriminal pun semakin marak mewarnai realitas kehidupan ini. Jadi, tindakan kriminal seperti pencuri itu bukan hanya dikarenakan ketimpangan ekonomi. Tapi, sebagian orang yang hidup berkecukupan di bidang ekonomi pun melakukan tindakan itu.

Telah diungkapkan sebelumnya bahwa keberagaman ekonomi yang dimaksud disini adalah adanya si miskin dan si kaya. Si miskin untuk memenuhi kebutuhan keluarganya, maka tidak ada pilihan lain selain mencuri. Mereka menganggap tindakannya seperti itu dalam posisi kebenaran, karena untuk memenuhi kelangsungan hidupnya. Kaum elit pun seperti itu, walaupun mereka bertindak kriminal dalam hal korupsi, mereka memandang bahwa itu benar sehingga, perbuatan itu dilakukan tanpa memikirkan implikasi terhadap kehidupan masyarakat bawah. Intinya semuanya mengklaim tindakannya tidak ada masalah (pembenaran), maka dari itu mereka melakukannya.

3. Kebhinekaan dari Aspek Politik

Sebelum membahas politik seperti apa, terlebih dahulu kita harus mengetahui politik dari para tokoh secara definisi. Ramlan Surbakti mengartikan politik itu “sebagai interaksi antara pemerintah dengan masyarakat dalam rangka proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan yang mengikat tentang

²⁴ Iswan Kaputra, dkk, *Dampak Otonomi Daerah di Indonesia Merangkai Sejarah Politik dan Pemerintahan Indonesia*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2013), hal. 203

kebaikan bersama masyarakat yang tinggal di dalam suatu wilayah”. Menurut Harold Laswell politik itu adalah “ilmu yang mempelajari pembentukan dan pembagian kekuasaan²⁵.

Hakikat politik adalah memaksa pelaku politik untuk memakai ideologi untuk dapat menyembunyikan motifnya. Motifnya yaitu kekuasaan, dan kekuasaan politik adalah kekuasaan atas pemikiran dan tindakan manusia. Intinya mereka ingin memperoleh kekuasaan di atas orang lain²⁶.

Setidaknya di dalam ranah perpolitikan, ada beberapa sistem yaitu:

1. Sistem Politik Otokrasi Tradisional

- a. Kebaikan Bersama

Dalam faktor ini memiliki pemahaman mengenai persamaan dan kebebasan politik individu. Selain itu, ada pula perbandingan dua hal yaitu kebutuhan materiil dan moril, kolektivisme dengan individualisme. Ciri dari sistem politik ini kurang menekankan pada persamaan, tetapi menekankan pada stratifikasi ekonomi, kebebasan politik individu kurang dijamin tetapi lebih menekankan pada perilaku yang menuruti kehendak kelompok kecil penguasa, kebutuhan moril dan nilai-nilai moral lebih menonjol dari pada kebutuhan materiil, dan menekankan pada kolektivisme yang berdasarkan kekerabatan dari pada individualisme.

- b. Identitas bersama

Salah satu faktor pemersatu dalam masyarakat adalah faktor suku, ras, budaya dan agama (primordial). Oleh karena itu, ikatan

²⁵ Andi Muh. Dzul Fadli, *Buku Ajar Sistem Politik Indonesia*, (Jogyakarta: Deepublish, 2017), hal. 3

²⁶ Hans J. Morgenthau, Kenneth W. Thompson, *Politik Antar Bangsa*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor), hal. 111

keturunan, suku, bangsa, budaya dan agama yang terwujud dalam diri seorang pemimpin otokrat seperti sultan, raja dalam sistem ini.

c. Hubungan Kekuasaan

Dalam sistem ini kekuasaan cenderung bersifat pribadi, negatif dan bersifat consensus. Otokrat adalah seorang raja biasanya tidak hanya menyangkut peranan simbolis yang tinggi, tetapi juga adalah kekuasaan nyata. Karena ia adalah personifikasi identitas bersama. Walaupun pada kenyataannya ia menyerahkan pelaksanaan pemerintahan kepada para pejabat menjadi pembantunya, tetapi kualitas pribadinya sangat menentukan corak kekuasaan dalam sistem ini. Masyarakat sangat kewalahan mengawasi pihak penguasa di dalam sistem ini, karena mereka hanya memiliki sumber kuasa yang sedikit. Maka dari itu sistem ini dikatakan negatif. Otorisasi pemerintahannya berdasarkan tradisi dan paksaan. Distribusi dalam kekuasaan ini pada sekelompok kecil orang yang berada di lingkungan kaum bangsawan, tentara, tuan tanah dan alim ulama.²⁷

2. Sistem Politik Totaliter

Sistem ini sangat menekankan konsensus total dalam masyarakat. Dalam mencapai konsensus secara total, tidak hanya dilakukan secara indoktrinasi ideologi, juga pelaksanaan secara paksa. Sistem politik ini pada dasarnya dibedakan menjadi dua yaitu komunis dan fasis. Semuanya menghendaki

²⁷ Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik*, (Jakarta: Grasindo, 2010), hal. 222-223

pengaturan masyarakat secara total atas dasar tertentu dengan memonopoli kekuasaan. Keduanya merupakan sistem mobilisasi masa yang membentuk masyarakat baru dan melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh pihak penguasa. Mereka menempatkan kepentingan individu di bawah kepentingan partai yang mengatasnamakan negara dan bangsa. Komunisme merupakan pemberontakan besar pada abad ke-20 terhadap sistem ekonomi kapitalis. Komunisme merupakan pengaturan pemerintah secara totaliter dengan suatu kediktatoran yang mewakili kaum proletar. Contoh negara komunisme yang masih tersisa setelah Eropa Timur dan Uni Soviet meninggalkan komunis pada tahun 1989, 1991 seperti Republik Rakyat Cina, Korea Utara, Vietnam, Kuba dan Albani. Fasisme merupakan sistem pemerintahan yang mirip dengan komunisme yang juga pengaturan pemerintahan dan masyarakatnya totaliter dengan suatu kediktatoran tunggal yang sangat nasionalis, rasialis, militeristik dan imperialis²⁸.

Terkait sistem Politik Komunis²⁹, setidaknya terdapat beberapa variannya, yaitu:

a. Kebaikan Bersama

Ini memiliki prinsip sama rata dalam bidang ekonomi, kebebasan politik dan hak sipil untuk mengkritik penguasa partai tidak dijamin. Dalam Sistem ini mengedepankan kemerdekaan nasional, dan membebaskan diri dari belenggu penindasan asing. Semua kepentingan-kepentingan individu harus tunduk pada

²⁸ Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik*, hal. 225

²⁹ Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik*, hal. 225-227

kehendak partai, negara, dan bangsa (koletivisme).

b. Identitas bersama

Kesakralan dalam sistem ini yaitu ideologi yang bersifat doktrinal. Artinya masyarakat harus sesuai dengan ajaran-ajaran yang telah ditetapkan oleh partai. Masyarakat tidak boleh membangkang. Objek doktrinal ini seperti media massa guna membentuk paradigma masyarakat tertentu, sekolah, dan organisasi perkaderan.

c. Hubungan kekuasaan

Kekuasaan dalam sistem ini yaitu monopoli. Artinya partai tunggal yang menjadi sentral kekuasaan. Sistem pemerintahan ini secara hirarkis, seperti pemimpin yang memimpin kelompok kecil disebut politbiro, dan politbiro ini dipimpin oleh pimpinan utama yaitu pemimpin partai yang sekaligus bertindak sebagai pemimpin negara dan pemerintahan. Sistem pemerintahan ini yang ditekankan adalah pembangunan infrastruktur, ekonomi dan pengadaan barang, jasa kepada semua individu. Ekspansi partai tunggal ini sangat luas, mampu memasuki berbagai kelompok sosial seperti buruh, petani, organisasi wanita guna alat untuk memobilisasi massa. Tapi, kalau organisasi jenis keagamaan itu tidak diperbolehkan kecuali suatu ketetapan dari partai.

d. Hubungan Politik dan Ekonomi

Yang dikelola oleh partai tunggal dalam pemerintahan ini yaitu pengendalian kegiatan ekonomi seperti pengadaan barang dan jasa. Kegiatan ekonomi yang merupakan milik individu dan swasta itu dilarang. Semua kebutuhan pokok didistribusikan pemerintah kepada semua warga sebagai wujud apresiasi ketaatan total yang dipersembahkan oleh warga terhadap kebijakan pemerintah. Dalam perkembangannya, produk barang dan jasa dalam sistem ini, makin lama makin menurun karena ada dua hal yaitu *pertama*, motivasi prestasi kerja menurun. *Kedua*, Aparat partai telah berubah menjadi kelas penguasa. Implikasi menurunnya produksi ini menjadi tantangan tersendiri bagi warga untuk mendapatkan kebutuhan pokok. Sedangkan aparat partai memiliki keistimewaan tersendiri dalam mendapatkan barang dan jasa.

Berdasarkan pada penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa *pertama*, sistem politik ini memberikan hak berupa kebutuhan pokok kepada masyarakat relatif merata. Semua kebutuhan pokok didistribusikan pemerintah kepada semua warga sebagai wujud apresiasi ketaatan total yang dipersembahkan oleh warga terhadap kebijakan pemerintah. sehingga motivasi prestasi kerja menurun. *Kedua*, aparat partai tunggal itu memiliki keistimewaan dalam mendapatkan barang dan jasa, sehingga dikatakan bahwa aparat partai telah berubah menjadi kelas penguasa.

3. Sistem Politik Demokrasi³⁰

Sistem ini secara ideal yaitu sistem politik yang memelihara keseimbangan antara konflik dan kesepakatan (konsensus). Artinya bahwa demokrasi ini memungkinkan perbedaan pendapat, persaingan antar individu, dan kelompok seperti dikalangan pemerintahan dan lembaga-lembaga pemerintahan. Tapi, dengan catatan bahwa demokrasi hanya memberikan toleransi pada konflik yang tidak sampai memberikan efek yang fatal terhadap sistem demokrasi, apa lagi menghancurkannya. Maka dari itu sistem ini menyiapkan mekanisme dan prosedur yang mengatur dan menyelesaikan konflik, dalam bentuk kesepakatan (konsensus). Prinsip inilah yang mendasari pembentukan identitas bersama, hubungan kekuasaan, legitimasi kewenangan, dan hubungan politik dan ekonomi.

a. Kebaikan Bersama

Kesamaan hak politik setiap individu dijalani sesuai dengan konstitusi. Setiap individu punya hak untuk menegjartujuan hidupnya. Maka dari itu setiap individu, kelompok memiliki kesempatan berpolitik dengan cara bergabung dalam organisasi sukarela untuk bersama-sama mempengaruhi pemerintahan dan pembuatan kebijakan yang menguntungkan mereka.

b. Identitas Bersama

Faktor yang mempersatukan masyarakat dalam perbedaan yaitu sistem demokrasi ini. Contoh Bhineka Tunggal Ika untuk Indonesia, *dan Unity in Diversity* untuk Amerika Serikat.

³⁰Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik*, hal. 228-231

Artinya bahwa satu sisi masyarakat mempertahankan keterikatannya dengan hubungan primordial seperti suku, ras, budaya, juga agama. Di sisi lain, masyarakat mempunyai keterikatan yaitu suatu dasar tujuan yang sama. Dasar yang dimaksud disini adalah keterikatan pada lembaga demokrasi. tujuan yang sama itu berupa pengembangan potensi setiap individu, dan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat. implikasi keterkaitan masyarakat dari ikatan kultural, primordial berpotensi besar menimbulkan gesekan (konflik). Tetapi, keterikatannya yaitu memiliki tujuan yang sama, dan pada akhirnya melahirkan kesepakatan.

c. Hubungan Kekuasaan

Dalam sistem ini, distribusi kekuasaan memang relatif merata. Maka dari itu lahirlah kompetisi, persaingan antara kelompok satu dengan kelompok yang lainnya. Misalnya legislatif, eksekutif, yudikatif, lembaga sosial dan pemerintahan. Setiap kelompok akan memperjuangkan kepentingannya. Dengan adanya kelompok-kelompok sosial dan lembaga pemerintahan setidaknya mempunyai kesadaran bahwa kekuasaan hanya sebagai sarana untuk mewujudkan kesejahteraan umum. Maka dari itu sangat diperlukan kesediaan untuk saling menghormati sertai memahami dan bekerjasama. Adanya kontroling antara pemerintah dan pemerintah. Masyarakat dan pemerintah niscaya akan melahirkan konflik

diantara mereka. Sedangkan kesadaran dan kesepakatan akan melahirkan konsensus.

d. Legitimasi Kewenangan

Prinsip kewenangan dalam sistem ini bersifat prosedural. Artinya segala sesuatunya harus diatur dalam konstitusi. Maka dari itu masyarakat harus menaati kewenangan pemerintah, karena mereka dipilih berdasarkan prosedur. Konstitusi biasa diatur berdasarkan hak-hak masyarakat misalnya menjalankan ibadah, hak berbicara, hak berasosiasi, hak keadilan, hak menjalankan usaha, hak memilih pemerintah serta mengontrol pemerintah. Pelaksanaan hak-hak inilah yang akan menimbulkan konflik. Tapi, meskipun demikian, sebagai warga negara harus menghargai hak orang lain yaitu menaati peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Maka dari itu peraturan konstitusi diletakkan sebagai prinsip kewenangan dan legitimasi, berguna untuk menciptakan keseimbangan antara konflik dan konsensus.

e. Hubungan Politik dan Ekonomi

Dalam persoalan ekonomi juga terkadang menimbulkan konflik contohnya pengusaha kuat akan bersaing dengan pengusaha lemah. Adanya pihak penguasa yang lebih mudah mendapatkan sarana alat produksi barang. Di sisi lain pihak pengusaha swasta tidak mudah mengadakan alat produksi itu. Sehingga implikasinya pihak swasta ini tidak mampu mendistribusikan hasil produksinya secara merata ke masyarakat. Dengan seperti itu

pihak pengusaha swasta tidak menerima dan pada akhirnya melahirkan konflik. Maka dari itu tampilan pemerintah sangat berperan penting dalam mengatasi masalah yang telah dihadapi oleh pihak pengusaha swasta ini yaitu pengadaan sarana alat produksi bagi pihak pengusaha swasta, sehingga dapat meminimalisir konflik yang telah terjadi. Campur tangan pemerintah dalam hal ini yaitu pencegahan praktek-praktek monopoli persaingan di bidang ekonomi. sehingga keseimbangan peran swasta dan pemerintah melahirkan keseimbangan antara konflik dan konsensus.

Telah dijelaskan sebelumnya bahwa politik sesuatu yang mengikat tentang kebaikan bersama, juga politik sebagai ilmu yang mempelajari pembentukan dan pembagian kekuasaan, dan kekuasaan politik itu kekuasaan atas pemikiran manusia atau memperoleh kekuasaan di atas orang lain. Dalam perebutan kekuasaan itu juga tidak jarang diwarnai konflik karena mungkin pada dasarnya memunyai latar belakang kepentingan berbeda-beda. Konflik memang sering terjadi karena adanya aksi propaganda. Artinya bahwa dalam sejarah manusia konflik sering mewarnai setiap perubahan politik seperti musim pergantian rezim, para elit politik saling tarik ulur demi tercapainya kepentingan mereka. Adanya konflik menurut Coser (1956), karena adanya kesadaran dalam semangat pembaharuan masyarakat, sehingga para elit dan kelompok politik saling tarik menarik kepentingan dengan berdalih upaya yang hendak mereka lakukan hanya Karena untuk mengubah kondisi masyarakat dan bangsa agar lebih baik.³¹ Sedangkan

³¹ Fathurin Zain, *Politik Analisis Wacana Media*, (Yogyakarta: LKiS, 2004), hal. 84

menurut Bottomore (1992), bahwa dengan berubahnya perpolitikan di berbagai negara selalu dibarengi dengan munculnya konflik baik vertikal dan horizontal, mulai yang sederhana sampai paling besar yaitu peperangan³².

Pemicu konflik itu sendiri sangat kompleks. Letkol Pol. Drs. Jasman B.Opu mengatakan bahwa pertikaian di Poso bukan karena latar belakang agama sebagaimana didengungkan berbagai pihak. Opu lebih melihat faktor konflik itu di tingkat elit politik, dimana sejumlah elit politik memanfaatkan isu SARA untuk mempertahankan serta melindungi kepentingan politiknya dengan cara mengadu domba masyarakat sehingga tercipta kekacauan suasana anarkis di tatanan sosial³³. Persoalan seperti ini kian mewarnai pesta demokrasi, munculnya pro dan kontra berdasarkan kepentingan masing-masing. Inilah tantangan yang harus dihadapi oleh bangsa. Berbagai cara dilakukan untuk memenuhi syawat kekuasaan mempertahankan dan merebutnya. Indonesia sebagai negara yang mempunyai corak masyarakat yang beragam baik dari suku, ras, etnik, budaya, agama, ekonomi dan politik. Meskipun begitu, tetapi mereka dipersatukan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Proses *framing* mempunyai implikasi sangat besar dalam gerakan politik. *Framing*, dapat menjadi senjata bagi kaum elit politik untuk memainkan perannya seperti merekayasa opini atau pembangunan opini di publik. Dengan seperti itu mereka dapat mengklaim bahwa opini publik yang berkembang mendukung kepentingan mereka³⁴.

Keberagaman dalam aspek politik dengan atribut yang beragam, cara dan sikap dalam pola berpolitik pun beragam, tapi ada satu poin yang mesti dipahami bahwa tujuan dari itu semua respon dinamika perpolitikan makin hari makin

³² Fathurin Zain, *Politik Analisis Wacana Media*, hal. 84.

³³ Agus Sudibyo, *Politik Media dan Pertarungan Wacana*, (Yogyakarta : LKiS, 2001), hlm. 113.

³⁴ Agus Sudubyo, *Politik Media dan Pertarungan Wacana*, hal. 224

berkembang. Seperti dikatan sebelumnya bahwa adanya tarik ulur diantara kaum elit politik demi mencapai kepentingan mereka. Adanya konflik menurut Coser (1956), karena adanya kesadaran dalam semangat pembaharuan masyarakat. Dalam semangat pembaharuan inilah yang menandakan bahwa ada harapan yang lebih besar mesti diwujudkan. Mereka para aktor politik ingin merebut kekuasaan, juga yang lainnya merasa bahwa kepentingannya untuk mempertahankan kedudukannya sebagai pihak penguasa, harus dipertahankan. Ada yang ingin merebut kekuasaan itu dan ada yang ingin mempertahankannya. Tetapi pada intinya mereka berdinamika dalam rana politik guna mempertahankan pandangan politik mereka yang mereka anggap benar.

Pancasila sebagai ideologi negara yang mempunyai seboyan *Bhineka Tunggal Ika* ditetapkan sebagai sebagai etika politik. Menurut Abdul Hadi W.M. adalah dengan Pancasila dijadikan sebagai etika politik dalam tata kelola negara, sekaligus menjadikannya sekaligus keluasaan negara dijalankan sesuai dengan *pertama*, asas legalitas hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) berdasarkan Pancasila. *Kedua*, disahkan dan dijalankan secara demokratis. *Ketiga*, dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip moral, sebagaimana ditegaskan oleh Muhammad Hatta bahwa negara harus berdasarkan moral ketuhanan dan kemanusiaan agar, tidak terjerumus menjadi “negara kekuasaan”. Sangat jelas ditegaskan oleh salah satu Bapak pendiri Negara kita yaitu memiliki prinsip dimensi ketuhanan, kemanusiaan, demokrasi dan keadilan secara jelas tertuang di dalam sila-sila Pancasila³⁵.

Etika politik yang dimaksud disini adalah falsafa moral dimensi politik kehidupan manusia (Suseno, 2001:8). Dalam pembahasan ini, setidaknya ada tiga kata kunci yang perlu

³⁵ A. Ubaedillah, *Pendidikan Kewarganegaraan (Civic Education) Pancasila, Demokrasi, dan Pencegahan Korupsi*, (Jakarta: PT. Fajar Interpratama Mandiri, 2017), hal. 33-34

dipahami yaitu, etika, moral dan politik. Etika yang dimaksud disini adalah persoalan tanggung jawab dan kewajiban manusia. Kalau moral lebih kepada kebaikan manusia sebagai manusia. Sedangkan dalam dimensi politik yaitu dimensi masyarakat dirumuskan dalam sebuah keputusan secara politis. Artinya bahwa memperhatikan masyarakat secara keseluruhan. Dengan kata lain etika politik lebih pada persoalan kebaikan dan tanggung jawab manusia sebagai warga negara terhadap negara sesuai dengan ketetapan hukum yang berlaku³⁶.

Sebelumnya telah dijelaskan bahwa Pancasila sebagai etika politik menjadi landasan legalitas disahkan secara demokratis. Artinya bahwa Pancasila sebagai bentuk kesepakatan (konsensus) yang memiliki kandungan nilai-nilai di di dalamnya. Ditetapkannya Sebagai etika politik, maka konsekuensi logis yang harus diterima oleh warga negara Indonesia, yaitu harus mematuhi ketentuan-ketentuan yang telah disepakati secara demokratis, salah satunya yaitu *Bhineka Tunggal Ika* sebagai semboyan ideologi negara kita yaitu Pancasila. Tadi dikatakan bahwa Pancasila adalah hasil kesepakatan, secara otomatis nilai-nilai yang terkandung di dalamnya pun bagian dari hasil kesepakatan yang memuat etika perpolitikan, etika kebangsaan dan dijadikan sebagai ideologi negara Indonesia. Sudah jelas bahwa yang dimaksud Bhineka Tunggal Ika dalam perspektif negara Indonesia yaitu Bhineka Tunggal Ika berdasarkan kesepakatan (konsensus). Dengan melihat realitas konflik yang terjadi terus menerus di negeri ini yaitu Indonesia, Pancasila sebagai ideologi negara, dan *Bhineka Tunggal Ika* sebagai semboyannya terlihat kurang maksimal untuk mengakomodasi keberagaman yang ada di Indonesia. Artinya bahwa *Bhineka Tunggal Ika* selama ini dipandang secara *mahawi* dalam konteks negara, sosial, dan politik. Sementara dengan cara seperti ini tidak memberikan solusi, tidak

³⁶ Moh. Mahfud MD, dkk, *Prosiding Kongres Pancasila IV Strategi Pelembagaan Nilai-nilai Pancasila dalam Menegakkan Konstitusionalitas Indonesia*, Yogyakarta 31 Mei-01 Juni 2012, hal. 73

menyelesaikan masalah. Mengapa? kalau hanya politik itu hanya kepentingan. Artinya ketika politik tidak diuntungkan maka bisa menciptakan konflik.

BAB III

DISKURSUS TENTANG *TASYKIK AL-WUJŪD*

Pada pembahasan sebelumnya sudah dijelaskan mengenai problem mendasar dalam penelitian ini yaitu konflik. Terjadinya konflik karena adanya keinginan menuntut keseragaman. Artinya bahwa adanya konflik karena seseorang menganggap bahwa realitas itu hanya satu, sehingga menafikkan realitas yang lain selain dari dirinya. Keberadaan *Bhinneka Tunggal Ika* sebagai semboyan ideologi negara yaitu Pancasila sejauh ini belum memberikan solusi yang tepat untuk mengatasi konflik di Indonesia. Sehingga perlu kiranya permasalahan ini dipahami bahwa keberagaman hadir bukan hanya sebagai kesepakatan konstitusi dan juga kesatuannya berbasiskan konstitusi. Melainkan keberagaman itu dimaknai lebih dari kesepakatan yang merupakan hal yang fundamental yaitu eksistensi.

Dalam hal ini, muncullah berbagai teori yang berbicara eksistensi. Ada yang berpandangan bahwa eksistensi itu hanya satu dan tidak beragam. Ada yang memandang bahwa eksistensi itu beragam, tapi eksistensi satu dengan eksistensi lainnya tidak memiliki hubungan sama sekali, dengan kata lain berbeda secara totalitas. Dan ada yang berpendapat bahwa eksistensi itu satu sekaligus beragam. Maka dari itu awal pembahasan bab ini perlu kiranya menguraikan berbagai teori mengenai eksistensi, serta menentukan teori eksistensi yang cocok dalam penelitian ini. Sebelum masuk pembahasan teori mengenai eksistensi, terlebih dahulu penulis menjelaskan apa itu kuiditas, selanjutnya akan dijelaskan apa itu wujud (eksistensi).

A. Kuiditas (*Mahiyah*)

Kata '*mahiyah*' berasal dari bahasa Arab yang mempunyai makna 'ke-apa-an', misalkan dalam konteks ke-pohon-an, ke-manusia-an, ke-buku-an dan lain-lain¹. Disamping itu juga, '*mahiyah*' memiliki dua makna yaitu makna secara umum (*bi*

¹ Mohsen Gharawiyani, *Pengantar Memahami Buku Daras Filsafat Islam*, (Jakarta: Sadra Press, 2012), hal. 87

ma'na al-'am) dan makna khusus (*bi ma'na al-khās*). 'Mahiyyah' bermakna umum adalah sesuatu yang jatuh setelah pertanyaan 'Apakah itu?', sedangkan 'mahiyah' bermakna khusus adalah sesuatu yang dengannya adalah sesuatu itu (*mā bihi as-asyai huwa huwa*)². Akan tetapi, dari kedua makna yang telah dijelaskan tersebut, makna 'mahiyah' adalah yang merujuk pada makna yang umum, dan ini yang digunakan oleh para penganut *asholatul mahiyyah*.

Berdasarkan uraian di atas dapat kita pahami bahwa mahiyah itu berbicara mengenai ke-apa-an sesuatu. Artinya bahwa kita dapat membedakan entitas satu dengan entitas lainnya berdasarkan mahiyah. Hal ini seperti yang dapat dipahami berikut ini, bahwa:

Misalkan perbedaan antara manusia dengan kuda. Manusia tentu berbeda dengan kuda dari aspek ke-apa-an-nya yaitu kalau manusia sering kali dibahasakan sebagai hewan memiliki potensi untuk berpikir. Sedangkan kuda tidak memiliki potensi itu, melainkan kuda biasanya dicirikan sebagai hewan yang meringkik. Berdasarkan penjelasan di atas bahwa mahiyah tidak lain dari akar perbedaan itu sendiri, sebagaimana dijelaskan bahwa konsep mahiyah (kuiditas) menunjukkan perbedaan. Sedangkan wujud sama sekali tidak memiliki perbedaan di dalamnya, kecuali perbedaan dari aspek derajatnya³.

Para penganut *ashālah al-māhiyah* memiliki argumentasi bahwa seandainya wujud itu ashil, maka mewujud di luar dan bagi mengadanya di luar, ia membutuhkan wujud juga dan seterusnya sehingga terjadi *tasalsul*, dan ini mustahil terjadi.⁴ Juga dijelaskan oleh Mulla Sadra sebagai bentuk responnya terkait hal ini bahwa wujud mewujud (secara eksternal), tetapi wujudnya wujud dengan

² As-Syeikh Mālik Musthafā Wahhab Al-Āmulī, *Durūs Falsafah fī Syarh al-Mandzūmah*, (Beirut: Dār al-Hādī lī at-Thabā'ah wa an-Nasyr wa at-Tauzī', 1422 H), hal. 112

³ Mohsen Gharawiyān, *Pengantar Memahami Buku Daras Filsafat Islam*, hal. 89

⁴ Sayyid Muhammad Husein Thabathabai, *Bidayah al-Hikmah*, (Qom: Muasasah al-Ma'arif al-Islamiyah, 1418 H), hal.16

zatnya sendiri, sehingga tidak menyebabkan regresi⁵. Pemahaman terkait *'mahdiyyah'* oleh para penganutnya tentu saja mereka memahaminya demikian, sebab tidak ada yang lebih nyata dari *'mahdiyyah'*, namun pandangan ini juga menuai kritik bagi para filsuf yang meyakini bahwa hanya wujud yang nyata dan bersifat fundamental, seperti Mulla Sadra dan lain sebagainya.

B. Wujud

Dalam pengertian wujud, sebagian filsuf mencoba mendefinisikan apa itu wujud, sementara upaya tersebut ketika dilakukan maka akan menadikan wujud semakin tidak jelas. Artinya bahwa untuk mendefinisikan wujud, maka tidak ada sesuatu yang lain, selain wujud itu sendiri. Kenapa bisa dikatakan seperti itu?

Sebab ketika seseorang mendefinisikan wujud dengan sesuatu yang nyata secara objektif, maka pertanyaan apa itu sesuatu yang nyata? Lalu seseorang menjelaskan bahwa nyata itu sesuatu yang objektif. Pertanyaan selanjutnya, lalu apa itu sesuatu yang objektif? Seseorang menjawab bahwa sesuatu yang objektif itulah wujud⁶.

Hal ini sebagaimana yang dikemukakan oleh Thabataba'i bahwasanya "Konsep wujud merupakan sebuah konsep badihi yang dengan dirinya sendiri, sehingga tidak membutuhkan sesuatu perantara apapun. Maka, tidak ada definisi atau deskripsi baginya, sebab harus bagi sesuatu yang didefinisikan lebih jelas dari yang didefinisikan⁷", sedangkan pendefinisian semacam itu tidak dapat diterapkan pada wujud. Hal ini tentu saja karena "Wujud berdasarkan konsepnya merupakan sebuah konsep univokal

⁵ Kholid Al-Walid, *Perjalanan Jiwa Menuju Akhirat Filsafat Eskatologi Mulla Sadra*, (Jakarta: Sadra Press, 2012), hal. 36

⁶ Untuk mendefinisikan wujud, tentu tidak akan dapat mendefinisikannya ketika di luar dari wujud itu sendiri. Artinya bahwa untuk mendefinisikan wujud, tentu dengan sesuatu yang ada. Sedangkan ada yaitu wujud itu sendiri. Sehingga dikatakan bahwa wujud itu sesuatu yang nyata dengan sendirinya dan bersifat aksiomatik (badihi). Lihat di Mohsen Gharawiyani, *Pengantar Memahami Buku Daras Filsafat Islam*, hal. 78

⁷ Sayid Muhammad Husein Thabathabai, *Bidayah al-Hikmah*, hal. 11

(*musytarak ma'nawī*) yang memiliki makna satu⁸”, sehingga dapat diterapkan pada apapun.

Maka dari itu, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa untuk mendefinisikan wujud, maka tidak ada yang lain selain wujud itu sendiri. Sebab, wujud itu tanpa didefinisikan pun wujud sudah jelas dengan sendirinya. Seperti yang dikatakan oleh Hasan A.A bahwa memahami wujud tergolong ilmu mudah. Yang dimaksud ilmu mudah itu adalah tanpa memakai peran berpikir. Maka dari itu, dapat dipahami secara langsung tanpa perantara apa pun dan tidak dapat didefinisikan⁹, sehingga jelas bahwa untuk dapat mendekati makna wujud, bisa melalui lawan dari kata wujud yaitu ketiadaan.

C. Fundamentalitas Wujud

Sebelumnya telah dijelaskan bahwa berbicara mengenai wujud merupakan sebuah pembicaraan terkait realitas dasar yang paling nyata, sehingga tak ada seseorang pun yang mampu memberikan satu definisi kepada wujud. Prinsip ini merupakan prinsip dasar dalam bangunan filsafat Mulla Sadra. Juga dikatakan bahwa prinsip ini merupakan hasil pemikiran asli Mulla Sadra yaitu fundamental wujud. Diantara para filsuf muslim prinsip ini dibahas pertama kali oleh Mulla Sadra dan menggolongkannya dalam kajian ontologi¹⁰, sebagai pondasi dari Hikmah Muta'aliyah.

Kefundamentalitas wujud ini adalah suatu prinsip yang mengatakan bahwa wujudlah yang paling mendasar, dan merupakan dasar di alam eksternal. Sebab ketika bukan wujud, maka ada dua kemungkinan lain selain wujud yakni ketiadaan dan kuititas. Seperti yang dapat dipahami bahwa:

Ketiadaan tidak mungkin bisa menjadi dasar keberadaan. Sebab jelas dengan sendirinya bahwa ketiadaan sudah jelas tiada.

⁸ Sayid Muhammad Husein Thabathabai, *Nihāyah Al-Hikmah*, (Qum: Muasasah an-Nasyr-Islami, 1426 H), Jilid 1, hal. 11

⁹ Hasan A.A, *Logika dan Filsafat*, (Jakarta: Yayasan Al-Muntazhar, 1992), hal. 36

¹⁰ Mohsen Gharawiyān, *Pengantar Memahami Buku Daras Filsafat Islam*, hal. 89

Selanjutnya, jika kuiditas dikatakan sebagai dasar keberadaan, maka tidak mungkin juga. Sebab kuiditas menempel pada wujud. Juga dijelaskan bahwa wujud adalah asal segala sesuatu, sedangkan kuiditas yaitu penta'biran atau penjelasannya. Manusia ada dan kuda ada adalah dua proposisi sama-sama menerangkan keberadaan manusia dan kuda. Aspek kesamaannya yaitu sama-sama ada, dan aspek perbedaannya yaitu kuda dan manusia. Karena kesamaan bukan perbedaan, maka dari itu bisa dikatakan bahwa wujud itu tidak sama dengan kuiditas. Kuiditas dapat diterangkan dengan sesuatu yang ada, juga sebaliknya, sedangkan wujud tidak bisa diterangkan dengan sesuatu yang tidak wujud. Untuk menerangkan sesuatu konsekuensinya supaya bisa diterangkan, maka harus wujud (Ada) terlebih dahulu. Bagaimana mungkin kita menjelaskan sesuatu yang tidak ada. Maka dari itu dikatakan bahwa wujudlah yang asal (mendasar)¹¹.

Kita tidak memiliki keraguan sedikitpun bahwa ada kenyataan yang memiliki efek, dan hal ini bukan berdasarkan prasangka tetapi nyata. Kemudian dari realitas atau kenyataan tersebut, kita mendapatkan dua konsep (*mafhūm*), dan kedua konsep tersebut berbeda. Artinya konsep yang satu berbeda dengan konsep yang lainnya, meskipun mempunyai satu *misdaq*. Dan kedua konsep yang dimaksud adalah wujud dan mahiyah. Contohnya seperti manusia yang ada di luar yang kita peroleh darinya yaitu itu manusia dan juga dikatakan ada. Ada dua konsep yang berbeda yaitu konsep manusia dan konsep ada. Konsep ada yaitu wujud dan konsep manusia yaitu kuiditas (ada manusia). Kemudian para filsuf berbeda pandangan mengenai keāshilanya. Kaum Peripatetik mengatakan bahwa yang *āshil* adalah wujud. Sedangkan kaum iluminasi mengatakan yang *āshil* adalah kuiditas. Selanjutnya yang benar adalah pandangan Peripatetik yaitu wujudlah yang *āshil*. Adapun argumentasi sehingga wujud dikatakan *āshil* adalah sebagai berikut:

Argumen *Pertama*, kuiditas atau mahiyah adalah mengandung relasi netral antara wujud dan ketiadaan. Artinya bahwa kuiditas bukan wujud dan juga bukan ketiadaan, melainkan berada pada titik netral. Seandainya kuiditas keluar dari kenetralannya tanpa

¹¹ Hasan A.A, *Logika dan Filsafat*, hal. 37

melalui perantara wujud, maka akan terjadi *inqilab*. Artinya bahwa tidak mungkin kuiditas keluar dari kenetralannya melalui kuiditas. Ketika seperti itu, ya tetap netral. Oleh karena itu, ketika kuiditas ingin keluar dari kenetralannya, maka ia akan membutuhkan yang lain selain darinya yaitu wujud. Artinya kalau pun kuiditas keluar dari kenetralannya, maka wujudlah yang mengeluarkan kuiditas dari kenetralannya. Oleh karena itu wujudlah yang *āshil* (fundamental).

Argumen *kedua*, mahiyah itu merupakan akar perbedaan secara esensial. Seandainya wujud itu tidak *āshil*, maka tidak akan terjadi kesatuan diantaranya yaitu kuiditas satu dengan kuiditas lainnya, sehingga kita tidak mungkin bisa membuat prediksi yang merupakan kesatuan dalam eksistensi. Oleh karena itu butuh sesuatu yang menjadi dasar. Dan dasar itu adalah wujud. Kuiditas satu dengan kuiditas lainnya bisa menyatu karena wujud. Maka dari itu wujudlah yang *āshil*, dan kuiditas menjadi ada karena wujud¹².

Dalam pembahasan ini juga disajikan berbagai argumentasi lain dalam pembuktian bahwa yang menjadi pijakan dasar bagi seluruh realitas eksistensi alam eksternal adalah wujud, dan menafikkan selain dari wujud itu sendiri. Prinsip fundamental wujud ini menegaskan bahwa:

Segalah realitas di alam eksternal ini berpijak pada wujud. Ketika dikatakan wujud bukan sebagai pijakan keberadaan realitas eksternal, berarti ada dua kemungkinan yang menjadi pijakan itu. pertama yaitu ketiadaan dan kedua kuiditas. Ketika kita menyepakati bahwa keberadaan realitas eksternal ini adalah ketiadaan maka konsekuensinya, itu tidak logis. Kenapa dikatakan tidak logis? Karena bagaimana mungkin ketiadaan menjadi pijakan bagi realitas eksistensi di alam eksternal sedangkan, ketiadaan itu jelas niscaya tiada. Kemungkinan kedua, adalah kuiditas. Ketika kita menjadikan kuiditas sebagai landasan, maka yang menjadi dasar keberadaan adalah kuiditas. Sedangkan kuiditas itu sendiri bersifat i'tibari yaitu sesuatu yang menempel pada wujud. Maka dari itu seperti yang telah dijelaskan

¹² Sayid Muhammad Husein Thabathabai, *Bidayah al-Hikmah*, hal. 14-16

sebelumnya bahwa prinsip fundamental wujud ini, mengatakan bahwa wujud merupakan dasar di alam eksternal¹³.

Terkait hal itu, Kholid Al Walid juga mengemukakan terkait beberapa argumentasi filosofis Mulla Sadra untuk membuktikan bahwa wujud merupakan dasar¹⁴ bagi realitas mahiyah itu sendiri, antara lain:

1. Ketika kuiditas keluar ke tingkat wujud, bukan dengan perantara wujud, pasti terjadi perubahan substansi hakikat pada kuiditas, itu tidak mungkin terjadi. Sebab keluarnya dari tingkat wujud pun sebenarnya mesti dilandasi oleh wujud atau dengan kata lain yang mengeluarkan kuiditas ke tingkat wujud, adalah wujud itu sendiri.
2. Kuiditas merupakan sumber perbedaan. Setiap kuiditas pasti berbeda-beda. Jika tidak ada yang menyatukan hal yang berbeda-beda ini, dan menggabungkannya, maka konsekuensinya tiada suatu proposisi yang mempredikatkan proposisi kuiditas satu dengan kuiditas yang lainnya. Maka dari itu perlu adanya sesuatu yang menggabungkan kuiditas satu dengan kuiditas lainnya. dan realitas yang mampu menggabungkannya yaitu wujud.
3. Kuiditas mewujud dengan wujud eksternal sehingga memiliki efek. Seperti api membakar, air membasahi, dan pada saat yang sama juga mewujud di alam mental. Tapi, tidak memiliki efek seperti dengan efek kuiditas eksternal. Kalau dikatakan bahwa kuiditas yang lebih riil, maka pasti adanya kesesuaian antara yang ada di mental dan kuiditas yang ada di luar. Misalkan api membakar di alam mental juga membakar di luar, maka betul kuiditaslah yang riil. Tetapi faktanya bahwa ketika kita mengonsepkkan api membakar di mental, dalam waktu yang bersamaan harusnya ketika kuiditas yang riil, maka api membakar itu juga eksis di luar. Tetapi faktanya keduanya mengalami perbedaan yaitu efeknya tidak memiliki kesamaan. Efek yang riil bahwa api itu membakar berada di luar, sebab

¹³ Muhammad Nur Jabir, *Wahdah Al-Wujud Ibn Arabi dan Filsafat Wujud Mulla Sadra*, hal. 26

¹⁴ Kholid Al-Walid, *Perjalanan Jiwa Menuju Akhirat Filsafat Eskatologi Mulla Sadra*, hal. 35

dengan waktu bersamaan juga eksis di alam mental kita bahwa api betul membakar. Berarti dapat disimpulkan bahwa wujudlah yang utama dan riil.

4. Dikatakan bahwa kuintas netral dalam keadaannya, baik dalam intensitas dan lemah, kepadatan dan ketidapadatan. Ketika kita melihat ada intens seperti sebab sedangkan yang lemah adalah akibat. Ketika wujud tidak riil maka perbedaan atribut itu akan kembali ke kuintas. Sedangkan seperti yang dikatakan tadi bahwa kuintas itu bersifat netral. Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa wujudlah yang lebih riil.

Jika dikatakan bahwa wujud merupakan dasar dari keberadaan realitas eksternal, maka apa pun yang terlihat di realitas eksternal tak lain dari wujud itu sendiri. Sebab dikatakan sesuatu berbeda dan juga sama, tidak akan bisa dikatakan berbeda dan sama ketika tidak mempunyai keberadaan terlebih dahulu. Sesuatu sama dengan wujud. Oleh karena itu yang tidak wujud tidak bisa dikatakan sebagai sesuatu. Ketiadaan tidak memiliki perbedaan, karena perbedaan itu timbul dari keberadaan. Jadi, ketiadaan tidak bisa dikatakan berbeda karena, bagaimana mungkin bisa dikatakan berbeda kalau secara keberadaan pun ia tidak punya. Yang bisa dipredikasi adalah mesti sesuatu, bukanlah yang lain dari sesuatu. Oleh karena itu, yang bukan sesuatu tidak akan dapat dipredikasi atau dikabari oleh sesuatu apapun¹⁵. Dalam persoalan ini, sudah jelas bahwa wujudlah yang mendasari semua keberadaan ini. meskipun seperti itu, juga ada beberapa pandangan yang berbeda memaknai wujud itu sendiri, yakni ada yang berpandangan bahwa wujud itu satu, wujud itu beragam, dan ada juga yang berpandangan bahwa wujud itu sekaligus beragam. Untuk menjelaskan persoalan ini akan dijelaskan dalam beberapa teori wujud yang telah disinggung sebelumnya.

Inilah sejumlah argumentasi yang mendukung bahwa wujud itulah yang lebih riil dibandingkan dengan kuintas dan ketiadaan. Apalagi ketiadaan, sebab secara adanya dia sudah niscaya tiada.

¹⁵ Hasan A.A, *Logika dan Filsafat*, hal. 38-39

Maka dari itu, dapat dipahami bahwa pemahaman terkait prinsip fundamental wujud merupakan dasar dari realitas eksternal adalah wujud.

D. Unitas dan Pluralitas Wujud

Perlu diketahui bahwa para filsuf sebelum Mulla Sadra telah membahas terkait teori unitas dan pluralitas, seperti Ibn Sina dan Ibn Arabi. Ibn Sina merupakan tokoh peripatetik. Pandangan Filsafat Peripatetik mengatakan bahwa dasar bagi seluruh keberadaan yang ada di alam eksternal yaitu wujud. Wujud yang ada di luar merupakan wujud yang beragam, dan tidak memiliki kesamaan satu sama lain. Artinya, wujud satu dengan wujud yang lainnya berbeda secara totalitas (*diversity*) atau wujud satu dengan wujud yang lainnya berpisah satu sama lain. Posisi wujud kata Ibn Sina, berada di luar akal (sifatnya eksternal), sedangkan esensi itu berada di dalam mental (sifatnya internal)¹⁶. Hal ini dapat dipahami bahwa filsafat Peripatetik meyakini dasar bagi seluruh keberadaan adalah wujud. Artinya keberagaman yang terlihat di realitas eksternal itu adalah wujud, karena keberagaman di realitas eksternal itu didasari oleh wujud itu sendiri. Bahwa tanpa adanya wujud, maka keberagaman di realitas eksternal niscaya tiada.

Namun, perlu diketahui lebih jauh bahwa dalam pandangan Peripatetik, kesatuan (*unitas*) wujud itu hasil abstraksi entitas dari alam eksternal. Ada pun kesatuan di alam eksternal itu berada di alam mental¹⁷, sedangkan keberagaman berada di luar, yaitu bersifat eksternal. Pandangan ini tentu saja dipahami demikian karena para filsuf Peripatetik cenderung mendasari filsafatnya pada mahiyah.

Seperti yang dapat diketahui bahwa kuiditas itu hanya berada di dalam mental, tak lain dari pada hasil abstraksi mental itu sendiri. Adapun yang berhubungan dengan realitas eksternal yaitu

¹⁶ Mardani, *Pendidikan Agama Islam Untuk Perguruan Tinggi*, (Depok: Kencana, 2017), hal. 161

¹⁷ Muhammad Nur Jabir, *Wahdah Al-Wujud Ibn Arabi dan Filsafat Wujud Mulla Sadra*, hal. 24

eksistensi, dan realitas eksistensi di eksternal hanya eksistensi yang berdiri secara independen tanpa ada aspek kesamaannya.

Dalam pandangan Peripatetik ini, dapat disimpulkan bahwa kesatuan wujud itu berada di alam mental, sedangkan keberagaman wujud itu berada di alam eksternal. Wujud yang dimaksud di sini adalah yang melandasi semua realitas, entah itu riil maupun abstrak¹⁸, namun dalam kesatuannya hanya ada dalam mental semata, sedang dalam realitas eksternal tidak kesatuan melainkan plural. Maka, kesimpulan dalam pandangan filsafat Peripatetik menetapkan empat prinsip utama dalam pokok pemikirannya, antara lain: (1) segala wujud bersifat fundamental; (2) segala wujud berbeda satu sama lain secara zat; (3) segala wujud mempunyai kesatuan hanya berada di alam mental; (4) hasil abstraksi mental itu ketika kita predikatkan pada entitas alam eksternal, maka bersifat gradasi seperti kuat dan lemah¹⁹.

Sementara itu, pandangan filsafat Peripatetik mengatakan bahwa wujud itu beragam di realitas eksternal secara hakiki, dan kesatuannya terdapat di alam mental yaitu tidak hakiki. Ketika dikatakan wujud berbeda, maka dari perbedaan itu akan menimbulkan keberagaman, ketidaksamaan, keberlainan, dan keberlainan timbul dari dua eksistensi. Sedangkan selain wujud adalah ketiadaan²⁰. Jadi, ketika eksistensi itu lebih dari satu, maka konsekuensinya, diantara salah satu ada yang eksis (ada) dan ada yang tidak eksis (tiada). Maka dari itu hanya wujudlah yang ada atau tidak ada selain wujud.

Selanjutnya, Ibn Arabi sebagai tokoh memiliki sumbangsih yang sangat besar terhadap penyebaran konsep *wahdah al-wujūd*, meskipun secara langsung dalam karya beliau tidak ditemukan sama sekali konsep itu. Akan tetapi hasil penafsiran karya beliau yaitu *Fhusūs Hikām* oleh Jandi, Qasyani, Qaishari, Haidar Amuli, akan

¹⁸ Haidar Bagir, *Buku Saku Filsafat Islam*, hal. 175

¹⁹ Muhammad Nur Jabir, *Wahdah Al-Wujud Ibn Arabi dan Filsafat Wujud Mulla Sadra*, hal. 25

²⁰ Hasan A.A, *Logika dan Filsafat*, hal. 38

ditemukan dengan jelas pemikiran Ibn Arabi dilandasi oleh prinsip *wahdah al-wujūd*.²¹

Para kaum urafa berpandangan bahwa wujud itu hanya dinisbahkan pada Al-Haqq. Artinya bahwa selain dari wujud Al-Haqq semuanya selain dia adalah bayang-bayang saja, biasa disebut fatamorgana atau manifestasi. Dalam pandangan irfan, wujud adalah “*lā bi syart maqsami*”. Maksud wujud dalam pengertian ini adalah wujud tidak terbatas dengan batasan apapun. Bahkan kata mutlak tidak tepat dinisbahkan kepadanya. Sebab, mutlak itu juga terbatas dengan kemutlakannya.²²

Pada dasarnya *wahdah al-wujūd* berpandangan bahwa satu-satunya yang ada di alam semesta yaitu Al-Haqq. Sedangkan manusia, dunia dan seluruh fenomena yang ada dalam prinsip ini sebenarnya tidak ada.²³ Yang dimaksud dalam pandangan ini bahwa realitas eksistensi itu hanya satu. Ketika realitas eksistensi itu hanya satu, maka meniscayakan tidak ada realitas yang beragam. Karena pandangan ini menganggap bahwa realitas itu hanya satu, sehingga keberagaman seperti manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan dan lain-lain dianggap tiada.

Sebagian kaum urafa meyakini konsep *wahdah al-wujūd*, merupakan puncak dari ketauhidan. Tetapi, kaum teolog dan fuqaha menyalapahami konsep *wahdah al-wujūd* sebagaimana paham panteisme. Bahwa segalanya adalah Tuhan. Konsekuensi dari pemahaman kaum teolog dan fuqaha terhadap konsep *wahdah al-wujūd* ini yaitu menyamakan Tuhan dengan makhluknya. Dan seharusnya yang dimaksud dalam *wahdah al-wujūd*, tidak seperti yang dipahami oleh kaum teolog dan kaum fuqaha terhadap konsep *wahdah al-wujūd* itu sendiri.

Ketika kita merujuk pada pandangan kaum urafa yang mengatakan bahwa wujud itu hanya dinisbahkan pada Al-Haqq.

²¹ Muhammad Nur Jabir, *Wahdah Al-Wujud Ibn Arabi dan Filsafat Wujud Mulla Sadra*, hal. 3

²² Muhammad Nur Jabir, *Wahdah Al-Wujud Ibn Arabi dan Filsafat Wujud Mulla Sadra*, hal. 4

²³ Haidar Bagir, *Buku Saku Tasawuf*, hal. 157-158

Maka Melahirkan konsekuensi yaitu menafikkan realitas eksistensi selain dari Al-Haqq seperti manusia, dan eksistensi realitas lainnya. Salah satu filsuf misalkan Murtadha Muthahhari juga merespon konsep *wahdah al-wujūd* yang diyakin oleh kaum arif. Murtadha Muthahhari mengatakan:

“Tidak mungkin realitas eksternal hanya terdiri dari satu realitas semata. Mental kita dengan jelas mengabstraksikan kuititas-kuititas yang berbeda-beda dari realitas yang satu tersebut. Jika wujud sebagai satu-satunya realitas hakiki itu hanya satu, maka beragam konsep inderawi dan ‘*aqli* (yang dipersepsi melalui akal tidak memiliki aspek relasi (*jehat*). Oleh karena itu menerima konsep *wahdah al-wujūd*, melazimkan penafian atas persepsi inderawi, ‘*aqli*, dan mengingkari salah satu konsep yang paling badihi yang ada”.²⁴

Dalam hal ini, salah satu filsuf Islam kontemporer yaitu Muhammad Taqi Misbah Yazdi meyakini bahwa antara metode filsafat dan irfan memiliki metode yang berbeda. Artinya bahwa ranah filsafat berada dalam ruang lingkup ilmu *hushūli*, sedangkan irfan berada dalam metode ilmu *hudhūri*. Filsafat berjalan dengan rasionalitasnya, sedangkan irfan berangkat dengan kalbunya.²⁵ Telah dikatakan tadi bahwa irfan ini berada dalam ruang lingkup ilmu *hudhūri*. Ketika demikian, jelas bahwa irfan ini sebuah pembahasan yang tidak berada di ranah konsep, dan proposisi.

Pada dasarnya konsep kesatuan (*wahdah al-wujūd*) Ibn Arabi meyakini bahwa wujud pada hakikatnya adalah tunggal. Sedangkan adanya perbedaan antara zat dan hal hanya perbedaan relatif. Apabila kita melihat wujud beragam, semacam bentuk, sifat, jenis, dan warna, hal itu karena kita menggunakan alat indera dan akal semata . peran akal dan indera ini menangkap kesemestaan ini adalah wujud yang beragam, tetapi kaum arif menangkap semua itu

²⁴ Muhammad Nur Jabir, *Wahdah Al-Wujud Ibn Arabi dan Filsafat Wujud Mulla Sadra*, hal. 5

²⁵ Muhammad Nur Jabir, *Wahdah Al-Wujud Ibn Arabi dan Filsafat Wujud Mulla Sadra*, hal. 6

berdasarkan rasa, maka dari itu menurutnya alam semesta ini, satu wujud yaitu Al-Haqq.²⁶

Tadi sempat dijelaskan bahwa para kaum teolog dan fuqaha menuding prinsip *wahdah al-wujūd* bahwa segalanya adalah Tuhan. Dan seharusnya yang dimaksud dalam *wahdah al-wujūd*, tidak seperti yang dipahami oleh kaum teolog dan kaum fuqaha terhadap konsep *wahdah al-wujud* itu sendiri bahwa segalanya adalah Tuhan. Perlu dipahami bahwa sebenarnya pandangan ini (*wahdah al-wujūd*), tidak bermaksud bahwa sesuatu yang bukan Al-Haqq misalkan manusia sama dengan Al-Haqq itu sendiri. Ketika ini yang dipahami seseorang tentang kesatuan wujud itu, maka seperti yang dikatakan tadi bahwa *wahdah al-wujūd* mempunyai implikasi identik dengan pandangan panteisme, sedangkan pandangan *Wahdah al-wujūd* tidaklah seperti itu, sebagaimana telah dijelaskan tadi bahwa pandangan ini mengakui eksistensi itu hanya satu, bahkan menolak wujud itu beragam. Sehingga ketika dikatakan *Wahdah al-wujūd* itu menganggap bahwa semua yang ada di realitas eksternal ini adalah Tuhan, kurang tepat ketika dipahami seperti itu sebab dalam pandangan ini hanya mengakui realitas itu hanya satu. Maka dari itu tidak tepat ketika pandangan ini disamakan dengan pandangan panteisme. *Wahdah al-wujūd* ini mungkin lebih tepat dipahami sebagai tauhid eksistensial atau tauhid wujud.²⁷

Adapun paradoks dalam pandangan ini yaitu menganggap bahwa realitas eksistensi itu hanya satu bahwa adanya penfian terhadap realitas nyata beragama di alam eksternal ini. Sebagaimana yang telah dikatakan Murtadha Muthahhari di kutipan sebelumnya bahwa “tidak mungkin realitas eksternal hanya terdiri dari satu realitas semata. Mental kita dengan jelas mengabstraksikan kuitas-kuitas yang berbeda-beda dari realitas yang satu tersebut. Jika wujud sebagai satu-satunya realitas hakiki itu hanya satu, maka beragam konsep inderawi dan ‘*aqli* (yang dipersepsi melalui akal tidak memiliki aspek relasi (*jehat*). Oleh karena itu menerima

²⁶ Shoki Huda, *Tasawwuf Kultural: Fenomena Shalawat Wahidiyah*, (Yogyakarta: LKiS, 2008), hal. 48

²⁷ Haidar Bagir, *Buku Saku Tasawuf*, hal. 158

konsep *wahdah al-wujud*, melazimkan penafian atas persepsi inderawi, ‘*aqli*, dan mengingkari salah satu konsep yang paling badihi yang ada”.

Mulla Sadra dikenal sebagai penggagas filsafat *Hikmah Muta’aliyah*, dengan membangun prinsip filsafatnya dengan fundamental wujud (*ashālah al-wujūd*). Secara adanya filsafat Peripatetik lebih dulu ada, juga mempunyai pandangan bahwa yang mendasari keberadaan realitas eksternal adalah wujud. Hanya saja pada masa itu belum ada bab khusus yang menjelaskan mengenai prinsip fundamental wujud ini. Dalam filsafat *Hikmah Muta’aliyah* telah tersedia pembahasan khusus *ashālah al-wujūd* yaitu prinsip filsafat tahap pertama Mulla Sadra dengan tema *ashālah al-wujūd, wa al- i’tibāri al-māhiyah*. Prinsip *ashālah al-wujūd, wa al- i’tibāri al-māhiyah* merupakan prinsip dasar ontologi yang paling utama dikemukakan oleh Mulla Sadra. Artinya bahwa beberapa prinsip filsafat Mulla Sadra akan bersandar pada prinsip ini.²⁸

Mengenai fondasionalitas eksistensi dan kei’tibariyahan mahiyah (*ashālah al-wujūd, wa al- i’tibāri al-māhiyah*) terdapat ikatan yang kuat antara hukum konsep atau pemahaman (*mafhum*) eksistensi dengan hukum realitas (*misdaq*) eksistensi. Ikatan ini termanifestasi dalam keterhubungan antar keduanya. Persoalan atau pembicaraan wujud mengenai kebadhiannya, wujud *musytarak maknawi*, wujud menambahi mahiyah (mempredikasikan mahiyah), merupakan hukum-hukum atau ketentuan konsep wujud (*mafhum al-wujūd*). Sementara pembicaraan mengenai *ashālah al-wujūd, wa al- i’tibāri al-māhiyah* merupakan hukum *misdāq al-wujūd*. Untuk mendapatkan kejelasan mengenai hukum *misdāq* wujud ini, yakni mengenai *ashālah al-wujūd, wa al- i’tibāri al-māhiyah*, perlu memperjelas maksud dari kata-kata yang menyusun hukum tersebut, yakni apa yang dimaksud dengan wujud, mahiyah, *ashālah* dan *i’tibāri*. Kata wujud yang dimaksud dalam hukum *misdāq* wujud ini adalah “wujud rill yang tersusun darinya realitas eksternal”. Dengan

²⁸ Kholid Al-Walid, *Perjalanan Jiwa Menuju Akhirat Filsafat Eskatologi Mulla Sadra*, hal. 34

kata lain, yang dimaksud dengan wujud dalam pengertian ini adalah *misdāq* dari *mafhūm* wujud tersebut. Sementara yang dimaksudkan dengan *mahiyah* dalam pembicaraan ini adalah jawaban dari pertanyaan “apa itu”. Dengan kata lain, *māhiyah* yang dimaksudkan adalah *misdāq*-nya, seperti manusia, cangkir, gelas, air dan sebagainya, bukan *mafhūm* atau konsep dari suatu mahiyah.

Adapun yang dimaksud dengan *ashālah* dalam pengertian ini adalah yang menjelma atau nyata di luar yang menjadi sumber dari segala efek yang bersifat eksternal. Sementara yang dimaksudkan dengan *i'tibār* adalah sebaliknya, yaitu yang tidak menjelma atau nyata di luar dan karena itu bukan atau tidak bisa menjadi sumber bagi efek-efek eksternal.

Jika dikatakan bahwa “wujud itu *ashīl*”, maka maksudnya adalah yang menjelma dan nyata sebenarnya di luar, serta mengeluarkan efek-efek eksternal adalah wujud, bukan *mahiyah*. Jika dikatakan bahwa “mahiyah (kuiditas) itu yang *ashīl*”, maka maksudnya adalah yang menjelma dan nyata sebenarnya di luar dan menjadi sumber dari segala efek adalah *mahiyah*, yakni manusia, pohon dan sebagainya, bukan wujud.

Jika kita melihat proposisi ini misalnya “manusia ada”, “kuda ada” dan seterusnya, maka akal kita memperoleh dua konsep, pertama konsep “kuda, manusia”, dan konsep kedua adalah konsep ada “wujud”. Sementara jika kita melihat kenyataan di luar, maka tidak terdapat dualisme (*wujud-mahiyah*), melainkan sesuatu yang satu, yang merupakan sumber bagi efek-efek. Sejauh ini, muncul pertanyaan, kenyataan yang satu yang menjelma dan nyata tersebut dan menjadi sumber segala efek tersebut, apakah “wujud” atau “mahiyah”, ataukah keduanya (wujud dan mahiah), atau bukan kedua-duanya.

Bagi penganut *ashālah al-wujūd*, yang nyata dan menjelma serta menjadi sumber efek adalah *wujud* (*wujud*-lah yang *ashīl*). Adapun argumentasinya didasarkan pada proposisi²⁹ bahwa:

²⁹ Ali bin Haj Abdullah al-'Ubud, *Muhādarat Tamhīdīyah fī al-Falsafah*, (Wafa: Baqiyat, 2008), hal. 49-53

1. *Mahiyah-mahiyah* adalah sumber keragaman dan perbedaan (Rumah, Mobil, laptop dan lain-lainnya)
2. Wujud dipredikasikan pada *mahiyah* “Rumah (subjek) ada (predikat)”, “Mobil (subjek) ada (predikat)”, dan seterusnya.
3. Setiap predikasi harus memenuhi ketentuan berikut (hukum predikasi), yakni sah atau benarnya suatu predikasi bergantung pada dua ketentuan: *pertama* adanya kesatuan (*ittihad*) antara predikat (*mahmul*) dan subjek (*maudhu'*), sebab suatu predikasi tidak bisa sah dan tidak bisa berlaku pada sesuatu yang berbeda pada yang berbeda misalnya “Rumah itu Mobil”. Hukum *kedua*, adanya perbedaan antara predikat dengan subjeknya, sebab tidak mungkin membuat suatu predikasi (subjek-predikat) sementara tidak ada sisi perbedaan diantara keduanya misalnya “Rumah itu Rumah”.
4. Premis kedua diatas (yakni wujud dipredikatkan pada *mahiyah*) bisa terwujud (terbentuk) tentu karena atau oleh *mahiyah*, yang didasarkan pada premis pertama (yakni *mahiyah* adalah sumber keragaman dan perbedaan). Adapun premis pertama (*mahiyah* adalah sumber keragaman dan perbedaan) bisa terealisasi atau terwujud atau benar jika bersumber dari atau berdasar pada: kemungkinan pertama *mahiyah*, kemungkinan kedua ‘adam (ketiadaan), dan kemungkinan ketiga ada (wujud). Jika kemungkinan pertama dan kedua; yakni *mahiyah* dan ketiadaan, dijadikan sebagai landasan bagi terealisasinya atau benarnya premis pertama (*mahiyah* adalah sumber keragaman dan perbedaan), tentu ini bathil (tidak sah). Karena itu, kemungkinan terakhirlah atau yang ketigalah yang menjadi landasan bagi benarnya premis pertama.
5. Karena itu, wujudlah yang menjadi pondasi dan asal dan yang nyata serta menjelma dan menjadi sumber dari segala efek. Dengan kata lain “wujud *ashīl*, sementara *mahiyah* itu *i'tibāry*.”

Maka dari itu prinsip fundamental wujud mengatakan bahwa yang merupakan dasar dari realitas eksternal adalah wujud. Dalam pandangan Mulla Sadra mengatakan bahwa meskipun pemahaman

wujud hasil abstraksi mental, tapi pemahaman tentang wujud juga berkaitan langsung dengan entitas-entitas yang ada di luar. Artinya bahwa kita bisa menyaksikan secara objektif tanpa perantara sama sekali. Ketika seperti ini berarti kesatuan itu secara otomatis kesatuan itu bukan hanya eksis di alam mental seperti yang dikatakan Ibn Sina, tetapi juga eksis di alam eksternal. Maka dari itu bukan hanya keberagaman yang eksis di alam eksternal, tapi kesatuan itu juga eksis di alam eksternal. Kesatuan yang dimaksud disini kata Mulla Sadra yaitu kesatuan yang bisa bersatu dengan pluralitas³⁰.

Kalau kesatuan dan keberagaman sama-sama bersifat hakiki. Artinya bahwa kesatuan (unitas) dan keragaman (pluralitas) bersifat hakiki, maka sangat berbeda dengan apa yang dipahami oleh kaum Peripatetik yang mengatakan bahwa keberagaman itu nyata di alam eksternal, tapi kesatuan itu hanya berada di alam mental.

Berdasarkan ketiga pandangan di atas yakni Ibn Sina, Ibn Arabi dan Mulla Sadra berbicara kesatuan dan keberagaman realitas wujud, dapat dipastikan bahwa pandangan yang tepat untuk mengkaji *Bhinneka Tunggal Ika* adalah pandangan kesatuan dan keberagaman realitas wujud Mulla Sadra. Sebab ketiganya mengandung konsekuensi yang berbeda-beda. Kalau pandangan Ibn Sina mengatakan bahwa kesatuan hanya eksis di dalam mental, dan keberagaman eksis di luar eksternal, maka konsekuensi yang terkandung dalam pemahaman ini, jelas bahwa kesatuan itu tidak hakiki, sebab kesatuan itu hanya berada dalam mental saja. Ibn Arabi mengatakan bahwa realitas itu tidak beragam melain realitas itu cuma satu. Kedua pandangan sebelumnya berbeda dengan pandangan Mulla Sadra yang mengatakan bahwa keberagaman dan kesatuan itu hakiki di luar eksternal. Maka dari itu, telah dikatakan sebelumnya bahwa teori kesatuan dan keberagaman wujud Mulla Sadralah yang paling tepat untuk menganalisis persoalan *Bhinneka Tunggal Ika* ini. Kenapa dikatakan bahwa pandangan teori wujud

³⁰ Muhammad Nur Jabir, *Wahdah Al-Wujud Ibn Arabi dan Filsafat Wujud Mulla Sadra*, hal. 26-27.

Mulla Sadralah yang tepat dalam penelitian ini, karena dengan mengembalikan perdebatan kebhinnekaan dalam konteks kesepakatan yaitu *Bhinneka Tunggal Ika* kurang member solusi bagi konflik yang sering terjadi di Indonesia ini. Mau tidak mau permasalahan ini tentu butuh solusi selain dari hanya sekedar kesepakatan itu yakni harus memandang keberagaman itu secara eksistensi. Artinya bahwa keberagaman pun itu adalah eksistensi.

Dalam pandangan Mulla Sadra telah dijelaskan tadi bahwa kesatuan dan keberaaman itu bersifat hakiki di alam eksternal. Berbeda dengan kedua pandangan yakni Ibn Sina dan Ibn Arabi. Pandangan fundamental wujud yang dianut oleh Mulla Sadra, berbicara aspek persamaan dan aspek perbedaan sudah pasti yang mendasari wujud itu sendiri. Juga dijelaskan bahwa wujud adalah satu hakikat namun bertingkat. Artinya bahwa apapun yang membedakan wujud satu dengan wujud yang lainnya, maka hal itu tidak mungkin disebabkan oleh selain dari wujud itu sendiri. Sebab tidak mungkin perbedaan itu di luar wujud. yang ada di luar wujud itu hanyalah ketiadaan.³¹ Maka dari itu adanya aspek persamaan dan aspek perbedaan akan kembali ke hakikat wujud itu, karena tidak ada sesuatu yang lain selain wujud itu sendiri.³² sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya yakni tanpa wujud yang mendasar, berarti ada dua kemungkinan yang mendasari keberadaan yaitu ketiadaan dan kuitas. Sedangkan keduanya sudah jelas tidak bisa dijadikan dasar keberadaan.

Abdullah Jawadi Amuli menjelaskan bahwa ada beberapa unsur penting yang harus diperhatikan dalam gradasi yang dimaksud dalam pandangan Mulla Sadra³³.

1. Pluralitas wujud adalah hakiki.
2. Unitas wujud adalah hakiki.

³¹ Hasan. A.A, *Ringkasan Logika Muslim Sebuah Analisa Definisi, Logika dan Filsafat*, hal. 38.

³² Muhammad Nur Jabir, *Wahdah Al-Wujud Ibn Arabi dan Filsafat Wujud Mulla Sadra*, hal. 27.

³³ Muhammad Nur Jabir, *Wahdah Al-Wujud Ibn Arabi dan Filsafat Wujud Mulla Sadra*, hal. 27.

3. Pluralitas akan kembali ke unitas.
4. Unitas mengalir dalam pluralitas.

Prinsip gradasi wujud ini salah satu prinsip yang terkandung dalam filsafat *al-Hikmah al-Muta'aliyyah* Mulla Sadra, yaitu menjelaskan tentang ketunggalan dan keragaman wujud, bahwasanya:

Dalam prinsip ini dijelaskan bahwa keberagaman wujud merupakan gambaran wujud tunggal yang memiliki gradasi yang berbeda. Yang dimaksud berbeda disini adalah tingkat kualitas yang ada pada wujud itu sendiri. Maka dari itu wujud mengandung dua sifat pada saat yang bersamaan yaitu ketunggalan (univok) dan pluralitas (ekivok), Mulla Sadra memberikan istilah "Pluralitas dalam ketunggalan dan ketunggalan dalam pluralitas (*al-Katsrah fi aynil Wahdah wal-Wahdah fi aynil Katsrah*)³⁴.

Mulla Sadra dengan pandangan prinsip gradasi wujud, tentu tidak muncul begitu saja. Melainkan pandangan gradasi wujud Mulla Sadra ini terinspirasi dari Suhrawardi. Tapi, Suhrawardi menjelaskannya dengan hakikat cahaya, sedangkan Mulla Sadra menjelaskannya dengan hakikat wujud. Maka dari itu Mulla Sadra berusaha mengargumentasikan prinsip ini, sekaligus menjadikan prinsip ini sangat penting yang banyak menyelesaikan masalah dalam persoalan penting dalam filsafat.³⁵

Terkait hal itu, Muhammad Husein Thabatabai juga mengemukakan bahwasanya:

Para penganut *ashālah al-wujūd*, sebagian berpendapat bahwa wujud itu merupakan hakikat tunggal yang bergradasi, seperti halnya cahaya yang tunggal hakikatnya adalah terang dengan sendirinya, dan menerangi yang lain, yang terdapat pada tingkatan-tingkatan cahaya. Cahaya yang kuat adalah kuat pada cahayanya itu, dan cahaya yang lemah yaitu lemah pada kecahayaannya. Jadi, kuat dan lemah bukanlah yang menyusun cahaya itu, dan bukan pula

³⁴ Kholid Al-Walid, *Perjalanan Jiwa Menuju Akhirat Filsafat Eskatologi Mulla Sadra*, hal. 37-38.

³⁵ Muhammad Nur Jabir, *Wahdah Al-Wujud Ibn Arabi dan Filsafat Wujud Mulla Sadra*, hal. 68.

aksiden yang bersiat eksternal, melainkan yang menyusunnya adalah cahaya itu sendiri. Demikian pula halnya dengan wujud yang memiliki satu hakikat, namun memiliki gradasi berbeda-beda seperti kuat dan lemahnya dan duluan dan keterbelakangannya dan seterusnya³⁶.

Untuk menjelaskan konsep unitas dan pluralitas wujud ini lebih sederhana lagi, perhatikan penjelasan berikut:

Mulla Sadra memakai perumpamaan cahaya, seperti halnya dengan Suhrawardi menjelaskan realitas kuintitas. Bagi Mulla Sadra wujud beragam itu seperti hanya dengan level cahaya. Misalnya diasumsikan bahwa sumber cahaya adalah X yang memiliki pancaran cahaya hingga 100 meter. Jika cahaya 100 meter tersebut dibandingkan dengan cahaya 50 meter, dari sumber cahaya, maka cahaya yang berjarak 50 meter lebih terang dibandingkan dengan sinar cahaya berjarak 100 meter dari sumber cahaya. Begitupun seterusnya cahaya yang berjarak 25 meter dari sumber cahaya lebih terang dibandingkan sinar cahaya yang berjarak 35 meter dari sumber cahaya. Semakin dekat dari sumber cahaya maka cahaya tersebut akan semakin terang. Dan semakin jauh dari sumber cahaya maka cahaya pun akan semakin gelap³⁷.

Berdasarkan analogi tersebut bahwa yang menjadi pembeda antara cahaya satu dengan cahaya lainnya itu kualitas cahayanya yaitu terang, kurang terang, dan gelap. Sedangkan kesamaannya yaitu sama-sama cahaya. Artinya bahwa tidak ada perbedaan mutlak yang terdapat pada cahaya tersebut sebab semuanya adalah cahaya, dan yang membedakannya adalah kekuatan dan kelemahan dari cahaya tersebut.

Dalam pembahasan ketunggalan dan pluralitas wujud, tentu tidak berangkat dari ruang yang kosong. Tentu ada yang mengawali perdebatan ini sehingga teori ini pun muncul. Ketika dikatakan bahwa realitas itu hanya satu, lalu bagaimana dengan realitas-realitas yang ada di alam eksternal begitu nyata beragam seperti manusia, pohon, batu, dan lain-lain. Ketika dikatakan bahwa realitas

³⁶ Sayid Muhammad Husein Thabathabai, *Bidayah al-Hikmah*, hal. 17-18.

³⁷ Muhammad Nur Jabir, *Wahdah Al-Wujud Ibn Arabi dan Filsafat Wujud Mulla Sadra*, hal. 28-29.

itu beragam, lalu bagaimana dengan konsep yang kita pahami bermakna umum yang dipahami melalui seluruh realitas tersebut dalam benak kita ? berawal dari masalah inilah sehingga muncul perdebatan mengenai ketunggal dan keberagaman wujud.

E. *Tasykīk Al-Wujūd*

Tasykīk al-Wujūd merupakan sebuah realitas wujud yang bergradasi berdasarkan pada tingkatan atau emanasi wujud. Mengapa dipahami demikian? Karena, ketika kita memahami pertama kali makna wujud, telah kita pertimbangkan bahwa (wujud memiliki makna) satu, sedangkan ketika kita melihat realitas eksternal, kita memahaminya beragam. Maka, kita telah memahaminya sebagai gradasi wujud di dalam pengertiannya sebagai univokal (*isytirāk ma'nawī*)³⁸ yang memiliki makna satu. Hal ini sebagaimana yang dikemukakan oleh Allamah Thabatabai bahwa 'wujud pada hakikatnya adalah satu sekaligus bergradasi (*tasykīk*). Sebab jika (dipahami) demikian, jika saling berbeda secara esensial, maka akan meniscayakan adanya keberagaman pada konsep wujud itu sendiri³⁹, sedangkan tidak ada sesuatu selain wujud melainkan wujud itu sendiri seperti yang telah dijelaskan sebelumnya.

Maka, sebelum kita membahas gradasi wujud terlalu jauh, sebaiknya kita mengetahui gradasi dalam sebuah entitas terlebih dahulu yakni gradasi entitas memiliki dua pengertian⁴⁰, yaitu:

1. Aspek persamaan dan aspek perbedaan itu dapat diberikan contoh seperti cahaya yang berjarak 50 meter dari sumber cahaya dan cahaya yang berjarak 12 meter dari sumber cahaya. Seketika itu juga kita bisa mengetahui dari sisi kesamaan dan sisi perbedaannya. Kesamaannya dari sisi cahaya, juga perbedaannya dari sisi cahaya. Sisi perbedaannya terdapat pada kualitas cahayanya dan persamaannya yaitu sama-sama cahaya.

³⁸ Abdul Jabbar Ar-Rifāi, *Mabādī al-Falsafah al-Islamiyyah*, (Beirut: Dār al-Hādī li at-Tabā'ah wa an-Nasyr wa at-Tauzī', 2001), Jilid 1, hal. 218

³⁹ Sayyid Muhammad Husein Thabatabai, *Bidāyah al-Hikmah*, hal. 19

⁴⁰ Muhammad Nur Jabir, *Wahdah Al-Wujud Ibn Arabi dan Filsafat Wujud Mulla Sadra*, hal. 69.

- Sehingga dalam persoalan ini kita bisa mengatakan bahwa perbedaan dan persamaannya terletak pada cahaya.
2. Satu entitas yang memiliki *misdaq*, atau objek acuan yang berbeda-beda, tetapi perbedaannya pada kualitasnya. Perbedaan yang dimaksud disini bukanlah perbedaan secara totalitas yaitu entitas satu dengan entitas yang lainnya tidak memiliki hubungan sama sekali. Tetapi, seperti yang dijelaskan sebelumnya di poin satu bahwa perbedaannya itu terletak pada kualitas lemah dan kuatnya terdapat pada cahaya. Sisi kesamaan terdapat pada cahaya, dan sisi perbedaannya terdapat pada kualitas lemah dan kuatnya cahaya.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat dipahami bahwa gradasi itu sangat bertentangan dengan makna *diversity* (*tabayun*) sebab ketika ada keberagaman entitas yang berbeda secara totalitas, dapat dipastikan bahwa entitas satu dengan entitas lainnya tidak memiliki hubungan sama sekali, sehingga melazimkan tidak ada aspek kesamaan dan kesatuannya. Sedangkan dalam gradasi melazimkan aspek kesamaan. Begitu juga ketika dikatakan bahwa entitas itu tunggal secara hakiki. Ketika ketunggalan itu secara hakiki, maka sudah pasti tidak ada aspek perbedaannya. Sedangkan dalam gradasi wujud, sangat membutuhkan keduanya yakni aspek kesamaan dan aspek perbedaan.

Di samping itu, dalam persoalan gradasi, kuintitas tidak termasuk di dalamnya⁴¹. Sebab berbicara tentang kuintitas, tidak memiliki kesamaan di dalamnya, berbeda secara totalitas atau *diversity*. Maka dari itu, yang berhubungan dengan gradasi hanyalah wujud⁴², sebab wujud merupakan realitas satu-satunya⁴³, sehingga segala realitas yang ada dilandasi dengan wujud itu sendiri dengan berbagai tingkatan-tingkatan yang terdapat di dalamnya.

Oleh sebab itu, terdapat empat karakteristik sehingga gradasi tersebut bisa terjadi, yaitu: (1) kesatuan wujud adalah aktual; (2)

⁴¹ Syaifan Nur, *Filsafat Hikmah Mulla Shadra*, (Yogyakarta: RausyanFikr Institute, 2012), hal. 182

⁴² Muhammad Nur Jabir, *Wahdah Al-Wujud Ibn Arabi dan Filsafat Wujud Mulla Sadra*, hal. 70-71

⁴³ Fazlur Rahman, *Filsafat Shadra*, (Bandung: Pustaka, 2000), hal. 46

pluralitas wujud adalah aktual; (3) pluralitas akan kembali kepada kesatuan; (4) kesatuan mengalir dalam pluralitas⁴⁴. Ke empat karakteristik tersebut dipahami sebagai sebuah kemendasaran bagi wujud itu sendiri, entah dalam permulaannya maupun akhir dari tujuan gerak yang menyertai kesempurnaannya. Maka dari empat karakteristik tersebut, Fazlur Rahmman juga menjelaskan bahwa:

(1) Wujud dalam segala sesuatu, dalam satu pengertian, pada dasarnya adalah sama; sebaliknya, jika ada perbedaan yang mencolok antara benda-benda dalam titik wujud, maka istilah “wujud” sama sekali tidak mempunyai makna yang sama dan tidak menjadi ambigu atau analog, tetapi perbedaan yang mencolok; (2) Wujud karena sama, bahkan menciptakan perbedaan-perbedaan mendasar yang membuat setiap *maujud* unik; (3) Berkat gerak subtansi dalam wujud, semua bentuk wujud yang lebih rendah dikandung dalam, dan dilampaui oleh bentuk-bentuk yang lebih tinggi⁴⁵.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka gradasi itu hanya melazimkan kesatuan dan pluralitas wujud keduanya harus aktual. Karena kalau tidak ada kesatuan maka yang eksis hanya keberagaman (pluralitas). Begitu pun sebaliknya ketika kesatuan saja yang eksis, maka keberagaman (pluralitas) itu tidak ada. Ketika keberagaman itu tidak ada, niscaya perbedaan pun tidak akan ada. Maka dari itu, mesti kesatuan dan keberagaman ada secara aktual sehingga gradasi bisa terjadi. Maka dari itu persamaan dan perbedaan harus dikembalikan pada aspek yang satu yaitu wujud. Ketika bukan wujud, maka persoalan ini akan dikembalikan kepada sesuatu yang bukan wujud. sedangkan sesuatu selain wujud itu hanyalah kuintas dan ketiadaan. Sedangkan keduanya tidak bisa dijadikan pijakan. Kenapa tidak bisa dijadikan pijakan? Sebab kuintas hanya menempel pada wujud, sedangkan ketiadaan sudah niscaya tiada. Maka dari itu persamaan dan perbedaan disebabkan oleh wujud itu, akan kembali kepada kesatuan. Pluralitas atau

⁴⁴ Muhammad Nur Jabir, *Wahdah Al-Wujud Ibn Arabi dan Filsafat Wujud Mulla Sadra*, hal.71

⁴⁵ Fazlur Rahman, *Filsafat Shadra*, hal. 48-49

perbedaan akan kembali kepada kesatuan, secara otomatis kesatuan akan mengalir dalam keberagaman (pluralitas), sehingga perbedaan itu hanya berada pada kualitas bukan pada wilayah hakikat⁴⁶, jawabannya terletak pada prinsip *tasykīk al-wujūd* yang merupakan dasar menjelaskan tentang menisme (ketunggalan) dan pluralisme (keberagaman)⁴⁷ yang ada.

Oleh sebab itu, untuk membuktikan adanya gradasi wujud (*tasykīk al-wujūd*), berikut ini akan diuraikan beberapa premis yang menjelaskan tentang argumentasi gradasi wujud⁴⁸, di antaranya:

1. *Premis pertama*, kita menyaksikan bahwa realitas eksternal terdiri dari beberapa realitas eksistensi, dan hal itu begitu jelas dengan sendirinya, juga tidak butuh dalil dan perantara untuk membuktikannya sebab dengan sendirinya sudah jelas.
2. *Premis Kedua*, wujud satu dan wujud yang lainnya secara esensi tidak memiliki perbedaan secara totalitas. Sebab ketika itu terjadi, maka akan meniscayakan wujud tunggal tanpa adanya aspek kesamaan satu sama lain, juga akan meniscayakan konsep wujud yang tunggal diabstraksikan dari wujud yang beragam tanpa ada aspek kesamaan diantara beragamnya wujud tersebut. ketika seperti itu, tidak mungkin bisa mengabstraksikan wujud yang satu kepada wujud yang beragam tanpa ada kesamaannya. Ketika itu terjadi pasti akan menyebabkan kontradiksi. Kenapa dikatakan menyebabkan kontradiksi? Karena bagaimana mungkin kita bisa mengatakan bahwa konsep wujud tunggal itu adalah keberagaman wujud-wujud di realitas eksternal, dan keberagaman wujud-wujud di realitas ekstenal adalah konsep wujud tunggal, sedangkan tidak ada aspek kesamaannya. Sama halnya dengan pluralitas bukan tunggal dan tunggal bukan pluralitas. Oleh karena itu, perbedaan wujud-wujud yang ada di realitas eksternal bukanlah perbedaan secara esensi atau berbeda secara totalitas. Tapi perbedaannya secara gradasi dalam satu hakikat yaitu eksistensi.

⁴⁶ Muhammad Nur Jabir, *Wahdah Al-Wujud Ibn Arabi dan Filsafat Wujud Mulla Sadra*, hal.71

⁴⁷ Syaifan Nur, *Filsafat Hikmah Mulla Shadra*, hal. 185

⁴⁸ Muhammad Nur Jabir, *Wahdah Al-Wujud Ibn Arabi dan Filsafat Wujud Mulla Sadra*, hal.72. Lihat juga Muhammad Taqi Misbah Yazdi, *Al-Manhāj Al-Jadīd fī Ta'lim Al-Falsafah*, (Beirut: Dār at-Ta'ārif li al-Matbū'āt, 2007), Jilid 1, hal. 369-372

3. Kita menyasikan di realitas eksternal bahwa ada wujud yang lebih kuat (sebab) dan ada wujud yang lebih lemah (akibat). Analogi seperti cahaya sebagai sumber, dan kualitas cahaya yaitu terang dan redupnya.

Berdasarkan ketiga premis yang sudah dijelaskan tersebut bahwa realitas eksternal itu memiliki hakikat yang tunggal. Hanya saja hakikatnya yang tunggal itu mengalami gradasi atau memiliki tingkatan yang berbeda-beda. Maksud dari realitas eksternal itu memiliki hakikat tunggal, bukan berarti hanya tunggal saja, tap juga secara bersamaan mengalami gradasi yang menjadi pembeda antara realitas-realitas di eksternal, seperti cahaya ada yang berada pada entitas kuat dan ada yang berada di entitas lemah. Tapi, kuat dan lemah secara bersamaan memiliki satu hakikat eksistensi yaitu cahaya.

Ketika kita sudah menerima fundamental wujud dari hasil pemikiran Mulla Sadra ini, maka secara otomatis kita akan mengatakan bahwa satu dan beragam itu tak lain dari pada wujud itu sendiri. Kenapa bisa dikatakan bahwa satu dan juga beragam adalah wujud? karena sesuai dengan prinsip fundamental wujud yang memiliki pandangan bahwa yang mendasari realitas-realitas di alam eksternal ini adalah wujud. Ketika semua adalah kemendasaran wujud, maka perbedaan dan kesatuan itu tidak lain dari wujud itu sendiri. Sudah pasti kita melihat perbedaan dan kesamaan atas kemendasaran wujud. ketika kita melihat persamaan dan perbedaan tanpa wujud, berarti kita melihatnya dengan kemendasaran bukan wujud atau keberadaan selain wujud yaitu kuintas dan ketiadaan.

Sudah dijelaskan sebelumnya bahwa kuintas dan ketiadaan tidak mungkin menjadi dasar keberadaan. Kenapa dikatakan bahwa kuintas tidak bisa menjadi landasan bagi keberadaan? karena atas keberadaannya pun dia bergantung pada yang ada yaitu wujud. Lalu kenapa ketiadaan dikatakan tidak bisa dijadikan dasar keberadaan? karena ketiadaan pun jelas akan ketiadaannya. Bagaimana bisa dikatakan dia bisa menjadi dasar keberadaan, sedangkan ketiadaan itu sendiri niscaya tiada.

Jadi sangat jelas perbedaan yang dikatakan oleh Ibn Sina yang mengakui bahwa keberagaman itu eksis di realitas eksistensial, sedangkan kesatuannya ada dalam mental. Yang dimaksud keberagaman eksis di realitas eksternal yaitu melihat wujud-wujud beragam dan tidak memiliki hubungan satu dengan yang lainnya atau menganggap keberagaman itu secara totalitas. Juga dikatakan oleh Ibn Arabi bahwa realitas itu hanya satu, dan tidak beragam. Ketika kita ingin melihat implikasi dari pandangan ini, berarti keberagaman itu tidak ada. Sedangkan sudah sangat jelas kita saksikan dan kita pahami bahwa keberagaman itu ada di realitas eksternal. Ketika dikatakan realitas itu hanya satu, maka akan menimbulkan kontradiksi. Kenapa dikatakan kontradiksi? Karena kita menerima serta mengetahui keberagaman itu tanpa perantara atau secara aksioma (*badihi*) juga jelas kita memiliki konsep yang beragam dalam benak kita. Selanjutnya ketika kita mengatakan bahwa realitas itu dikatakan beragam hanya di realitas eksternal, lalu bagaimana dengan keberagaman konsep terdapat di benak kita, juga merepresentasikan realitas eksternal seperti manusia pohon, hewan dan lain-lain. Kedua pandangan tersebut terlihat belum memberikan argumentasi secara rasional. Kenapa demikian? karena kedua pandangan tersebut mengargumentasikan eksistensi secara terbatas.

Tentu saja, di dalam pandangan Mulla Sadra, ia berusaha untuk menyatukan pandangan yang mengatakan bahwa realitas itu beragam, dan realitas itu satu. Sehingga dengan prinsip fundamental wujud hasil pemikiran murni dari beliau, mampu menyatukan kedua pandangan yang mengatakan wujud itu beragam dan wujud itu hanya satu. Sehingga dengan prinsip fundamental wujud ini dapat kita memahami beragam dan satu itu tidak lain dari wujud itu sendiri. Sehingga berdasarkan teori wujud Mulla Sadra dapat dipahami bahwa satu sekaligus beragam itulah wujud atau dikenal dengan istilah “pluralitas dalam ketunggalan dan ketunggalan dalam pluralitas” (*al-katsrah fī ‘aynīl wahdah wa al-wahdah fī aynīl*

Katsrah)⁴⁹. Dalam pengertiannya, *al-Katsrah fī ‘aynīl wahdah wal-Wahdah fī aynīl Katsrah* dipahami sebagai perkara-perkara yang bersifat tunggal, fundamental, yang merupakan hakikat ketunggalan yang memiliki tingkatan-tingkatan (wujud) yang berbeda⁵⁰ di dalam realitas.

Maka dari itu, ada beberapa premis yang menjelaskan bahwa wujud itu satu sekaligus beragam yaitu *pertama*, bahwa dengan pandangan fundamental wujud dapat dipahami bahwa semua keberadaan di alam eksternal ini yang mendasari adalah wujud. Kedua, ketika keberadaan di alam eksternal ini yang mendasari bukan wujud, berarti ada sesuatu yang lain selain wujud. Selain wujud ada dua kemungkinan yaitu kuintas dan ketiadaan. Keberadaan kuintas di alam eksternal berdasarkan pandangan fundamental wujud yaitu wujud itu sendiri. Peran ketiadaan sebagai dasar keberadaan jelas mustahil itu terjadi. Sebab ketiadaan itu sudah jelas niscaya tiada atau jelas dengan sendirinya tidak ada. *Ketiga*, ketika kita menerima pandangan fundamental wujud, secara otomatis kita mengakui bahwa satu dan beragam itu yang mendasari adalah wujud. dapat disimpulkan bahwa satu sekaligus beragam adalah wujud itu sendiri. Sebab yang mendasari keberadaan ini adalah wujud dan bukan yang lain, selain wujud adalah ketiadaan.

⁴⁹ Kholid Al-Walid, *Perjalanan Jiwa Menuju Akhirat Filsafat Eskatologi Mulla Sadra*, hal. 38

⁵⁰ Muhammad Husein Thabatabai, *Ushūl Falsafah wa Al-Manhāj Al-Wāqi’iyah*, (Iraq: Al-Muassasah Al-‘Iraqiyah lī An-Nasyr wa At-Tauzī’, 1417 H), Jilid 2, hal. 67

BAB IV

ANALISIS KEBHINNEKAAN BERDASARKAN *TASYKĪK AL-WUJŪD*

Tak dapat dipungkiri bahwa mengakui adanya keberagaman di realitas bukanlah sebuah kemustahilan. Bahkan jauh sebelum manusia memiliki suatu kesadaran akan keragaman realitas, keragaman sendiri telah ada sebelumnya dalam hukum penciptaan. Artinya, kesadaran tersebut merupakan sebuah kenyataan dan niscaya adanya sehingga tidak perlu menjadikan pertentangan terhadap sesuatu berbeda dengan sesuatu lainnya. Begitupun dalam konteks keindonesiaan, kebhinekaan bukanlah sebuah konsensus atau kesepakatan semata, melainkan sebuah keniscayaan yang harus diterima oleh setiap individu maupun kelompok tertentu yang hidup di Indonesia. Sama halnya dengan kebhinekaan, dalam filsafat Islam, wujud juga dipahami demikian karena memiliki ketunggalan di dalam dirinya sendiri, akan tetapi juga memiliki gradasi masing-masing di alam realitas. Maka, tentu saja keduanya (kebhinekaan dan gradasi wujud) memiliki keniscayaan yang satu tapi beragam dengan berbagai atribut yang disandang terhadap keduanya.

Oleh sebab itu, agar dapat mempunyai pemahaman yang utuh, ada baiknya untuk ditelaah lebih jauh perihal keniscayaan kebhinekaan dan gradasi wujud, dan berikut ini adalah penjelasan selengkapnya, antara lain:

A. Keniscayaan Kebhinnekaan dan *TasykĪk Wujūd*

Pada pembahasan sebelumnya telah dijelaskan mengenai apa itu kebhinnekaan, dan “kebhinneakaan” sangat akrab di lingkungan masyarakat Indonesia. Kata kebhinnekaan atau keberagaman menjadi karakter secara nyata dalam kehidupan masyarakat Indonesia sepanjang sejarah. Apalagi ideologi negara Indonesia memiliki semboyan “*Bhinneka Tunggal Ika*”, yaitu berbeda beda, namun tetap

satu¹. Artinya, keberagaman atau kebhinnekaan dalam *Bhinneka Tunggal Ika* dipandang sebagai sebuah keniscayaan dari hanya sebuah kesepakatan yang diperoleh secara bersama.

Kebhinnekaan (keberagaman) begitu sangat jelas terlihat di realitas eksternal ini. Bahkan kita tidak bisa mengingkarinya karena begitu nyata terlihat adanya. Akan tetapi, dengan adanya kebhinnekaan bukan berarti di antara satu sama lainnya tidak memiliki kesatuan, atau berbeda secara totalitas di realitas eksternal. Ketika hanya mengakui kebhinnekaan tanpa melihat kesamaannya, maka implikasinya yaitu melihat realitas eksistensi berdiri secara independen dan di antara satu dengan lainnya saling bertentangan. Artinya, realitas satu dengan lainnya tidak memiliki kesamaan sama sekali, dan inilah pandangan Ibn Sina yang mengatakan ‘keberagaman itu eksis di realitas eksternal sedangkan kesatuannya hanya berada di alam mental. Mulla Sadra merupakan tokoh pemilik prinsip fundamental wujud yang berpendapat bahwa wujud merupakan dasar keberadaan di alam eksternal². Artinya bahwa apapun yang terlihat, baik itu keberagaman ataupun kesatuan, itulah wujud. sebab wujud menjadi dasar segala sesuatu di alam eksteral.

Hal ini serupa dengan prinsip-prinsip *tasykīk al-wujūd* itu sendiri yang dipahami sebagai sebuah realitas tunggal bagi seluruh realitas yang ada. Sebab menurut prinsip ini, wujud sendiri adalah banyak, tidak satu, dan keberagaman tersebut adalah konsekuensi dari prinsip wujud itu sendiri yang sekaligus sebagai prinsip kesatuan, persamaan, dan prinsip keberagaman dan perbedaan³, sehingga tidak ada perbedaan secara totalitas yang memisahkan antara sesuatu dengan yang lainnya.

Di samping itu, persoalan kebhinnekaan ini sering kali disalahpahami oleh sebagian orang. Misalnya, dalam konteks

¹ Martinus Joko Lelono, dkk, *Bhineka Tunggal Ika dalam Sketsa: Refleksi Keberagaman Muda-Mudi Lintas Iman*, (Malang: Dwi-Quantum, 2017), hal. 51

² Muhammad Nur Jabir, *Wahdah Al-Wujud Ibn Arabi dan Filsafat Wujud Mulla Sadra*, (Makassar: Chamran Press, 2012), hal. 26

³ Syaifan Nur, *Filsafat Hikmah Mulla Sadra*, (Yogyakarta: RausyanFikir Institute, 2012), hal. 185

kehidupan beragama, berbudaya, bersosial dan berpolitik. Ketika seseorang hidup dalam keberagaman agama, sering terjadi kesalahpahaman di dalamnya. Artinya bahwa entitas-entitas agama itu beragam secara eksistensi dan tidak berbeda secara totalitas, yakni tidak memiliki kesamaan di dalamnya karena dibatasi dengan syariat masing-masing agama. Hidup dalam berbudaya juga seringkali terjadi konflik. Kenapa di dalam keberagaman budaya itu sering terjadi konflik? karena seseorang menganggap budayanyalah yang lebih baik dan benar (klaim kebenaran). Melihat keberadaan budaya lainnya mereka menganggap budaya di luar dari budayanya berbeda secara totalitas dengan budaya yang mereka miliki. Hidup dalam sosial politik juga sangat rentan terjadi konflik di dalamnya. Terlepas dari masalah perebutan kepentingan dan kekuasaan, sosial politik menganggap keberadaannya masing-masing bahwa pengaruhnya yang lebih besar. Bahkan menganggap kepentingannya yang patut terealisasi. Betul bahwa perbedaan agama, budaya, dan politik sudah diatur dalam *Bhinneka Tunggal Ika* yaitu meskipun berbeda-beda, namun tetap satu. Namun, persatuan itu ditetapkan dalam kesepakatan konstitusi. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Hamengku Buwono X bahwa (Bhinneka Tunggal Ika) sekalipun satu, tidak boleh dilupakan bahwa sesungguhnya bangsa berbeda-beda dalam satu kemajemukan⁴. Inilah yang perlu dipamakai dan dilihat kesesuaiannya dalam konteks keindonesiaan yang majemuk.

Ketika melihat perbedaan itu secara totalitas, maka kita tidak akan pernah menemukan ada kesatuan, melainkan mengesampingkannya dari serangkaian atribut-atributnya. Kenapa kesatuan itu mustahil terjadi ketika perbedaan itu secara totalitas? karena memandang realitas itu berdiri secara sendiri-sendiri (independen). Ketika realitas eksistensi beragam itu tidak memiliki kesamaan, maka sudah pasti berbeda secara hakikat. Ketika keberagaman eksistensi itu berbeda secara hakikat, maka meniscayakan keberagaman hakikat. Ketika hakikat itu beragam,

⁴ Hamengku Buwono X, *Merajut Kembali KeIndonesiaan Kita*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2007), hal. 67

maka hakikat itupun akan meniscayakan dia subjektif. Lalu bagaimana dengan pernyataan bahwa hakikat itu sebenarnya hanya satu namun bergradasi? Inilah kemudian menjadi perdebatan panjang diantara para kaum filsuf.

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa kalangan Peripatetik berpandangan bahwa semua realitas yang ada di alam eksternal ini dilandasi oleh wujud. Namun, wujud satu dengan wujud lainnya berbeda secara total (*diversity*). Artinya bahwa wujud satu dengan wujud lainnya bersifat independen. Ketika bersifat independen, maka tidak ada keterhubungan diantara wujud-wujud yang beragam itu.⁵ Maka, ketika mengamati beragam maujud yang ada secara hakikat indrawi (*an-nūr al-hissī*), hanyalah keberagaman yang satu, yang merupakan hakikat wujud yang tampak dengan dirinya sendiri melalui sesuatu selainnya (mahiyah⁶). Ketika wujud dikatakan beragam, dan berbeda secara total, maka tidak ada kesatuan di dalamnya. Ketika tidak ada kesatuan di dalamnya, maka wujud yang satu berlainan dengan wujud yang lain. Ketika berlainan, berarti ada dua wujud. sedangkan selain wujud adalah ketiadaan.

Berkaitan dengan penjelasan tersebut, Mulla Sadra juga menegaskan bahwa:

Objek yang kelanjutan dan kelestariannya identik dengan proses menjadi sesuatu yang lain adalah alam; objek yang aktualitasnya identik dengan potensialitas mutlak adalah materi awal yang tak berbetuk (*al-hayūlā*); objek yang kesatuan dirinya identik dengan kemajemukan aktual adalah angka dan bilangan; dan objek yang kesatuan aktualnya identik dengan kemajemukan potensialnya adalah benda (*jism*) beserta segenap ciri fisiknya⁷.

Maka dari itu, coba perhatikan beberapa premis berikut ini, bahwa:

⁵ Muhammad Nur Jabir, *Wahdah Al-Wujud Ibn Arabi dan Filsafat Wujud Mulla Sadra*, hal. 24

⁶ Sayyid Muhammad Husein Thabathabai, *Bidayah al-Hikmah*, (Qom: Muasasah al-Ma'arif al-Islamiyah, 1418 H), hal.17

⁷ Murtadha Muthahari, *Filsafat Hikmah: Pengantar Pemikiran Shadra*, (Bandung: Mizan, 2002), hal. 140

- Tidak ada wujud selain wujud karena selain wujud yaitu ketiadaan.
- Tidak ada dua yang lain atau berlainan bagi wujud. Sebab dualisme timbul dari keberlainan. Dan keberlainan timbul dari dua eksistensi. Sedangkan selain wujud adalah ketiadaan mutlak.
- Wujud bukan substansi dan aksiden sebab, substansi dan aksiden itu adalah esensi. Sedangkan wujud bukan esensi. Bahkan wujudlah yang mewujudkan esensi.
- Wujud bukanlah bagian dari yang lain. Sebab selain wujud adalah ketiadaan⁸.

Berdasarkan premis tersebut, kita bisa memahami bahwa ketika wujud dikatakan beragam, maka akan meniscayakan perbedaan, ketika berbeda, maka meniscayakan keberlainan. Ketika berlainan, maka menimbulkan dualisme terhadap wujud. Sedangkan selain wujud adalah ketiadaan.

Sementara itu, untuk mengetahui bagaimana implikasi dari gradasi wujud (*tayskīk al-wujūd*), berikut ini akan diuraikan lebih jauh, antara lain:

1. Impikasi Keberagaman Wujud terhadap Eksistensi Kebhinekaan

Telah dijelaskan sebelumnya bahwa Filsafat Peripatetik berpandangan bahwa yang menjadi dasar keberadaan di realitas eksternal adalah wujud. Dan menjadi landasan inti di alam eksternal adalah pluralitas. Ketika dikaitkan dengan kondisi yang terdapat di Indonesia adalah bahwa dengan adanya keberagaman meniscayakan adanya perbedaan, tanpa adanya sesuatu yang menghubungkan dengan sesuatu yang lain, maka melihat keberagaman itu berdiri secara independen. Suatu kewajaran ketika konflik itu terjadi misal di Indonesia. Artinya bahwa mereka beragam dari berbagai aspek baik dari aspek agama, budaya, ras etnik, sosial maupun politik. Dalam keberagaman itu

⁸ Hasan. A.A, *Ringkasan Logika Muslim Sebuah Analisa Definisi, Logika dan Filsafat*, (Jakarta: Yayasan Al-Muntazhar, 1992), hal. 38

tidak disadari bahwa ada sesuatu yang mendasarinya. Artinya bahwa ketika kebhinnekaan (keberagaman) ini dipandang sesuatu yang berlainan tanpa ada hubungan entitas satu dengan entitas lainnya, maka yang terjadi adalah konflik. Kenapa itu terjadi? Sebab memaknai keberagaman itu berbeda secara total seperti yang dikemukakan oleh pandangan filsafat Peripatetik.

Di sini, dapat dipungkiri bahwa dengan adanya keberagaman wujud, maka slogan kebhinekaan pun seharusnya dapat diterima oleh berbagai kalangan. Sebab, adanya keberagaman bukanlah sebuah kebetulan atau sebuah perbedaan yang tidak terdapat kesatuan di dalamnya, melainkan memiliki hakikat kemendasaran yang satu. Seperti yang dijelaskan oleh Fazlur Rahma tentang pemikiran Mulla Sadra, bahwa:

Jika anda yakin bahwa wujud adalah satu realitas tunggal yang tidak memiliki genus dan diferensia, dan ia secara identik sama dala segala sesuatu, dan kejadian-kejadiannya yang memanifestasikan diri tidak berbeda dalam hekitat mereka, juga tidak berbeda melalui faktor-faktor tambahan yang instan (*huwyat*)—bahkan faktor-faktor instan ini identik dengan hakikat mereka...maka anda harus berkesimpulan bahwa kejadian-kejadian eksistensial itu (yang identik dalam hakikat) adalah (pada saat yang sama dan berdasarkan hakikat yang sama) berbeda satu dari yang lainnya dalam istilah-istilah prioritas dan posterioritas, kesempurnaan dan ketidaksempurnaan, kekuatan dan kelemahan⁹.

Demikian yang dapat dipahami tentang implikasi keberagaman wujud terhadap kebhinekaan. Sebab, dengan didasarkan pada kesadaran, kita bisa mengamati adanya keberagaman di antara individu dan kelompok yang hidup di Indonesia. Maka sudah tentu semua keberagaman tersebut (suku, budaya, agama, ras, dll) merupakan keberagaman yang saling terikat di dalamnya, tanpa harus menafikan satu dengan yang lainnya, sehingga menjadi seorang yang memeluk agama Islam, Katolik, ataupun Hindu, sama sekali bukanlah suatu kesalahan,

⁹ Fazlur Rahman, *Filsafat Shadra*, (Bandung: Pustaka, 2000), hal. 47

kejahatan, ataupun dosa¹⁰, karena semuanya telah lama hidup dan tumbuh di Indonesia sebelum dan sesudah kemerdekaan.

2. Impikasi Kesatuan Wujud terhadap Eksistensi Kebhinekaan

Dalam pandangan Ibn Arabi yang menganggap bahwa realitas eksistensi ini hanya satu. Tentu ketika eksistensi dikatakan cuma hanya satu, maka keberagaman eksistensi itu tidak ada. Maka, dalam hal ini, Murtadha Muthahhari juga mengatakan bahwasanya:

Tidak mungkin realitas eksternal itu hanya terdiri satu realitas semata. Sedangkan mental kita mengabstraksikan kuintas-kuintas yang terdapat di alam eksternal dan memang keberagaman itu nyata adanya. Sehingga ketika kita menerima konsep kesatuan wujud konsekuensinya, ada penafian atau pengingkaran terhadap persepsi inderawi hasil cerapan dari kenyataan di luar realitas eksternal. Bahkan juga mengingkari hal yang betul-betul nyata adanya yakni keberagaman yang ada¹¹.

Tentu saja, ketika pandangan ini dikaitkan dengan fenomena yang ada di Indonesia saat ini bahwa mereka yang menganggap realitas eksistensi itu hanya satu, maka akan mengakibatkan pemahaman yang tidak menerima keberagaman. Ketika tidak menerima keberagaman, maka secara bersamaan, akan menuntut keseragaman yaitu tidak menghendaki keberagaman. Dan persoalan inilah yang hendak diberikan solusi berdasarkan teori wujud Mulla Sadra yaitu wujud itu satu sekaligus beragam atau dalam istilah Mulla Sadra “*al-katsrah fi aynil wahdah wal-wahdah fi aynil katsarah*”¹². Mulla Sadra menggambarkan wujud itu tidak berbeda secara hakikatnya, namun perbedaan wujud itu

¹⁰ Kusnanto, *Keanekaragaman Suku dan Budaya Indonesia*, (Semarang: Alprin, 2009), hal. 4

¹¹ Muhammad Nur Jabir, *Wahdah Al-Wujud Ibn Arabi dan Filsafat Wujud Mulla Sadra*, hal. 5

¹² Kholid Al-Walid, *Perjalanan Jiwa Menuju Akhirat Filsafat Eskatologi Mulla Sadra*, hal.

berada pada tingkat kualitasnya.¹³ Dikatakan bahwa ketiadaan itu niscaya tidak memiliki perbedaan. Karena perbedaan itu timbul dari keberadaan. Sehingga ketika perbedaan itu jelas adanya, maka tidak lain dari pada keberadaan itu sendiri, bukanlah yang lain yaitu ketiadaan.¹⁴ Perbedaan yang begitu tampak terlihat di realitas eksternal adalah wujud itu sendiri. Sebab selain wujud adalah ketiadaan¹⁵, sehingga yang tampak hanyalah wujud, maka segala realitas yang ada berada dalam wujud itu sendiri.

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa Mulla Sadra memiliki prinsip fundamental wujud atau kemendasaran wujud, yaitu:

Prinsip ini berpandangan bahwa wujud merupakan dasar di alam eksternal. Jadi, keberagaman yang terdapat di alam eksternal begitu nyata dapat dipastikan bahwa yang mendasari adalah wujud. ketika bukan wujud, berarti ada sesuatu yang lain yaitu kuintitas dan ketiadaan. Sedangkan, ketiadaan niscaya tiada, sehingga tidak dapat dijadikan sebagai dasar keberadaan. Kenapa demikian? karena mana mungkin ketiadaan bisa mengadakan sesuatu, sedangkan ketiadaan itu sendiri niscaya tiada. Ketiadaan itu tidak bisa dipredikati dengan predikat apapun. Sebab predikat akan timbul dari sesuatu yang dipredikati. Oleh karena itu, ketiadaan tidak bisa dipredikati dengan sesuatu apapun¹⁶, yang bisa mengadakan sesuatu tentu bukanlah ketiadaan itu.

Selanjutnya, ketika kita mengatakan bahwa kuintitas menjadi dasar di alam eksternal ini, maka kita akan melihat keberagaman ini berbeda secara totalitas. Artinya, ketika wujud bukan menjadi dasar, sudah pasti tidak akan ada kesatuan atau kesamaan terhadap entitas-entitas yang beragam. Karena kuintitas adalah sesuatu yang mengatribut pada sesuatu yang ada yaitu wujud. Berarti adanya

¹³ Kholid Al-Walid, *Perjalanan Jiwa Menuju Akhirat Filsafat Eskatologi Mulla Sadra*, hal. 38

¹⁴ Hasan. A.A, *Ringkasan Logika Muslim Sebuah Analisa Definisi, Logika dan Filsafat*, hal. 39

¹⁵ Muhammad Taqi Misbah Yazdi, *Al-Manhāj Al-Jadīd fī Ta'lim Al-Falsafah*, (Beirut: Dār at-Ta'ārif lī al-Matbū'āt, 2007), Jilid 1, hal. 265

¹⁶ Hasan. A.A, *Ringkasan Logika Muslim Sebuah Analisa Definisi, Logika dan Filsafat*, hal. 39

kuiditas karena yang melandasi kewujudannya adalah wujud itu sendiri.

Sebagaimana dikatakan bahwa ada beberapa argumentasi filosofis yang dikemukakan oleh Mulla Sadra mengenai kemendasaran wujud atas kuiditas, yakni:

Pertama bahwa ketika kuiditas keluar ke tingkat wujud, bukan karena perantara wujud, maka meniscayakan perubahan pada hakikat kuiditas. Hal ini mustahil terjadi. Karena satu-satunya hakikat yang mengeluarkan kuiditas ke tingkat wujud adalah wujud itu sendiri. *Kedua*, Kuiditas merupakan sumber perbedaan. Artinya kuiditas satu berbeda dengan kuiditas yang lain. Kuiditas tidak memiliki kesatuan yang sama jika tidak ada realitas yang menyatukan hal-hal berbeda itu. Maka dari itu diperlukan dasar yang bisa menghubungkan anantara kuiditas satu dengan kuiditas yang lainnya. dan realitas yang bisa menghubungkannya adalah realitas wujud. *Ketiga*, kuiditas mewujud dengan wujud eksternal sehingga memiliki efek seperti api membakar, dan air membasahi. Dan secara bersamaan mewujud juga di alam mental. Yang mewujud di alam mental tidak memiliki efek sebagaimana di alam eksternal. Jika kuiditas yang hakiki, maka tidak akan mempunyai perbedaan antara keadaan yang ada di eksternal dan keadaan yang ada di mental. Tetapi, keadaanya memang berbeda. Sehingga dikatakan wujudlah yang lebih utama dari kuiditas.¹⁷

Berdasarkan prinsip fundamental wujud bahwa ketika kuiditas keluar dari tingkat wujud tertentu menuju tingkat wujud yang lain, maka, tidak mungkin kuiditas mampu berpindah pada satu titik ke titik yang lain tanpa perantara wujud. artinya bahwa ketika kuiditas keluar dari tingkat wujud, tak lain yang mengeluarkan kuiditas dari posisi itu adalah wujud itu sendiri. Ketika kita menerima kemendasaran wujud ini, berarti semua yang mengalami perubahan, perbedaan, kesamaan di realitas eksternal, adalah wujud itu sendiri.

¹⁷ Kholid Al-Walid, *Perjalanan Jiwa Menuju Akhirat Filsafat Eskatologi Mulla Sadra*, hal. 35-36

Selanjutnya dikatakan bahwa kuiditas itu adalah sumber perbedaan¹⁸. Dalam kuiditas, perbedaan itu, tidak punya aspek kaitan, kesamaan kesatuan dan sejenis. Kalau kita menerima pandangan fundamental wujud, kita pasti berpendapat bahwa adanya perbedaan di realitas eksternal itu karena wujud. Artinya bahwa perbedaan itu bukan dari sesuatu yang lain kecuali wujud, sebab wujudlah yang fundamental di realitas eksternal. Ketika kita mengatakan bahwa perbeda itu adalah wujud, dan perbedaan ini berarti memiliki kesamaan. Aspek kesamaannya adalah sama-sama wujud. Artinya bahwa perbedaan ini mempunyai aspek kesatuan yaitu wujud. Mulla Sadra menggambarkan wujud itu tidak berbeda pada subtansinya, melainkan perbedaan itu pada kualitasnya¹⁹ seperti cahaya terang dan redup. Yang dimaksud tidak berbeda pada subtansinya yaitu subtansinya hanya satu yaitu wujud. Ketika dikatakan bahwa perbedaan itu pada aspek kualitasnya, maka yang dimaksud disini adalah gradasi wujudnya yang berbeda. Seperti analogi yang dipakai oleh Mulla Sadra mengubah terminologi cahaya menjadi terminologi wujud, sebagaimana beliau terinspirasi dengan gradasi wujud Suhrawardi. Namun, Surahwardi menjelaskan gradasi wujud itu dengan hakikat cahaya. Sedangkan Mulla Sadra menjelaskan gradasi wujud itu dengan hakikat wujud.²⁰ Dijelaskan bahwa cahaya 30 meter dari sumber cahaya lebih terang dari cahaya 50 meter dari sumber cahaya. Aspek kesamaannya yaitu cahaya, dan aspek perbedaannya terdapat pada kualitas cahaya ada yang terang dan ada yang redup. Terang dan redup ini, tidak bisa eksis tanpa keberadaan cahaya. Begitu pun dengan keberagaman tidak ada tanpa ada kesatuan yaitu wujud. artinya satu dan beragam

¹⁸ Abdul Jabbar Ar-Rifāi, *Mabādī al-Falsafah al-Islamiyyah*, (Beirut: Dār al-Hādī lī at-Tabā'ah wa an-Nasyr wa at-Tauzī', 2001), Jilid 1, hal. 193

¹⁹ Kholid Al-Walid, *Perjalanan Jiwa Menuju Akhirat Filsafat Eskatologi Mulla Sadra*, hal. 38

²⁰ Muhammad Nur Jabir, *Wahdah Al-Wujud Ibn Arabi dan Filsafat Wujud Mulla Sadra*, hal. 68

itulah wujud. tanpa ada kesatuan dan keberagaman maka tidak ada wujud.

Penjelasan di atas hendak berbicara mengenai gradasi wujud. gradasi wujud ini sebuah prinsip yang menjelaskan antara ketunggalan (*wahdah*) dan pluralitas (*katsrah*). Ibnu Sina mengatakan bahwa keberagaman di luar itu jelas terjadi dan nyata terlihat. Adanya entitas satu dengan entitas lainnya masing-masing eksis. Dan keberagaman yang dimaksud Ibn Sina ini keberagaman yang tidak memiliki hubungan antara realitas satu dengan realitas yang lainnya. Artinya, beragamnya realitas ini, secara independen. Maksudnya beragam secara independen adalah berbeda secara total. Tidak ada aspek kesamaan di dalamnya kecuali di alam mental saja. Ibn Arabi berpendapat sebaliknya dari pandangan Ibn Sina. Ibn Arabi tidak sependapat dengan pandangan Ibn Sina. Dalam artian bahwa realitas eksternal itu tidaklah beragam, melainkan hanya satu dan tidak berjumlah. Ketika tidak berjumlah, meniscayakan tidak ada keberagaman. Mulla Sadra tentu berbeda dengan kedua pandangan sebelumnya yang mengatakan realitas eksistensi itu beragam kata Ibn Sina, realitas eksistensi itu satu kata Ibn Arabi. Bahkan Mulla Sadra mempunyai pandangan bahwa realitas eksistensi itu satu sekaligus beragam. Kedua pandangan sebelumnya disatukan dalam dasar eksistensi. Artinya bahwa Mulla Sadra tidak memandang realitas eksistensi itu hanya beragam saja, juga tidak memandang realitas eksistensi itu hanya satu saja. Tetapi ia memandang realitas esistensi itu satu sekaligus beragam.

Dalam gradasi kesatuan maupun keberagaman (kebhinnekaan) kedua-duanya harus aktual. Sebab ketika hanya keberagaman yang aktual maka tidak ada kesamaan atau kesatuan. Ketika hanya kesatuan yang aktual maka meniscayakan keberagaman tidak ada, dan gradasi pun tidak akan terjadi. Kenapa ? karena ketika kita hanya mengakui keberagaman, tanpa adanya kesamaan atau kesatuan, maka perbedaan itu terjadi secara total. Ketika perbedaan itu secara total, maka tidak ada yang menghubungkan. Ketika seperti itu maka, gradasi pun mustahil

terjadi. Ketika kita hanya mengakui kesatuan, maka tidak akan ada keberagaman. Ketika tidak ada keberagaman, maka sudah pasti gradasi itu tidak akan terjadi. Sebagaimana gradasi itu bisa terjadi ketika kesatuan dan keberagaman dua-duanya harus aktual di realitas eksternal.

Berdasarkan uraian di atas eksistensi kebhinnekaan berdasarkan teori wujud Mulla Sadra dapat dipastikan bahwa kebhinnekaan (keberagaman) itu aktual di realitas eksternal sekaligus mengandung kesatuan di dalamnya. Artinya bahwa eksistensi kebhinnekaan ini tidaklah berbeda sepenuhnya, antara entitas satu dengan entitas lainnya. meskipun kenyataannya berbeda, tapi di dalam perbedaan itu mengalir kesatuan yaitu disatukan oleh wujud. Adanya perbedaan juga meniscayakan adanya kesatuan berdasarkan teori kesatuan dan keberagaman (*mono gradualism eksistensi*) wujud Mulla Sadra.

Maka, terdapat empat syarat sehingga gradasi dapat terjadi²¹, antara lain:

- Kesatuan wujud adalah aktual.
- Pluralitas juga harus aktual.
- Pluralitas akan kembali kepada kesatuan.
- Kesatuan mengalir dalam pluralitas.

Dalam aspek perbedaan seseorang begitu mudah untuk menyaksikan serta memahaminya. Tapi dari aspek kesamaan (kesatuan) seseorang sangat sulit memahaminya. Artinya kebanyakan orang terfokus pada aspek perbedaannya, tapi sulit memahami dari aspek kesatuannya.

Lalu bagaimana teori wujud Mulla Sadra melihat realitas yang beragam itu? Berdasarkan teori wujud Mulla Sadra bahwa sesungguhnya kesatuan dari personal entitas-entitas itu adalah wujudnya, berdasarkan prinsip *ashalah al-wujūd*. Telah dijelaskan sebelumnya bahwa prinsip ini berpendapat yang menjadi dasar keberadaan di alam eksternal adalah wujud. ketika

²¹ Muhammad Nur Jabir, *Wahdah Al-Wujud Ibn Arabi dan Filsafat Wujud Mulla Sadra*, hal. 71

di alam eksternal keberagaman itu aktual di realitas eksternal, maka kesatuannya tidak lain dari pada wujud itu sendiri. Jadi, satu dan beragam di realitas eksternal itu bukan sesuatu yang lain kecuali wujud.

Berdasarkan teori wujud Mulla Sadra, yang mempunyai prinsip filsafatnya oleh kemendasaran wujud (fundamental wujud). Artinya bangunan filsafatnya didasari oleh wujud itu sendiri, sebab wujud merupakan realitas dasar yang paling nyata dan jelas (*badihi*).²² Wujud adalah satu yang bertingkat yaitu apapun yang membedakan antara satu wujud dengan wujud yang lainnya, maka hal itu tidak mungkin disebabkan hal lain selain wujud, sebab tanpa wujud, atau di luar dari wujud adalah kebatilan.²³

Posisi teori wujud Mulla Sadra dalam persoalan kebhinnekaan (keberagaman) adalah bahwa adanya kebhinnekaan (keberagaman) memang niscaya adanya karena keberagaman itu aktual secara realitas eksternal. Adanya kebhinnekaan (keberagaman) itu tidak lain dari wujud itu sendiri. Kenapa yang bhinneka (beragam) di luar eksternal tidak alain dari wujud itu sendiri ? Sebab ketika yang beragam di luar eksternal itu bukan wujud, berarti selain dari wujud adalah ketiadaan. Tidak mungkin kita bisa mengatakan bahwa beragam itu tiada sebab didasari oleh ketiadaan. Argumentasi seperti ini tentu tidak bisa diterima, sebab bagaimana mungkin ketiadaan itu bisa kita jelaskan karena ketiadaan itu sudah niscaya tiada. Dalam keberagaman itu, secara bersamaan juga memiliki aspek kesatuan di dalamnya. Artinya bahwa bukan hanya keberagaman yang eksis di realitas eksternal. Ketika di realitas eksternal itu hanyalah keberagaman yang aktual, maka menicayakan keberagaman itu tidak memiliki aspek kesamaan. Ketika keberagaman itu tidak memiliki aspek kesamaan, maka melihat realitas beragam ini tidak memiliki

²² Kholid Al-Walid, *Perjalanan Jiwa Menuju Akhirat Filsafat Eskatologi Mulla Sadra*, hal. 34

²³ Hasan. A.A, *Ringkasan Logika Muslim Sebuah Analisa Definisi, Logika dan Filsafat*, hal. 38

keterhubungan antara realitas satu dengan realitas lainnya. Ketika realitas beragam ini tidak memiliki hubungan satu dengan yang lainnya, maka keberagaman ini dinilai sebagai hal yang tidak bisa didamaikan karena keberadaan realitas beragam itu berdiri secara independen. Berdasarkan prinsip gradasi wujud Mulla Sadra meniscayakan adanya pluralitas (kebhinnekaan/keberagaman) wujud, dan sekaligus adanya meniscayakan kesatuan wujud. kebhinnekaan/keberagaman akan kembali pada kesatuan, dan kesatuan mengalir dalam kebhinnekaan/keberagaman (pluralitas).²⁴

Dalam kekhususan wujud dijelaskan bahwa keberadaan wujud karena dirinya sendiri²⁵. Wujud memiliki tingkatan yang ia tidak keluar dari tingkatannya itu sendiri. Wujud mempunyai cerminan yang berbeda-beda dari segi esensi. Maka dari itu wujud pun berbeda-beda. Namun secara tidak langsung pensifatan ini berbeda dengan pensifatan lainnya. sebab yang lain dapat tersifati ketika telah memiliki keberadaan. Maka dari itu esensi tidak bisa ada lebih dahulu, kemudian disifati dengan wujud. Sebab wujudlah menjadikan esensi menjadi eksis/wujud²⁶

“Hukum-hukum negatif tentang wujud, *pertama* bahwa tidak ada wujud selain wujud, karena selain wujud adalah ketiadaan. *Kedua*, tidak ada dua bagi wujud. sebab dualisme timbul dari keberlainan dan keberlainan timbul dari dua eksistensi. Sedangkan selain wujud adalah ketiadaan eksistensi mutlak. *Ketiga*, wujud bukan subtansi dan aksiden, sebab keduanya itu adalah esensi. Sedangkan wujud adalah bukanlah esensi. Tapi bahkan yang mewujudkan esensi. Keempat, wujud bukan bagian dari yang lain, sebab selain wujud adalah ketiadaan.”²⁷

²⁴ Muhammad Nur Jabir, *Wahdah Al-Wujud Ibn Arabi dan Filsafat Wujud Mulla Sadra*, hal. 27

²⁵ Abdul Jabbar Ar-Rifāi, *Mabādī al-Falsafah al-Islamiyyah*, Jilid 1, 329

²⁶ Hasan. A.A, *Ringkasan Logika Muslim Sebuah Analisa Definisi, Logika dan Filsafat*, hal. 38. Lihat juga Abdul Jabbar Ar-Rifāi, *Mabādī al-Falsafah al-Islamiyyah*, Jilid 1, hal. 193

²⁷ Hasan. A.A, *Ringkasan Logika Muslim Sebuah Analisa Definisi, Logika dan Filsafat*, hal. 38

Berdasarkan penjabaran tersebut bahwa kebhinnekaan/keberagaman itu, kurang tepat dipandang hanya sebagai keberagaman saja. Tapi juga harus dipahami bahwa keberagaman itu memiliki aspek kesatuan secara bersamaan. Hal ini sebagaimana yang dinyatakan oleh bahwa “Bhinneka Tunggal Ika” memiliki arti “Beraneka satu Itu”. Jika diartikan maka maknanya kurang lebih “walaupun berbeda-beda tapi pada hakikatnya tetap satu kesatuan²⁸”. Dari sini kita dapat memahami bahwa adanya aspek keberagaman dan aspek kesatuan itu tidak lain dari wujud itu sendiri sebab selain wujud adalah ketiadaan. Selanjutnya jika kita melihat realitas di alam eksternal itu beragam, juga kita harus memahami bahwa adanya keberagaman itu tidak lain dari wujud itu sendiri. Dan aspek keberagaman itu disatukan oleh wujud juga sebagai aspek kesatuan.

Telah dijelaskan sebelumnya bahwa adanya pensifatan, itu harus meniscayakan adanya keberadaan terlebih dahulu. Bagaimana caranya kita mensifati sesuatu ketika belum eksis (wujud).

B. Eksistensi Kebhinnekaan Berdasarkan Kesepakatan Konstitusi dan Keniscayaan Kebhinnekaan Berdasarkan Wujud

Bhinneka Tunggal Ika salah satu konsensus nasional sejajar dengan Pancasila, UUD 1945, NKRI sebagai pilar kebangsaan yang ditetapkan berdasarkan konstitusi negara republik Indonesia. Konsensus tersebut bukan hanya berupa kesepakatan belaka bagi para pendiri bangsa Indonesia, melainkan didasarkan realitas sosial yang majemuk yang memiliki cita-cita untuk senantiasa hidup dalam persatuan dan persaudaraan.

Tepat pada sidang BPUPKI bertepatan dua setengah bulan pra proklamasi, *Bhinneka Tunggal Ika* ini, mulai diperbincangkan oleh Soekarno, Muh. Yamin dan I Bagus Sugriwa. Bertepatan pada tanggal

²⁸ Tim Smart Genesis, *UUD 19945 dan Amandemen*, (Yogyakarta: Genesis Learning, 2016), hal. 53

11 Februari 1950 lambang Garuda Pancasila dipakai dalam sidang Kabinet Republik Indonesia Serikat secara resmi, dipimpin oleh Sultan Hamid II. Ditetapkannya *Bhinneka Tunggal Ika* sebagai semboyan Negara Kesatuan Republik Indonesia, juga tidak terlepas dari sumbangsi Muh. Yamin sebagai orang pertama yang mengusung semboyan itu²⁹.

Keberadaan *Bhinneka Tunggal Ika* dalam memobilisasi semua kebhinnekaan/keberagaman itu berdasarkan hasil kesepakatan berlandaskan konstitusional³⁰. Akan tetapi, ketika dipahami lebih bahwa kebhinekaan bukan hanya sebagai sebuah kesepakatan konstitusi semata, melainkan lahir dari sebuah kesadaran utuh akan realitas sosial yang beragam. Artinya bahwa Bhineka Tunggal Ika merupakan keberagaman eksistensi (yang) berkembang untuk kekayaan bersama pada saat bersamaan. Oleh karena itu persatuan bukan hanya aliansi yang hampa, tetapi juga aliansi yang semakin kuat dan padat³¹ dengan berbagai aspek lapisan kehidupan yang ada di Indonesia.

Bhinneka Tunggal Ika yang dipahami selama ini sebagai kesepakatan konstitusi sekaligus dijadikan sebagai semboyan ideologi Pancasila dinilai kurang memberikan solusi atas konflik yang terjadi di Indonesia. Bahkan tidak menyelesaikan persoalan konflik yang terjadi di tengah-tengah masyarakat Indonesia. Dalam alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dijelaskan bahwa:

“Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan perdamaian abadi dan keadilan

²⁹ Tim Visi Adiwidya, *Panduan Lulus Seleksi CPNS Tenaga Pendidikan Sistem Cat (Computer Assisted Test)*, (Jakarta: Visi Media, 2015), hal. 60. Lihat juga Joko Siswanto, *Politik Kebangsaan*, (Malang: IRDH Book Publisher, 2020), hal. 241

³⁰ Eva Nur Eviyana, *Pancasila dan Tokoh* (Yogyakarta: Bintang Pustaka Madani, 2020), hal. 378

³¹ Bambang Yuniarto, *Wawasan Kebangsaan*, (Yogyakarta: Deepublish, 2021), hal. 33

sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia, yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab. Persatuan Indonesia, dan Kerakyatan dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.”³²

Berdasarkan alinea ke empat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dijelaskan bahwa berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab. Persatuan Indonesia, dan Kerakyatan dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, sangat jelas bahwa konstitusi menjamin keadilan, persatuan, kebijaksanaan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Berdasarkan fakta di lapangan bahwa masih banyak konflik yang sering terjadi di tatanan sosial. Artinya bahwa adanya ketidaksesuaian antara ketetapan konstitusi dengan prakteknya.

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa kebanyakan orang begitu mudah menyaksikan keberagaman (kebhinnekaan) dari pada memahami kesatuan. Artinya, banyak konflik yang terjadi karena melihat realitas itu hanya satu. Juga sebagian orang melihat realitas itu hanya beragam tanpa ada kesatuan di dalamnya. Ketika menilai realitas itu hanya satu, maka implikasinya adalah menuntut keseragaman yaitu harus mempunyai satu warna meskipun keyataannya berbeda. Selanjutnya, ketika seseorang hanya melihat aspek keberagaman (kebhinnekaan) secara totalitas, maka dalam keberagaman itu tidak mempunyai aspek kesatuan (kesamaan).

³² MPR-RI, *Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor I/MPR/2003 Tentang Peninjauan Kembali Materi dan Status Hukum Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 1960 Sampai Dengan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 1960 Sampai Dengan Tahun 2002*, (Jakarta: Sekertariat Jenderal MPR RI, 2014), hal. 218-219.

Dalam gradasi wujud, meniscayakan adanya kesatuan (unitas) juga keberagaman (kebhinnekaan). Jika tidak ada kesatuan maka konsekuensinya yang ada hanya keberagaman (kebhinnekaan). Selanjutnya jika tidak ada keberagaman (kebhinnekaan), maka yang ada hanya kesatuan. Ketika keduanya terpisah atau tidak memiliki keterhubungan satu sama lain, maka keberadaan satu dengan yang lainnya berdiri secara independen. Ketika berdiri secara independen maka keberadaan satu dengan keberadaan yang lainnya berbeda secara totalitas. Maka dari itu kesatuan dan keberagaman (kebhinnekaan) kedua-duanya harus aktual, sehingga gradasi wujud itu bisa terjadi. Dalam prinsip gradasi wujud, melazimkan adanya kesatuan dan keberagaman (kebhinnekaan). Seperti dijelaskan sebelumnya bahwa yang mendasari keberadaan di realitas eksternal ini adalah wujud berdasarkan prinsip fundamental wujud Mulla Sadra. Jika hanya wujud yang menjadi dasar keberadaan, maka perbedaan dan persamaan tidak lain dari wujud itu sendiri. Artinya bahwa perbedaan dan persamaan akan kembali pada kesatuan wujud itu. Perbedaan yang dimaksud disini adalah berada pada aspek kualitasnya, sedangkan kesatuannya yaitu mempunyai hakikat yang satu yaitu wujud. Sehingga dikatakan bahwa perbedaan itu bukanlah pada aspek hakikatnya sebab perbedaan itu memiliki hakikat yang satu. dalam artian bahwa hakikat itu cuma satu, sedangkan yang beragam itu hanyalah kualitas semata. Dalam perbedaan itu, hakikat mengalir di dalamnya.

Maka dari itu ketika kita mengakui bahwa wujudlah yang mendasar dari segala sesuatu, maka menilai realitas ini bukan hanya aspek keberagaman (kebhinnekaan)nya saja. Tetapi, menilai keberagaman itu mesti kembali pada asalnya menjadi penyatu antara entitas yang beragam itu yaitu wujud. Wujud kurang tepat dikatakan ketika hanya beragam saja. Sebab wujud itu satu sekaligus beragam. Sebab ketika hanya dikatakan wujud itu satu, maka tidak perbedaan atau keberagaman. Yang dimaksud wujud itu satu sekaligus beragam, adalah keberagaman yang ada, tidak mungkin dilandasi dengan ketiadaan. Sesuatu yang dikatakan beragam ketika punya eksistensi. Seluruh keberagaman yang ada, memiliki kesatuan dalam tataran

eksistensi. Bukan melihat eksistensi beragam itu masing-masing mempunyai keberadaan.

Maka dari itu, gradasi sangat bertentangan dengan makna *diversity (tabayun)*, karena ketika ada dua entitas yang berbeda secara totalitas, maka meniscayakan tidak ada aspek kesamaan atau aspek kesatuan. Sedangkan dalam gradasi melazimkan aspek kesatuan atau kesamaan. Konsep gradasi wujud juga berlawanan dengan makna ketunggalan. Sebab ketika suatu entitas tunggal secara hakiki, maka meniscayakan tidak ada perbedaan, sedangkan dalam gradasi itu meniscayakan adanya perbedaan. Oleh karena itu dalam gradasi mesti ada aspek kesamaan dan aspek perbedaan. Sebab kedua aspek tersebut tidak bisa terpisah dalam gradasi.

Kenapa sebelumnya dikatakan bahwa gradasi sangat bertentangan dengan makna *diversity*? karena yang dimaksud *diversity* adalah perbedaan suatu entitas secara totalitas. Perbedaan entitas secara totalitas artinya tidak memiliki kesamaan antara satu entitas dengan entitas lainnya.

“Gradasi tidak berlaku pada kuiditas, sebab antara satu kuiditas dengan kuiditas lainnya berbeda secara totalitas atau *diversity (tabayun)* dan tidak terdapat aspek kesamaan diantaranya, misalnya antara ke-air-an dengan ke-api-an, jika dilihat dari sisi kuiditasnya tanpa melihat wujudnya, maka tidak akan ada sisi kesamaannya sama sekali. Oleh karena itu gradasi hanya berkaitan dengan wujud.”³³

Ketika mencermati penjelasan di atas bahwa kebhinnekaan atau keberagaman itu dipahami adanya entitas beragam namun tidak mempunyai persamaan di dalamnya. Kebhinnekaan yang dipahami sebagian besar orang yaitu *diversity* atau keberagam berbeda secara totalitas tanpa ada kesatuan atau kesamaan satu entitas dengan entitas lainnya. Akan tetapi, pemahaman demikian keliru dan tidak mewakili identitas dari kebhinekaan itu sendiri yang cenderung mengakomodir berbagai aspek kehidupan yang beragam dan mampu hidup berdampingan di antara sesamanya.

³³ Muhammad Nur Jabir, *Wahdah Al-Wujud Ibn Arabi dan Filsafat Wujud Mulla Sadra*, hal. 71

Kita menyaksikan bahwa beragam realitas eksistensi di alam eksternal itu betul adanya secara inderawi dan akal juga menerimanya. Artinya bahwa keberagaman realitas eksistensi di alam eksternal tidak butuh pembuktian sebab jelas dengan apa adanya. Satu wujud dengan wujud yang lainnya ketika dinilai secara diversity, maka wujud tersebut tidak memiliki kesamaan. Tapi dalam tataran wujud bukan berarti keberagaman itu tidak mempunyai kesamaan satu sama lain. Artinya bahwa perbedaan itu bukan perbedaan secara esensi sebab ketika itu terjadi, maka akan meniscayakan perbedaan secara totalitas, namun perbedaan yang dimaksud disini adalah perbedaan secara gradasi yaitu realitas eksternal tersebut memiliki hakikat yang satu, namun berbeda secara gradasi. Kenapa sebelumnya dikatakan bahwa diversity itu bukan bagian dari persoalan gradasi, sebab diversity mempunyai makna perbedaan satu entitas dengan entitas lainnya beragam secara secara independen yaitu berbeda secara totalitas.

Jadi dapat dipastikan bahwa gradasi wujud itu selain meniscayakan keberagaman aktual, juga meniscayakan kesatuan harus aktual. Artinya, keberagaman tidak bisa terpisah dengan kesatuan. Sebab perbedaan dan persamaan akan kembali pada kesatuan yaitu eksistensi. Ketika kebhinnekaan dalam *Bhinneka Tunggal Ika* dipandang sebagai entitas beragam tanpa melihat dari kesamaan secara eksistensi, maka implikasinya adalah tidak akan mempunyai aspek kesatuan kecuali hanya kesepakatan konstitusi. Ketika kesatuan hanya bersifat kesepakatan, maka itu sifatnya tidak hakiki. Kenapa dikatakan bahwa kesepakatan itu tidak mempunyai padanan yang jelas ? sebab suatu waktu bisa saja mengalami perubahan. Ketika suatu waktu mengalami perubahan, maka ada waktunya memiliki otoritas dan ada waktunya kehilangan otoritas. Maka dari itu kesatuan atas perbedaan tidak bisa disatukan dengan sesuatu yang lain selain dari wujud itu sendiri. Sebab adanya perbedaan dan persamaan, bukan selain dari wujud. melainkan adanya aspek persamaan dan perbedaan kembali pada kesatuan wujud.

Ketiadaan tidak memiliki perbedaan, keberagaman, sebab perbedaan, keberagaman itu timbul dari keberadaan. Sedangkan ketiadaan adalah tiada bukan ada atau wujud.³⁴ Ketika keberagaman dipandang sebagai suatu entitas yang berbeda satu sama lain, maka tidak ada hubungan dan ikatan di dalamnya. Sedangkan berdasarkan prinsip fundamental wujud bahwa adanya kesatuan dan keberagaman di realitas eksternal, yang melandasi tidak lain dari wujud itu sendiri. Ketika kita menilai realitas berdasarkan kuintitas, maka yang terjadi adalah perbedaan secara totalitas. Sebab kuintitas satu dengan kuintitas lainnya tidak memiliki kesamaan satu sama lain. Sebagaimana dikatakan Mulla Sadra dalam salah satu argumentasi filosofisnya bahwa kuintitas merupakan sumber perbedaan karena masing-masing tidak memiliki kesatuan di dalamnya.³⁵ Prinsip kuintitas secara implikasi sama dengan prinsip filsafat Peripatetik yang mengatakan bahwa eksistensi yang ada di luar realitas eksternal berbeda secara totalitas, oleh karena itu dapat dipahami bahwa keduanya sama. Hanya saja, dalam pandangan Peripatetik tidak menafikkan adanya kesatuan. Namun, kesatuan yang dimaksud oleh kaum Peripatetik yaitu kesatuan secara idealitas atau kesatuan konseptual.

Kebhinnekaan atau keberagaman sebagian besar orang memahami bahwa dalam keberagaman meniscayakan adanya perbedaan. Ketika mengalami perbedaan maka menilai sesuatu itu betul-betul berbeda tanpa ada aspek kesamaan atau disebut dengan diversity (*tabāyun*). Dalam bentuk negara, misalkan Indonesia yang memiliki suku, etnik, ras, budaya, dan agama secara keberadaan, memang berbeda. Budaya Sulawesi dan budaya Kalimantan pasti berbeda, dan budaya Kalimantan berbeda dengan budaya lainnya. Selanjutnya agama di Indonesia juga beragam. Ada sebagian agama yang dimobilisasi oleh konstitusi, juga ada sebagian agama yang tidak dimobilisasi oleh konstitusi. Dalam konteks negara ini secara faktual di realitas eksternal melihat gejala sosial yang beragam baik dari

³⁴ Hasan. A.A, *Ringkasan Logika Muslim Sebuah Analisa Definisi, Logika dan Filsafat*, hal. 39

³⁵ Kholid Al-Walid, *Perjalanan Jiwa Menuju Akhirat Filsafat Eskatologi Mulla Sadra*, hal. 35-36

budaya, etnik ras, dan agama benar apa adanya. Hanya saja dari perbedaan itu disatukan dalam kesepakatan konstitusi, meskipun juga ada yang tidak diakui secara konstitusi. Artinya bahwa ketika keberagaman ini disatukan secara konstitusi, maka kesatuan itu ada karena hasil kesepakatan konstitusi. Sedangkan secara keberadaan, masih ada entitas-entitas gejala sosial yang terlihat dari ritual keagamaan, meskipun ada secara eksistensi tetapi tidak diakui secara konstitusi. Artinya bahwa ketika kita melihat keberagaman ini berdasarkan konstitusi, maka kita bisa menafikkan realitas yang lain meskipun berada secara eksistensi.

1. Kebhinekaan secara Konstitusi

Telah dijelaskan sebelumnya bahwa kebhinnekaan ketika dipandang sebagai entitas berbeda secara totalitas, maka tidak ada persamaan di dalamnya. Berbeda halnya dengan kebhinnekaan secara konstitusional (Undang-Undang). Dalam konstitusi sangat dibatasi dengan penilaian realitas. Artinya bahwa tidak semuanya realitas eksistensi itu diakui. Misalkan adanya penghayat keyakinan. Penghayat keyakinan ini dikenal dengan agama tradisional yang berkembang hanya pada wilayah atau tempat tertentu. Mungkin kebanyakan masyarakat Indonesia tidak mengetahui bahwa sebelum agama-agama ‘resmi pemerintah’ seperti Islam, Kristen Katolik, Protestan, Hindu Buddha, juga baru dapat pengakuan yaitu Khonghucu masuk ke Nusantara atau Indonesia, sudah jauh sebelumnya eksistensi agama-agama atau kepercayaan asli, seperti Sunda Wiwitan, Buhun Kejawan di Jawah Tengah, Jawa Timur; gama Parmalin (agama asli Batak); agama Kaharingan di Kalimantan; Toonas Walian di Minahasa di Sulawesi Utara; suku Baduy Kanekes di Banten; Tolottang di Sulawesi Selatan; Wetu Telu di Lombok; Naurus di Pulau Seram di Propinsi Maluku; dan sejenisnya secara keberadaan memang terlihat dari fenomena sosial yang menjalankannya. Lalu pertanyaannya, apakah agama jenis ini diakui secara eksistensi? Agama-agama asli tersebut dikategorikan sebagai ajaran animisme yaitu sebagai ajaran yang menyembah berhala, patung

atau hanya sebagai aliran kepercayaan. Faktanya secara konstitusi masih belum diakui atas pertimbangan mahkamah konstitusi di Negara Indonesia.³⁶ Sampai sekarang mereka yang menganut kepercayaan asli di Nusantara seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa tak satu pun mereka diakui di Indonesia. Pada akhirnya mereka dikategorikan sebagai agama penghayat kepercayaan murni dan agama penghayat kepercayaan tidak murni. Lalu apa bedanya diantara mereka atas pembagian itu ? Bedanya adalah kalau agama penghayat kepercayaan murni, mereka tidak dicantumkan di kolom KTP khusus keterangan agamanya. Sedangkan mereka yang penganut agama penghayat keyakinan tidak murni, yaitu mereka masih mengikuti budaya ajaran sukunya. Tapi, mereka masih mencantumkan keterangan agama yang diakui di Indonesia di KTP-nya dengan alasan karena keterpaksaan dan situasi politik dan persoalan administratif yang memaksakan mereka seperti itu. Sedangkan ketetapan hukum agama “diakui” atau tidak “diakui”, resmi atau sebaliknya, adalah konsep legitimasi yang inkonstitusional, juga bertentangan dengan Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia 1948 / Deklarasi, Kovenan Internasional Hak Sipil 1966 (UU RI No. 12 / 2005), UUD 1945 Amandemen IV / 2004, pasal 29, dan UU RI No. 39 / 1999 tentang HAM.³⁷ Artinya bahwa ketika melihat keberagaman dengan berlandaskan konstitusi, maka bukan hanya perbedaan itu dibatas dengan konstitusi, tapi juga menafikkan keberadaan yang lain. Jadi, kebhinnekaan atau keberagaman ketika legalitasnya diatur dalam konstitusi, maka kesatuan atas keberagaman pun diatur dalam konstitusi.

Begitupun dengan eksistensi kebhinnekaan dalam konsep *Bhinneka Tunggal Ika* bahwa dalam keberagaman seperti ras, etnik, budaya, agama dan politik mempunyai kesatuan dalam

³⁶ Djohan Effendi, *Merayakan Kebebasan Beragama Bunga Rampai Menyambut 70 Tahun Djohan Effendi*, (Jakarta: Indonesian Conference on Religion and Peace; 2009), hal. 372.

³⁷ Djohan Effendi, *Merayakan Kebebasan Beragama Bunga Rampai Menyambut 70 Tahun Djohan Effendi*, hal. 372-373.

kesepakatan konstitusi. Ketika perbedaan itu disatukan oleh kesepakatan, maka melihat kesatuan itu bukan kesatuan secara eksistensial, melainkan bersifat i'tibari³⁸ Berbeda halnya dengan menilai kebhinnekaan secara eksistensial. Ketika memaknai kebhinnekaan secara eksistensi, maka dalam keberagaman itu, meniscayakan adanya kesatuan. Sehingga perbedaan atau keberagamannya pun sesuatu yang niscaya aktual kedua-duanya.

2. **Kebhinekaan secara Eksistensial**

Telah dijelaskan sebelumnya bahwa begitu banyak orang menilai kebhinnekaan itu hanya secara keberagaman saja. Artinya bahwa keberagaman itu dinilai tanpa adanya persamaan. Bahkan ketika kebhinnekaan itu dimaknai secara konstitusi, maka kesatuannya pun berdasarkan konstitusi. Berbeda halnya dengan kebhinnekaan atau keberagaman secara eksistensi. Ketika kita menilai keberagaman berdasarkan eksistensi, maka adanya keberagaman juga itu tidak lain dari eksistensi. Ketika keberagaman itu dinilai secara eksistensi maka, keberagaman itu mesti memiliki kesamaan. Dalam konteks kebhinnekaan secara eksistensi ini, meniscayakan adanya perbedaan juga meniscayakan adanya persamaan. Artinya bahwa adanya perbedaan itu akan kembali pada kesatuan. Pertanyaannya, lalu kesatuannya di mana? kesatuannya terdapat pada eksistensi. Satu sekaligus beragam, itulah eksistensi. Jadi, kebhinnekaan atau keberagaman secara eksistensi bukan hanya keberagaman lantas disatukan dengan selain eksistensi atau non eksistensi (ketiadaan). Melainkan kebhinnekaan secara eksistensi beragam sekaligus satu berdasarkan eksistensial. Dapat dipastikan bahwa kebhinnekaan atau keberagaman secara eksistensi, yaitu keberagaman yang

³⁸ I'tibari yang dimaksud disini adalah suatu ilmu yang diciptakan oleh manusia. Ilmu jenis ini tidak memiliki realitas objektif misalkan kesepakatan, konsensus (Undang-Undang), ilmu bahasa kaidah-kaidah nahwu,sharf gramatika. Ilmu ini senagaja dibuat oleh manusia untuk mempermudah mereka dalam kehidupan. Lihat Mohsen Gharawiyen, *Pengantar Memahami Buku Daras Filsafat Islam*, (Jakarta: Sadra Press, 2012), hal. 17.

meniscayakan kesatuan berdasarkan eksistensi. Adanya kebhinnekaan juga pasti ada kesatuan. Ketika hanya keberagaman, maka tidak ada kesatuan. Selanjutnya jika yang ada hanya kesatuan, maka tidak ada kebhinnekaan atau keberagaman. Kebhinnekaan yang dipahami secara total, itulah yang dinamakan *diversity (tabayaun)* perbedaan tanpa adanya kesamaan atau kesatuan.

Demikian yang dapat kita pahami dari sudut pandang kebhinnekaan berdasarkan pada konstitusi serta keberagaman berdasarkan teori *taskīk al-wujūd*, yang mana keduanya merupakan sebuah realitas yang berlaku di dalam elemen kehidupan manusia, tak terkecuali dalam konteks keindonesiaan. Oleh sebab itu, perlu kiranya untuk tidak mempertentangkan adanya perbedaan, karena di dalamnya memuat sejumlah aspek kesatuan.

BAB V

PENUTUP

Sebelumnya perlu diketahui bahwa dengan adanya teori *tasykīk al-wujūd* yang dibahas dalam ranah filsafat Islam serta kebhinekaan yang menjadi simbol dan karakter bangsa Indonesia, tentunya keduanya didasari atas sebuah kesadaran akan kesatuan di dalam berbagai keberagaman yang ada. Maka dari itu, dengan berbagai penjelasan yang telah dibahas terkait keduanya (*tasykīk al-wujūd* dan kebhinekaan), berikut ini akan dibawakan beberapa kesimpulan, antara lain:

A. Kesimpulan

Setelah kita mengetahui dalam pembahasan sebelumnya bahwa kebhinekaan ketika ditelaah berdasarkan teori *tasykīk al-wujūd*, kini kita dapat menyimpulkannya. Oleh sebab itu, berdasarkan pada permasalahan yang dibahas yakni “Apakah permasalahan kebhinekaan dalam semboyan *Bhineka Tunggal Ika* dapat direspon berdasarkan teori *tasykīk al-wujūd* dalam penelitian ini, maka dapat ditarik dalam beberapa kesimpulan, antara lain:

1. Berdasarkan teori *tasykīk al-wujūd* bahwa semua realitas di alam eksternal ini beragam namun, didasari oleh satu padanan yaitu eksistensi. Dan memaknai realitas eksistensi itu satu sekaligus beragam, berdasarkan prinsip *tasykīk al-wujūd*. Artinya bahwa dalam keberagaman (kebhinekaan) itu tidak berbeda secara totalitas sebab memiliki satu hakikat yaitu eksistensi dan itulah kesatuannya.
2. Sama halnya dengan teori *tasykīk al-wujūd*, konsep kebhinekaan juga dipahami sebagai sebuah keberagaman yang menyertai suku, budaya, agama, ras, adat istiadat, dan lain-lain. Tentu saja, dalam konteks keindonesiaan, kebhinekaan merupakan sesuatu yang telah ada sebelum dan sesudah Indonesia merdeka, sehingga jati diri bangsa Indonesia sebenarnya terletak pada berbagai keberagaman yang ada sekaligus menjadi tujuan dan cita-cita bersama di dalam mewujudkan suatu kehidupan damai dan mampu hidup berdampingan dengan yang lain.

3. Seperti yang dapat dilihat bahwa konsep kebhinekaan telah tertuang dalam UUD 1945 dan simbol NKRI. Akan tetapi, darinya kita dapat mengetahui lebih jauh bahwa kebhinekaan bukanlah sebuah konsensus semata, melainkan didasarkan realitas sosial masyarakat Indonesia itu sendiri. Sebab, jika kebhinnekaan itu berdasarkan kesepakatan, maka keberagaman dan kesatuannya pun ditetapkan secara kesepakatan yaitu konstitusi. Dalam perkembangan interaksi sosial Indonesia misalkan, sesuatu yang dikatakan beragam mesti diakui terlebih dahulu secara konstitusional. Ketika tidak diakui secara konstitusional, maka tidak diakui dalam Undang-Undang negara. Ketika tidak diakui dalam Undang-Undang negara, maka tidak diakui sebagai sesuatu yang ada di negara Indonesia. Ketika tidak diakui sebagai sesuatu yang ada, maka tidak layak dikatakan bagian dari kebhinnekaan atau keberagaman. Konsekuensinya ketika ingin diakui sebagai sesuatu yang ada, maka harus sah dalam ketetapan konstitusi, begitupun dengan kesatuannya. Ketika memaknai kesatuan dan keberagaman itu berlandaskan ketetapan konstitusi, maka konsekuensinya kesatuan dan keberagaman itu, juga dibatasi dengan kesepakatan. Ketika hanya kesepakatan, maka ia tidak bisa diterapkan menjadi sebuah kesadaran. Sehingga posisi teori wujud Mulla Shadra disini tidak terbatas pada wilayah kesepakatan, melainkan lebih dari kesepakatan itu sendiri yaitu memaknai keberagaman dan kesatuan berdasarkan eksistensi, yang sudah menjadi kesadaran inheren dalam diri setiap orang. Artinya bahwa kebhinnekaan merupakan sebuah kesepakatan yang tidak mempunyai basis eksistensi selain eksistensi itu sendiri.

B. Saran

Penelitian ini berupaya untuk memaknai kebhinnekaan berdasarkan eksistensi dalam teori *tasykik al-wujūd*. Tentu saja, dalam penulisan ini, penulis menyadari keterbatasan serta kekurangan dalam proses penelitian ini. oleh karena itu, tulisan ini

sangat terbuka untuk diberi saran, serta kritikan guna melengkapi kekurangan-kekurangan yang ada. Dalam tulisan ini, penulis bermaksud ingin mencoba melihat kebhinnekaan dalam perspektif Mulla Shadra berdasarkan prinsip gradasi wujudnya. Dalam artian bahwa penulis mencoba mendudukan persoalan kebhinnekaan atau keberagaman dalam ranah eksistensi. Dan tentunya, di sini terdapat beberapa saran, antara lain:

1. Bagi peneliti selanjutnya, sebisa mungkin ketika mampu mengakses literatur kebhinnekaan terutama kitab sutasoma secara langsung—tanpa terjemahan—akan lebih mudah untuk menggali makna kebhinnekaan dari sisi bahasa dan tujuan-tujuannya.
2. Dari sisi tujuan dan penerapan teori *tasykik al-wujūd* ketika dikaitkan secara langsung dengan topik kebhinnekaan, sebisa mungkin ketika mengaitkannya dengan problematika kehidupan sehari-sehari dalam konteks keindonesiaan, mungkin lebih mendalam dan menampilkan corak utuh agar dapat khazanah pemikiran.

Semoga dengan memaknai keberagaman berdasarkan eksistensi, penulis berharap bahwa, penulisan ini menjadi warna baru untuk memberikan pemahaman tentang kebhinnekaan yang selama ini menjadi penyebab kesalahpahaman (salah persepsi) pada akhirnya terjadi konflik horizontal. Penulis juga berharap karya ini menjadi salah satu solusi untuk mereka yang menganggap bahwa atas kebhinnekaan ini, tidak ada kesamaan atau kesatuan di dalamnya. Juga mereka yang menganggap bahwa, kebhinnekaan itu tidak ada sehingga mereka menuntut keseragaman.

DAFTAR PUSTAKA

- Adiwidya, Tim Visi. *Panduan Lulus Seleksi CPNS Tenaga Pendidikan Sistem Cat (Computer Assisted Test)*. Jakarta: Visi Media. 2015.
- Al-Āmulī, Asy-Syeikh Mālik Musthafā Wahhab. *Durūs Falsafah fī Syarh al-Mandzūmah*. Beirut: Dār al-Hādī lī at-Thabā'ah wa an-Nasyr wa at-Tauzī'. 1422 H.
- Al-Walid, Kholid. *Perjalanan Jiwa Menuju Akhirat Filsafat Eskatologi Mulla Sadra*. Jakarta: Sadra Press. 2012.
- Al-‘Ubud Ali bin Hajj Abdullah. *Muhādarat Tamhīdīyah fī al-Falsafah*. Wafa: Baqiyat. 2008.
- Amar, Hasan A. *Ringkasan Logika Muslim Sebuah Analisa Definisi. Logika dan Filsafat*. Jakarta: Yayasan Al-Muntazhar. 1992.
- Aritonang, Jan S. *Sejarah Perjumpaan Kristen dan Islam di Indonesia*. Jakarta: PT BPK Agung Mulia. 2004.
- Ar-Rifāi, Abdul Jabbar. *Mabādī al-Falsafah al-Islamiyyah*. Beirut: Dār al-Hādī lī at-Tabā'ah wa an-Nasyr wa at-Tauzī'. Jilid 1. 2001.
- Bagir, Haidar. *Buku Saku Filsafat Islam*. Jakarta: Mizan Pustaka. 2005.
- Baidhawiy, Zakiyuddin. *Pendidikan Agama Berwawasan Multikultural*. Jakarta: Erlangga. 2005.
- Bull, Victoria (editor). *The Oxford Dictionary*. London: Oxford University Press. 2011.
- Buwono X, Hamengku. *Merajut Kembali KeIndonesiaan Kita*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. 2007.
- Effendi, Djohan. *Merayakan Kebebasan Beragama Bunga Rampai Menyambut 70 Djohan Effendi*. Jakarta: Indonesian Conference On Religion and Peace. 2009.
- Eviyana, Eva Nur. *Pancasila dan Tokoh*. Yogyakarta: Bintang Pustaka Madani. 2020.
- El Bilad, Cecep Zakarias. *Problematika Eksistensi Negara Dalam Ilmu Hubungan Internasional Perspektif Filsafat Mulla Shadra*. Jakarta: Icas Paramadina (Tesis) 2015.
- Fadli, Andi Muh. Dzul. *Buku Ajar Sistem Politik Indonesia*. Jogjakarta: Deepublish. 2017.

- Fukuyama, Francis. *Guncangan Besar Kodrat Manusia dan Tata Sosial Baru*, Terj. Masri Maris. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. 1999.
- Gaus AF, Ahmad, *Api Islam Nurcholish* Madjid. Jakarta: PT. Kompas Media Nusantara. 2010.
- Gharawiyani, Mohsen. *Pengantar Memahami Buku Daras Filsafat Islam*. Jakarta: Sadra Press. 2012.
- Haryatmoko. *Dominasi Penuh Muslihat Akar Kekerasan dan Diskriminasi*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. 2010.
- Hasrullah. *Dendam Konflik Poso (Periode 1998-2001): Konflik Poso dari Perspektif Komunikasi Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. 2009.
- Hidayati, Mega. *Jurang di Antara Kita Tentang Keterbatasan Manusia dan Problem Dialog dalam Masyarakat Multikultur*. Yogyakarta: Kanisius. 2008.
- Huda, Shoki. *Tasawwuf Kultural: Fenomena Shalawat Wahidiyah*. Yogyakarta: LkiS. 2008.
- Jabir, Muhammad Nur. *Wahdah Al-Wujud Ibn Arabi dan Filsafat Wujud Mulla Shadra*. Makassar: Chamran Press. 2012.
- Kalla, M. Jusuf. *Korupsi Mengorupsi Indonesia Sebab, Akibat, dan Prospek Pemberantasan*. Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Utama. 2009.
- Kaputra, Iswan, dkk. *Dampak Otonomi Daerah di Indonesia Merangkai Sejarah Politik dan Pemerintahan Indonesia*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia. 2013.
- Krishna, Annand. *Sandi Sutasoma: Menemukan Kepingan Jiwa Mpu Tantular*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. 2007.
- Kusnanto. *Keanekaragaman Suku dan Budaya Indonesia*. Semarang: Alprin. 2009.
- Lelono, Martinus Joko. dkk. *Bhineka Tunggal Ika dalam Sketsa: Refleksi Keberagaman Muda-Mudi Lintas Iman*. Malang: Dwi-Quantum. 2017.
- Madjid, Nurcholish. *Islam Kemoderenan dan Keindonesiaan*. Bandung: Mizan. 1998.
- Islam Agama Kemanusiaan: Membangun Tradisi dan Visi Baru Islam* Indonesia. Jakarta: Yayasan Wakaf Paramadina. 1995.

- Mahfud MD, Moh. Dkk. *Prosiding Kongres Pancasila IV Strategi Pelembagaan Nilai-nilai Pancasila dalam Menegakkan Konstitusionalitas Indonesia*. Yogyakarta 31 Mei-01 Juni 2012.
- Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, *Panduan Pemasyarakatan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia*. Jakarta: Sekertaris Jenderal MPR RI, 2014.
- Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor I/MPR/20003 Tentang Peninjauan Kembali Materi dan Status Hukum Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 1960 Sampai Dengan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 1960 Sampai Dengan Tahun 2002*. Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI, 2014.
- Mardani. *Pendidikan Agama Islam Untuk Perguruan Tinggi*. Depok: Kencana. 2017.
- Muthahari, Murtadha. *Filsafat Hikmah: Pengantar Pemikiran Shadra*. Bandung: Mizan. 2002.
- Nurcholish, Ahmad. *Peace Education dan Pendidikan Perdamaian Gus Dur*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo. 2015.
- Merajut Damai dalam Kebhinekaan*. Jakarta: Elex Media Komputindo. 2017.
- Nur, Syaifan. *Filsafat Hikmah Mulla Shadra*. Yogyakarta: RausyanFikr Institute. 2012.
- Purnama, Moch. Indra. *Sutra Soma: Bahtera Nusantara*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. 2019.
- Raharjo, Mudjia. *Dasar-Dasar Hermeneutika: Antara Intensionalisme dan Gadamerian*. Yogyakarta: Media. 2008.
- Rahman, Fazlur. *Filsafat Shadra*. Bandung: Pustaka. 2000.
- Sawitri, Cok. Sutasoma. Jakarta: Kakilangit Kencana. 2009.
- Siswanto, Joko. *Politik Kebangsaan*. Malang: IRDH Book Publisher. 2020.

- Sudibyo, Agus. *Politik Media dan Pertarungan Wacana*. Yogyakarta: LkiS. 2001.
- Sumarsono, S. *Pendidikan Kewarganegaraan*. Jakarta: Gramedia. 2006.
- Surbakti, Ramlan. *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: Grasindo. 2010.
- Thabathabai, Sayyid Muhammad Husein. *Bidāyah al-Hikmah*. Qum: Muassasah al-Ma'arif al-Islamiyah. 1418 H.
- Nihāyah Al-Hikmah*. Qom: Muassasah an-Nasyr al-Islāmī. 1426 H.
- Ushūl Falsafah wa Al-Manhāj Al-Wāqī'iyah*. Iraq: Al-Muassasah Al-'Iraqiyah lī An-Nasyr wa At-Tauzī', Jilid 2. 1417 H
- Thompson, Hans J. Morgenthau, Kenneth W. *Politik Antar Bangsa*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor. 1991.
- Tim Pusat Bahasa. *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa. 2008.
- Tim Smart Genesis. *UUD 19945 dan Amandemen*. Yogyakarta: Genesis Learning. 2016.
- Tugiyono. *Sejarah*. Jakarta: PT. Grasindo. 2004.
- Ubaedillah, A. *Pendidikan Kewarganegaraan (Civic Education) Pancasila, Demokrasi, dan Pencegahan Korupsi*. Jakarta: PT. Fajar Interpratama Mandiri. 2017.
- Uchrowi, Zaim. *Karakter Pancasila Membangun Pribadi dan Bangsa Bermartabat*. Jakarta: PT. Balai Pustaka. 2012.
- Waluya, Bagja. *Sosiologi: Menyalami Fenomena Sosial di Masyarakat Untuk Kelas X Sekolah Menengah Atas*. Bandung: PT. Setia Purna Inves. 2007.
- Ward, Keith. *Benarkah Agama Berbahaya?*. Yogyakarta: Kanisius. 2009.
- Wirawan, I Wayan Ardhi, dkk. *Konflik dan Kekerasan Komunal pada Komunitas Hindu di Nusa Tenggara Barat Pasca Otonomi Daerah*. Yogyakarta: Deepublish. 2016.
- Yazdi, M.T. Mishbah. *Buku Daras Filsafat Islam: Orientasi ke Filsafat Islam Kontemporer*. Penerj. Musa Kazhim dan Saleh Baqir. Jakarta: Sadra Press. 2010.
- Al-Manhāj Al-Jadīd fī Ta'lim Al-Falsafah*. Beirut: Dār at-Ta'ārif lī al-Matbū'āt. Jilid 1. 2007.

Yuniarto, Bambang. *Wawasan Kebangsaan*. Yogyakarta: Deepublish. 2021.

Zain, Fathurin. *Politik Analisis Wacana Media*. Yogyakarta: LkiS. 2004.

JURNAL

Lestari dkk, *Jurnal Bhinneka Tunggal Ika : Khazanah Multikultural Indonesia di Tengah Kehidupan Sara*, Th.28, Nomor.1, Pebruari 2015.

Lestari, Ginari, *Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, Program Ketahanan Nasional Universitas Gajah Mada Th.28, Nomor.1, Pebruari 2015.

WEBSITE

Dilihat di Abdullah, *Gus Dur Ajarkan Kebhinnekaan Indonesia dengan Cara Sederhana*. NU Online, Kamis, 23, Januari 2014 pukul 16:00 WIB

Dilihat di Kompas. Com, *Catatan Komnas HAM, Kasus Intoleransi Meningkat Setiap Tahun*, Kamis 5 Januari 2017, Pukul 18:28 WIB

Dilihat di Tempo.Co, *Konflik yang Dipicu Keberagaman Budaya Indonesia*, Pukul 17:00 WIB, Tgl 12 April 2017

Dilihat di

<http://nasional.kompas.com/read/2008/05/05/00290485/impitan.ekonomi.picu.tindak.kriminalitas>, 24/02/2018. Pukul 11:29 WIB